

MOESLIM CHOICE

● EDISI 39 / MARET 2021

● MOESLIMCHOICE.COM ● MOESLIMCHOICE.TV



DRAMA MOELDOKO DEMI TAHTA

**PEMBIAYAAN
SYARIAH TURUN
KE JALAN**

**MUALAF: MASUK ISLAM
SETELAH IKUT GERAKAN
"WORLD HIJAB DAY"**

**SETAHUN
BERSAMA
COVID-19**

**5 ARTIS INI
MENINGGAL AKIBAT
COVID-19**

ISSN 2614-2783



Rp 50.000

MOESLIM^{CHOICE}.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MOETV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM^{CHOICE}
M A G A Z I N E

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Zulfahmi Jamba

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURImayani, Rosidah, Yuhie Rusdhi,
Fahmi Jamba, M. Rahmat**REDAKTUR BISNIS**Siswo Hadi SE, MM,
Hj. Elis Sukma SSo, MM
Syahrul Siregar, M. Agus Djouhari**REPORTER**Sugiharta Yunarto, Ramadhan
Siregar, M. Iqbal, Ida Iryani, Sunarya
Sultan, M. Yadihi, Abdul Mukhtar,
Muhammad Fikri**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER

Al Amin

ART DESIGN CONSULTANT

Fonda Lapod

TATA LETAK

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Ivan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKANPT. RESPATIH SAHABAT SEJATI
ALAMAT : JL.KALIBARU TIMUR V/39F
BUNGUR SENEN JAKARTA PUSAT

Isi di luar tanggung jawab percetakan

>>SALAM REDAKSI

INVESTASI

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perhatian terhadap peringatan setahun wabah Covid-19 di Indonesia tampaknya bersaing ketat dengan kontroversi kebijakan investasi khususnya di bidang minuman keras. Dalam spektrum yang lebih luas, persaingan perhatian itu mencerminkan pula tarik-menarik antara prioritas kesehatan masyarakat saat wabah Covid-19 masih merajalela dan kondisi perekonomian warga secara keseluruhan.

Terkait hal ini Faheem Younus, seorang muslim yang juga dosen kedokteran Universitas Maryland di Baltimore, Amerika Serikat menegaskan bahwa kesehatan masyarakat dan ekonomi merupakan dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Tak mungkin ekonomi maju dengan mengabaikan kesehatan masyarakat, demikian pula sebaliknya kesehatan masyarakat di masa wabah akan pulih dengan mengabaikan faktor ekonomi. Jadi, keduanya perlu seiring dan sejalan.

Nah, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendapat pengesahan DPR pada 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 sekaligus diundangkan, merupakan salah satu upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi seiring dengan wabah Covid-19 melanda Indonesia yang catatan resminya mulai pada 2 Maret 2020.

Namun, Undang-Undang memang memerlukan aturan turunan yang lebih rinci agar dapat terlaksana secara konkret. Demikianlah maka Pemerintah mengundangkan secara resmi 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada Selasa, 16 Februari 2020.

Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden. (Perpres) Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua peraturan pemerintah (PP) yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Nah, dalam Perpres No 10 Tahun 2021, satu dari empat Perpres tadi, terdapat lampiran mengenai izin investasi bisnis minuman keras yang semula masuk daftar negatif investasi. Meskipun secara tegas izin itu hanya mencakup empat provinsi (Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara), provinsi lain tetap terbuka bagi investasi serupa dengan rekomendasi Gubernur. Maka jadilah Perpres itu kontroversi, namun akhirnya Presiden mencabut lampiran itu.

Masih menjadi pertanyaan, bagaimana menjelaskan upaya memajukan perekonomian sambil menjaga kesehatan masyarakat di tengah wabah, namun caranya dengan mengundang investasi minuman keras, yang jauh dari rekomendasi sebagai produk baik untuk kesehatan? ♦

>>COVER EDISI INI



www.moeslimchoice.com

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06

LAPORAN UTAMA

Umat Islam secara politik belum pernah memenangi pemilihan demokratis di Indonesia. Maksudnya tentu saja partai-partai politik yang mengusung Islam sebagai atribut kepartaiannya, padahal umat Islam sejak Indonesia mengenal pemilihan umum pada 1955 merupakan mayoritas di Indonesia. Namun, tetap saja umat Islam mengalami pasang-surut dalam dinamika di antara dua pemilihan demokratis.

20

COVER STORY

Bagaikan pentas drama, panggung politik nasional kini menampilkan Jenderal (Pur) Moeldoko sebagai figur yang sedang mendapat banyak sorotan tata cahaya. Lakonnya tentu saja dinamika politik domestik Indonesia.



24

LAPORAN KHUSUS

Kajian mengenai minuman beralkohol (minol), termasuk jenis yang keras (hard liquor) atau miras di Indonesia memang tergolong langka.



36

EKONOMI SYARIAH

Penerapan skema pembiayaan syariah sebagai alternatif memasuki babak baru: Mendanai proyek perbaikan (preservasi) Jalan Lintas Timur di sekitar Palembang, Sumatera Selatan.



50

FASHION

Dengan berhijab tak lantas membuat seseorang mati gaya. Banyak kreasi yang bisa diciptakan untuk membuat penampilan lebih cantik dan menawan, khususnya bagi para hijaber muda. Apapun gaya pakaiannya, semua bisa dirancang dan didesign, serta dipadu-padankan hingga menjadi sebuah penampilan yang modern, namun tetap memenuhi syarat sebagai busana Muslimah.



40

PALEMBANG EMAS DARUSSALAM

MEMAKMURKAN Masjid menjadi kewajiban setiap umat muslim. Untuk itu, Walikota Palembang, H. Harnojoyo bersama Walikota Jambi, Dr H. Syarif Fasha, SE, mengajak masyarakat Kota Palembang, untuk terus istiqomah dalam menjalani ajaran agama, untuk memakmurkan rumah Allah.SWT.



54

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Seiring pelaksanaan vaksinasi tahap kedua pada awal Maret 2021 ini, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mensosialisasikannya langsung di tengah warga. Masjid menjadi tempat pilihan sosialisasi kali ini mengingat vaksinasi tahap kedua mencakup pula prioritas bagi warga lanjut usia yang kerap salat berjamaah di masjid.

REGULER

- 3 | DARI REDAKSI
- 44 | UFUK
- 46 | MUALAF
- 64 | BIROKRASI
- 70 | PARLEMEN
- 72 | KESEHATAN
- 76 | KAJIAN
- 88 | RESENSI
- 90 | DUNIA ISLAM
- 96 | KOLOM
- 98 | INSPIRATIF

82

ISLAMICTAINMENT

Pandemi Covid-19 hingga kini masih terus berlangsung dan masih menakutkan bagi setiap orang di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pasalnya, kasus Positif Virus Corona di Indonesia saat ini masih cukup tinggi.



PASANG-SURUT DALAM DINAMIKA POLITIK



Umat Islam secara politik belum pernah memenangi pemilihan demokratis di Indonesia. Maksudnya tentu saja partai-partai politik yang mengusung Islam sebagai atribut kepartaiannya, padahal umat Islam sejak Indonesia mengenal pemilihan umum pada 1955 merupakan mayoritas di Indonesia. Namun, tetap saja umat Islam mengalami pasang-surut dalam dinamika di antara dua pemilihan demokratis.

Tah boleh jadi tetap banyak penasar ingin menemukan jawaban mengapa kalah lagi dan kalah lagi. Salah satu penjelasan datang dari hasil kajian Agus Riyanto, kandidat doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta. Ia mengkategorisasikan dua jenis partai Islam di Indonesia. Pertama, "partai Islam formalistik yang secara formal mencantumkan Islam sebagai dasar ideologi atau asas partai, dan (kedua) partai Islam substansialistik-simbolik yang men-

cantumkan Pancasila sebagai ideologi partai tetapi menggunakan nilai-nilai, jargon atau simbol-simbol Islam dalam aktivitas partai, dan/atau basis massa konstituen utamanya memiliki kedekatan dengan organisasi Islam tertentu."

Dengan menggunakan analisis path dependence (ketergantungan arah) dan critical junctures (persimpangan kritis), hasil kajian Agus menemukan sebab-akibat mengapa partai Islam selalu kalah dalam Pemilu di Indonesia sejauh ini. Pertama, kekalahan partai Islam Indonesia sepanjang lintasan politik sejak pemilu 1955 hingga 2019 merupakan hasil dari mekanisme sebab-akibat yang terkait keputusan politik agen dalam momen critical junctures yang memiliki efek signifikan terhadap arah perkembangan partai Islam dan mengarahkan kepada hasil kekalahan. Kedua, kekalahan partai Islam Indonesia mengindikasikan sebuah pengulangan ketergantungan arah (*path dependence repetition*) meliputi tiga proses path dependence yang dipicu oleh tiga momen critical junctures berupa keputusan politik agen partai. Masing-masing menghasilkan rangkaian peristiwa lanjutan kausal dalam tahapan *the aftermath of critical juncture* yaitu proses *reactive sequences*, *reinforcement* atau *self reinforcing sequences*, serta *reinforcement* atau *self reinforcing sequences* dan *reactive sequence*, dan meletakkan partai Islam ke dalam jalur perkembangan tertentu menuju final out-



come kekalahan pemilu legislatif.

Sebagai ringkasan, dari perspektif path dependence kekalahan partai Islam pada era reformasi ini merupakan *outcomes* (hasil) yang terkait dengan keputusan politik para agen partai Islam dengan pendirian partai-partai baru pada awal reformasi 1998 dalam momen critical juncture ketiga. Keputusan politik tersebut mengunci atau lock in partai Islam ke dalam jalur terpolarisasi dan kondisi inertia, yaitu ketika keputusan politik untuk mendirikan partai-partai Islam baru dilakukan menjadi sangat sulit menyatukannya kembali sehingga suara umat Islam terpecah.

Momen critical junctures ketiga juga berkontribusi pembentukan structural and institutional persistence yang memicu reactive sequence yaitu keputusan agen partai Islam bertransformasi ke arah catch all parties. Keputusan ini menjadikan tidak ada batas yang tegas antara partai Islam dengan partai nasionalis, sehingga mempengaruhi daya elektoralnya. Kekalahan juga diperparah konflik internal di dalam semua partai Islam yang menjadikan mereka tidak bisa melakukan penguatan kelembagaan internal sehingga gagal bersaing dengan partai non Islam lainnya dalam kontestasi pemilu legislatif sejak 1999 hingga 2019.

Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr KH Haedar Nashir, perbedaan pandangan keislaman di lingkungan umat Islam semakin kentara dalam hal politik. Banyak bangsa-bangsa muslim beragam pilihan bentuk dan sistem ketatanegaraan dari yang verbal sebagai negara Islam sampai negara muslim seperti Indonesia. Negara Islam pun banyak coraknya dari sistem teokrasi atau kerajaan seperti Saudi Arabia sampai bentuk demokrasi. Semuanya sah dan benar karena sepenuhnya merupakan hasil ijtihad. Karena ijtihad maka tidak ada klaim yang satu lebih Islami ketimbang lainnya, sebagai manifestasi dari Islam.

Dunia politik Islam pun sama, bersifat majemuk. Para tokoh dan organisasi politik Islam memiliki orientasi dan cara memperjuangkan politik yang beragam. Satu sama lain memiliki pandangan dan pilihan langkah yang tidak selalu sama, malah seringkali berbeda. Pandangan dan karakter para tokoh politik Islam pun bermacam-ragam, tidak jarang saling berseberangan paham. Akibatnya kelompok dan golongan politik di tubuh umat Islam pun majemuk alias beragam. Karenanya setiap ada klaim tokoh atau partai atau golongan yang mengatasnamakan Islam dan umat Islam tidak

akan sampai pada satu titik kesatuan atau persatuan.

"Atas nama Islam dan golongan Islam yang mana? Begitulah pertanyaan yang pelik dan perlu jawaban objektif," ungkap Haedar. Menurut dia, para ahli sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ukhuwah menjadi keyakinan bersama umat Islam, tetapi dalam perjuangan politik kenyataannya menunjukkan "banyak jalan menuju Mekkah". Negara-negara Islam atau negara muslim yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) selain beragam corak sistem kenegaraannya, juga sering berbeda dan beragam kepentingan dan strategi politiknya dalam memperjuangkan Islam dan umat Islam. Dalam menghadapi politik Donald Trump yang menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel tidak semua negara-negara OKI utuh satu kata dan satu langkah, termasuk Saudi Arabia.

Dalam perjuangan politik Islam di Indonesia sama, sejak perjuangan kemerdekaan sampai saat ini, gerakan dan organisasi politik dengan ragam orientasi



dan strategi politik hadir di negeri ini secara tidak tunggal. "Jumlah partai politik Islam pada Pemilu 2019 di negeri ini juga tetap beragam, sehingga satu sama lain saling berkontestasi secara politik. Semua tidak dapat dilebur menjadi satu dan berada dalam satu visi politik yang sama. Karena kalau terdapat tokoh atau partai politik yang mengklaim paling Islami dan merasa paling memperjuangkan aspirasi politik umat Islam maka dengan sendirinya akan terbantah dengan keragaman partai politik Islam tersebut," ungkapnya.

Keadaan yang majemuk tersebut, kata Haedar, bukan berarti harus dibenarkan semuanya seolah realitas politik itu sepenuhnya benar dan tepat untuk perjuangan umat Islam dalam politik. Bagaimanapun,

ujarnya, perlu untuk terus didialogkan atau dimusyawarahkan bagaimana strategi perjuangan politik Islam yang lebih aspiratif bagi keberhasilan umat Islam secara umum atau mayoritas dalam kehidupan politik di Indonesia dalam bingkai sistem politik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan aspirasi politik Islam yang separatis dan keluar dari sistem Negara Pancasila. "Dalam bahasa Muhammadiyah bagaimana perjuangan politik Islam Indonesia itu dapat berhasil dalam sistem Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah," ujarnya.

Jadi, kata Haedar, agenda terbesar dan utama perjuangan umat Islam di negeri-negeri muslim maupun di Indonesia ialah bagaimana mendialogkan "satu Islam multiwajah" itu dalam konsensus yang dapat disepakati bersama untuk keberhasilan atau kejayaan Islam dan umat Islam. Keyakinan masing-masing tokoh dan golongan politik Islam akan kebenaran misi dan strategi perjuangan yang dipilih atas nama Islam dan umat Islam perlu di-

musyawarahkan untuk mencari banyak titik temu kepentingan dan aspirasi Islam.

"Bukan saling klaim paling Islami dan paling membela perjuangan umat Islam tanpa parameter yang dapat disepakati bersama secara kolektif untuk merepresentasikan umat Islam secara keseluruhan. Itulah agenda perjuangan Islam yang terbilang berat tetapi sangat penting dan relevan," tandas Haedar.

Dalam konteks itu, dinamika politik belakangan ini dapat menjadi contoh pasang-surut Islam multiwajah. Antara lain, dalam kasus Perpres investasi minuman keras, kisah intelektual muslim Dr Din Syamsudin yang diadukan oleh GAR ITB, dan juga rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. ♦

KEGADUHAN IZIN INVESTASI MIRAS MULAI MEREDA

Akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras berbahan alkohol. Sebelumnya, izin investasi ini mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pencabutan izin investasi miras itu diumumkan sendiri oleh Jokowi dalam pernyataan singkat Selasa, 2 Maret 2021. "Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," demikian pernyataan Jokowi di Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan dalam akun resmi Sekretariat Presiden di YouTube.

Sebelumnya, kegaduhan wacana berlangsung sejak publikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres 10 Tahun 2021 itu sebenarnya satu bagian saja dari turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Secara keseluruhan, Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan turunan ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Nah, dari empat Perpres itu, salah satunya yang nomor 10 mencakup bidang-bidang yang semula tertutup untuk investasi menjadi terbuka.

Di mata Kepala BKPM Bahlil

Lahadalia Perpres tersebut secara keseluruhan dapat mendorong investasi yang lebih berdaya saing, sekaligus pengembangan bidang usaha prioritas. "Kalau dibandingkan dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016, ada 515 bidang usaha yang tertutup. Artinya, dia lebih ke orientasi pembatasan bidang usaha. Dengan Perpres yang baru, kita ubah cara pikirnya, lebih berdaya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha prioritas," kata dia.

Regulasi ini juga mengatur enam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal yaitu budi daya/industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES, pengambilan/pemanfaatan koral alam, industri senjata kimia dan industri bahan kimia perusak ozon.

Toh dengan Perpres ini, pemerintah melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras (miras), namun dengan berbagai syarat tertentu. Berdasarkan perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun investor domestik. Dengan izin



tersebut, koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri minuman keras.

Aturan soal miras tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras berada di dalamnya. Syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Untuk penanaman modal baru pembuatan minuman beralkohol di luar empat provinsi tersebut dapat ditetapkan oleh

di Papua, silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua," kata anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP), Dorius Mehue, Jumat, 26 Februari 2021.

MRP adalah majelis yang diamanatkan UU Otonomi Khusus Papua dan harus dimintai persetujuannya terkait kebijakan-kebijakan di Papua. Namun, menurut tokoh perempuan Papua itu, pihaknya sama sekali belum diajak bicara soal Perpres tersebut.

Di Bali lain lagi ceritanya. Pemerintah Provinsi Bali melihat Perpres Nomor 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal membuat minuman Arak Bali, Brem Bali, dan Tuak Bali kini menjadi usa-



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Selain minuman beralkohol, aturan pembukaan investasi ini juga berlaku untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta minuman yang mengandung malt. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, industri pembuatan miras masuk dalam golongan bidang usaha tertutup.

Karuan saja poin legalisasi yang tampak terbatas pada empat provinsi membuka kemungkinan di provinsi lain dengan usulan gubernur. Juga, ada titik krusialnya, antara lain, Provinsi Papua memiliki Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras.

Malah ada pula yang terang-terangan menolak investasi miras di Papua. "Kami menolak dengan tegas. Jika mau investasi



"Jadi saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat," ujar Anwar Abbas, Minggu, 28 Februari 2021.

ha yang sah untuk diproduksi dan dikembangkan.

Gubernur Bali Wayan Koster telah mengajukan surat Gubernur Bali Nomor 530/2520/Ind/Disdagperin, pada 24 April 2019. Surat tersebut terkait permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

"Terkait permohonan tersebut, mendapat respons dari Menteri Perindustrian RI melalui Dirjen Industri Agro untuk memfasilitasi revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Sambil menunggu perubahan Perpres mengusulkan pengaturan dalam produk hukum daerah guna menata minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali," dalam pernya-

taan resmi, 22 Februari 2021.

Sebelumnya, Pemprov Bali pada 29 Januari 2020 memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali, standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas, serta kesejahteraan Krama Bali. "Dengan terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, maka izin usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali yakni tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal dan arak/brem untuk upacara keagamaan sangat terbuka untuk dikembangkan oleh Krama Bali," katanya.

Koster mengaku akan mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerakyatan di sentra-sentra perajin arak. Penguatannya dilakukan dengan Koperasi atau UMKM sehingga usaha rakyat ini dapat difasilitasi melalui akses permodalan, pendampingan mutu, kemasan, branding, dan pasar. Sedangkan Praktik proses produksi yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional akan dilarang untuk menjaga proses fermentasi dan destilasi khas Bali yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-temurun.

Dari gambaran sejauh ini, Papua yang mayoritas warganya menganut agama Kristen dan Bali yang mayoritas Hindu ternyata memiliki kearifan lokal masing-masing yang tampak berbeda. Toh tak kurang dari kalangan ulama juga ikut menyuarotinya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, misalnya secara tegas menolak rencana pemerintah menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi. Menurut Kiai Said, Alquraan telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudharat.

"Kita sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras. Dalam Al-Qur'an dinyatakan (*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinaan*)," kata Kiai Said di Jakarta, Senin, 1 Maret 2021.

Ia mengatakan, seharusnya kebijakan pemerintah mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat sebagaimana kaidah fiqih Tasharruful imam 'alar ra'iyah manuthun bil maslahah (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemashlahatan rakyat). "Karena agama telah tegas melarang, maka

harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik," katanya.

Oleh sebab itu, sambungnya, melihat bahaya sebagai dampak negatif yang jelas dari miras ini sudah seharusnya dicegah dan tidak boleh ditoleransi. Kaidah fiqih menyatakan, (*Rela terhadap sesuatu artinya rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu tersebut*). "Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan



salahkan kalau nanti bangsa kita rusak," ucapnya.

Sedangkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas yang juga Wakil ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sempat kecewa dengan kebijakan yang mengizinkan investasi miras itu. Ia mengaku tidak mengerti mengapa pemerintah menetapkan industri minuman keras yang sebelumnya masuk ke dalam kategori bidang usaha tertutup, kini dimasukkan ke dalam kategori usaha terbuka.

"Jadi saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jelas-jelas tampak lebih mengedepan-

kan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” ujar Anwar Abbas, Minggu, 28 Februari 2021.

Menurut dia, pemerintah seharusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat, tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemudharatan bagi rakyatnya. “Tapi di situlah anehnya dimana pemerintah malah membuat kebijakan yang me-



mentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” ungkapnyanya.

Anwar pun melihat dengan adanya kebijakan itu tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha. “Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas,” ung-

MC *“Kita sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras. Dalam Al-Qur’an dinyatakan (Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan),” kata Kiai Said di Jakarta, Senin, 1 Maret 2021.*

kap Anwar Abbas.

Dengan kehadiran kebijakan itu, dia melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. “Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam praktiknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” tandasnya.

Toh Anwar Abbas akhirnya luluh setelah pencabutan lampiran Perpres miras itu. Ia malah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah mencabutnya.

“Ini bagi saya menjadi salah satu bukti bahwa beliau memang serius dan bersungguh-sungguh dengan pernyataannya belum lama berselang di mana beliau mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan beliau katanya siap untuk menerimanya,” kata Anwar. Selasa, 2 Maret 2021.

Apa yang dilakukan Jokowi, menurut Anwar, menunjukkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencerminkan sikap arif dan bijaksana di mana pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat. “Hari ini telah beliau bantah dan terbantah. Bagi saya sendiri secara pribadi, kalau selama ini beliau terkesan oleh saya lebih menonjol sikapnya sebagai seorang politisi, tapi dengan adanya peristiwa hari ini yang saya anggap sebagai sebuah peristiwa bersejarah dalam dunia perpolitikan dan dalam kehidupan kebangsaan di tanah air,” lanjut Ketua PP Muhammadiyah itu.

Dia berharap semoga sikap Jokowi yang ini tidak hanya terjadi sekali atau bahkan terhenti dalam kasus ini saja. “Tapi ke depan beliau juga kita harapkan akan lebih banyak melakukan hal-hal yang serupa. Ini penting kita garis bawahi karena dengan cara-cara dan sikap kepemimpinan yang seperti inilah persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa akan bisa kita rajut,” ujarnya.

“Sehingga kalau persatuan dan kesatuan diantara kita sudah bisa terwujud dan sambung rasa di antara kita sudah bisa terbangun, maka seberat apa pun persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini insyaaallah kita akan mampu menghadapi dan mengatasinya secara bersama-sama,” tandasnya.

Maka, kegaduhan tentang Perpres miras pun perlahan mulai mereda. Semoga kegaduhan yang lain pula. ♦

Jakarta, 26 April 2021



KANDASNYA GERILYA POLITIK GAR ITB

Surat tu ternyata bertanggal 28 Oktober 2020, namun baru mencuat di tengah wacana publik pada pertengahan Februari 2021. Toh surat GAR ITB itu sempat menjadi wacana kontroversi terkait intelektual muslim Din Syamsuddin.

Dalam surat terbuka itu, sejumlah alumni Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme (GAR) mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan sanksi kepada mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terkait radikalisme.

Din dilaporkan lewat surat terbuka nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 yang diklaim diteken 1.977 alumni ITB lintas angkatan dan jurusan. Selain ke KASN, surat yang sama dilayangkan ke Badan Kepegawain Negara (BKN). Alasannya, Din masih tercatat sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Akan halnya GAR-ITB, salah seorang anggotanya, Nelson Napitupulu, menjelaskan bahwa GAR-ITB bukan organisasi atau perkumpulan seperti umumnya yang memiliki struktur kepengurusan. GAR, kata

MC *"UU Ciptaker atau Omnibus Law Ciptaker sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar," kata Din pada 5 Oktober 2020.*

dia, sekadar wadah bagi alumni ITB yang memiliki fokus terhadap maraknya radikalisme dan intoleransi di Indonesia secara umum dan di ITB secara khusus. "Wadah ini terbuka buat seluruh alumni ITB yang memiliki concern yang sama," kata Nelson.

Nelson bercerita bahwa pembentukan GAR ITB berawal dari obrolan para alumni ITB dan beberapa alumni kampus lain yang peduli terhadap isu radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Awalnya, gerakan ini dinamakan Nusa Kinarya Rumah Indonesia atau NKRI. Sebab, kala itu masih banyak alumni dari universitas lain yang bergabung di dalamnya.

Lalu pada medio 2019, mereka membentuk GAR-ITB. Gerakan ini spesifik bagi alumni ITB yang konsen terhadap isu radikalisme dan intoleransi di kampus ITB kala itu. "Karena ada persoalan intoleransi dan radikalisme di ITB kita tak enak dengan PT lain. Makanya kita mengelompoklah, yang alumni ITB saja. Kita bahas yang internal ITB. Maka dibuatlah itu, GAR ITB," kata dia.

Nelson menyebut salah satu anggota



GAR-ITB adalah Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjoel Rachman. Menurut dia, Fadjoel masih aktif tergabung dalam keanggotaan GAR-ITB sampai saat ini dan tergabung dalam WhatsApp Group (WAG) GAR-ITB dan aktif memberikan komentar-komentar terkait isu yang ramai diperbincangkan.

"Ada, ada di WAG [WhatsApp Grup] GAR-ITB iya [tergabung]. Dia ada di WAG-nya. Obrolan orang di WA saja. Kalau dia ada waktu, ya dia merespons. Kalau ada diskusi isu-isu tentang radikalisme intoleransi kita hadirkan di situ," kata Nelson.

Sedangkan dalam laporan terhadap Din, GAR ITB menduga Din telah melanggar kode etik sebagai ASN terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam dua tahun terakhir. Dari total 9 pasal yang diduga dilanggar Din, dua di antaranya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2019 dan kiprahnya di KAMI. KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo.

Di halaman pertama surat laporan GAR ITB, Din Syamsudin diduga melakukan enam pelanggaran yakni pertama, Din dinilai bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan keputusannya Kedua, Din dinilai mendiskreditkan pemerintah dan menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko terjadinya proses disintegrasi negara.

Ketiga, Din dinilai melakukan framing menyesatkan pemahaman masyarakat dan menciderai kredibilitas pemerintah. Keempat, Din dinilai menjadi pimpinan dari kelompok beroposisi pemerintah. Ke-

MC

Menurut Mahfud, Din merupakan salah satu tokoh negara yang dibutuhkan untuk terus mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. "Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan insya Allah tidak akan pernah, karena kami anggap beliau tokoh," ujar Mahfud.

lima, Din dinilai menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Merespons aduan itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengaku telah melimpahkan laporan dugaan radikalisme itu ke Kementerian Agama (Kemenag), dan juga diteruskan ke Satuan Tugas Penanganan Radikalisme ASN. "KASN meneruskan aduan tersebut kepada Satgas Penanganan Radikalisme ASN dan Kementerian Agama sebagai instansi induk tempat Pak Din Syamsuddin," kata Ketua KASN, Agus Pramusinto, Sabtu, 13 Februari 2021.

Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta publik tak sembarangan memberi label radikal kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu. Yaqut menyebut persoalan dugaan pelanggaran kode etik Din harus dilihat secara proporsional. Ketua nonaktif GP Ansor itu menilai bahwa kritis berbeda dengan radikal, apalagi merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," kata Yaqut.

Tak jauh berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun mengatakan pemerintah tak pernah menganggap Din Syamsuddin sebagai sosok radikal. Mahfud menyebut Din adalah salah satu tokoh yang kerap menyuarakan modernisasi dalam beragama.

"Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama, Wasathiyah Islam, yang juga diusung oleh pemerintah," kata Mahfud lewat akun Twitter @mohmahfudmd.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengakui Din memang sosok yang kritis. Namun, menurut Mahfud, sikap kritisnya tersebut tak sama dengan sikap radikal.

Din, kata Mahfud, adalah salah satu sosok penguat sikap Muhammadiyah yang menyatakan Indonesia adalah "Darul Ahdi Wassyahadah", yang bisa juga diartikan sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila sejalan dengan Islam.

Mahfud MD juga memastikan peme-

apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan insya Allah tidak akan pernah, karena kami anggap beliau tokoh," ujar Mahfud.

"Saya pun sering diskusi dengan beliau, kadang di rumah Pak Jusuf Kalla, kadang di PP Muhammadiyah, bicaranya tentang nasionalisme, berbicara soal kemajuan Indonesia, bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah Indonesia ke seluruh dunia untuk berbicara soal Islam yang damai, perdamaian umat," tambah dia.

Bahkan, lanjut Mahfud, ketika Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din dan Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam lainnya sepakat menggagas Islam modernisasi.

"Pak Din saat jadi Ketum Muhammadiyah, di saat itu kan beliau yang mengga-



rintah tak akan pernah menangkap orang yang kritis terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Pernyataan ini memang menanggapi laporan GAR ITB. "Pemerintah tidak akan pernah menangkap orang yang kritis. Yang diproses secara hukum adalah orang yang melanggar secara hukum, mau kritis tapi sebenarnya destruktif, tapi kalau Pak Din, mana pernah kami persoalkan," ujar Mahfud dalam keterangannya, Minggu, 14 Februari 2021.

Menurut Mahfud, Din merupakan salah satu tokoh negara yang dibutuhkan untuk terus mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. "Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin,



Sedangkan Menteri Agama Yaqu Cholil Qoumas meminta publik tak sembarangan memberi label radikal kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu. Yaqu menyebut persoalan dugaan pelanggaran kode etik Din harus dilihat secara proporsional. Ketua nonaktif GP Ansor itu menilai bahwa kritis berbeda dengan radikal, apalagi merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

gas Islam Wasathiyah, sama juga sama yang digagas NU, karena Islam sudah compatible dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila, moderasi Islam atau negara Islam moderat, negara kesepakatan lintas etnis, agama, ras dan sebagainya," kata Mahfud.

Namun, Din memang kritis. Saat mewakili Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), ia menyahuti pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang menilai keberadaan kelompok tersebut mengganggu stabilitas politik nasional dengan meminta pemerintah lebih terbuka dalam menerima kritik yang disampaikan semua pihak termasuk KAMI.

Menurut dia, penyampaian aspirasi

oleh publik, yang dalam hal ini penyampaian pendapat di depan umum, merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti-kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?" ucap Din pada Jumat, 2 Oktober 2020.

Din pun meminta agar Moeldoko tidak perlu melontarkan bernada ancaman dalam menanggapi kritik yang disampaikan KAMI maupun kelompok masyarakat lainnya atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. "Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecute untuk tetap beristikamah dalam perjuangan," kata dia.

Masih mewakili Presidium KAMI, Din mengatakan, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kegaduhan besar di Indonesia.

Menurut Din, pemerintah dan DPR terlalu tergesa-gesa dalam mengesahkan UU tersebut.

"UU Ciptaker atau Omnibus Law Ciptaker sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar," kata Din pada 5 Oktober 2020.

"Pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk tergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam hari, tanpa membuka ruang bagi aspirasi rakyat," lanjut dia.

Selain UU Cipta Kerja, KAMI juga menyoroti rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sempat menuai kegaduhan publik. Din pun mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar ingin mencegah kegaduhan di Indonesia.

"Walaupun sudah digugat oleh organisasi masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan banyak lagi karena dinilai merendahkan Pancasila, namun masih termaktub dalam Prolegnas," ucap dia.

Lebih dari itu, Din juga memprotes penangkapan aktivis KAMI oleh polisi. Hal itu disampaikan Din menanggapi penangkapan delapan orang petinggi kami itu berlangsung di tengah demonstrasi UU Cipta Kerja yang beberapa kali berakhir dengan kerusuhan. Kedelapan orang tersebut ditangkap dengan delik penyebaran narasi bernada permusuhan dan SARA.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi

Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," kata Din pada 14 Oktober 2020.

Din menilai penangkapan tokoh KAMI terlihat janggal terutama terkait dimensi waktu, dasar laporan Polisi dan keluarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada hari yang sama. Ia melanjutkan juga seharusnya paling tidak ada dua alat bukti untuk bisa melakukan penangkapan.

"Lebih lagi jika dikaitkan dengan KU-HAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa 'dapat menimbulkan'," ujarnya, "Maka penangkapan para Tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis."

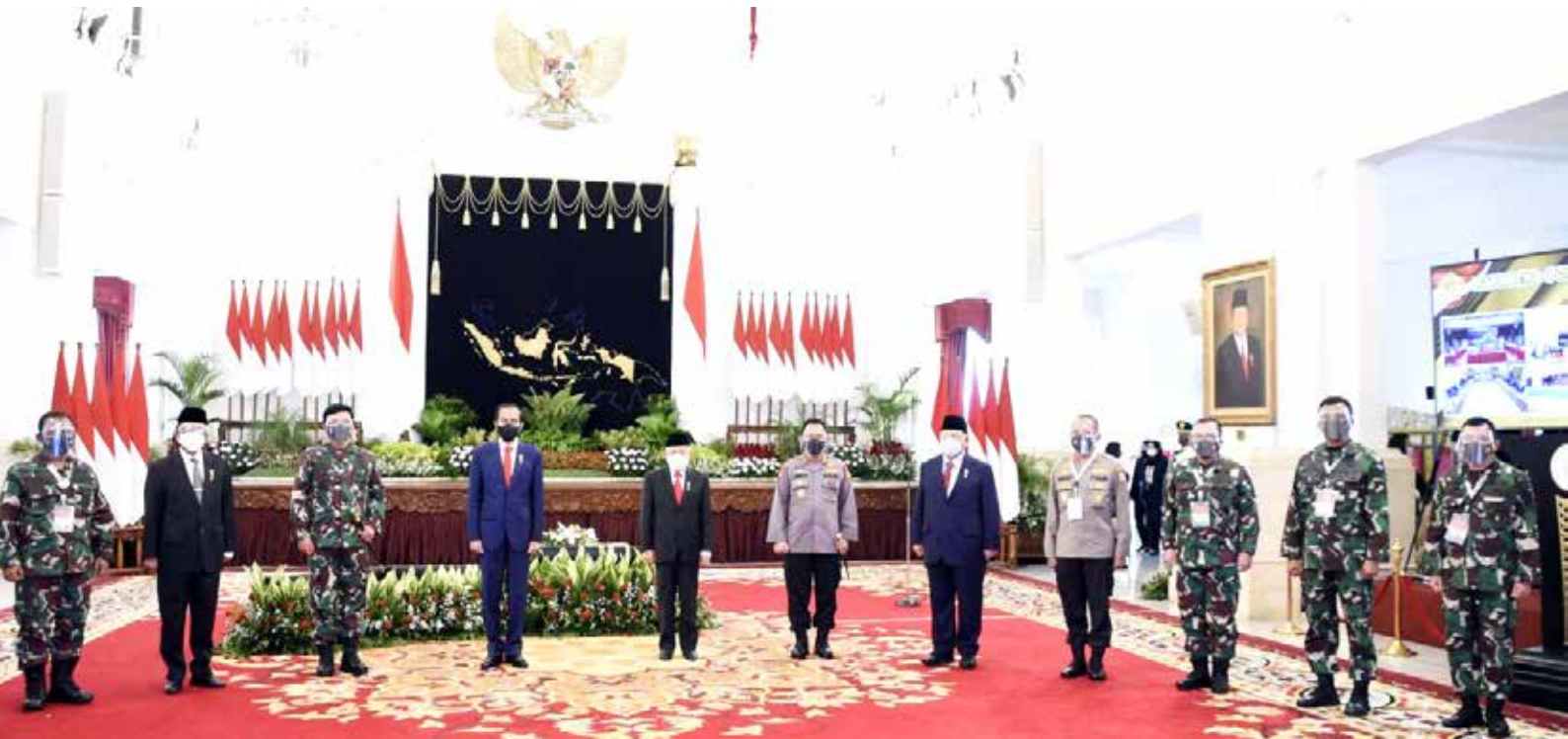
Boleh jadi dari pernyataan-pernyataan Din sepanjang Oktober 2020 itu, GAR ITB



MC Sedangkan dalam laporan terhadap Din, GAR ITB menduga Din telah melanggar kode etik sebagai ASN terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam dua tahun terakhir. Dari total 9 pasal yang diduga dilanggar Din, dua di antaranya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2019 dan kiprahnya di KAMI. KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo.

mendasarkan laporannya. Namun, sebagaimana penegasan Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah tak akan melakukan proses hukum pada mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu.

Mahfud menjelaskan bahwa selama ini pemerintah melihat Din Syamsuddin sebagai seorang tokoh yang kritis dan harus didengar. "Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin apalagi sampak memprosesnya secara hukum? Nggak pernah, dan Insya Allah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh," tandas Mahfud MD. ♦



NIAT MEREVISI UU ITE BISA MELEGAKAN JUGA

Pada pertengahan Februari lalu, Presiden Joko Widodo melontarkan rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di depan para petinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI pula. Apa implikasinya?

Saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar penerapannya dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," ujarnya dalam acara yang berlangsung pada Senin, 15 Februari 2021.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya. "Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Presiden.

Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa

memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Revisi UU ITE sebetulnya bukan pertama kali ini saja bergulir. Pada 2016, DPR telah merevisi UU tersebut dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, revisi saat itu tidak serta merta mencabut pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet.

Pasal yang dianggap bermasalah antara lain Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kebencian. Dalam Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008, pelanggaran atas tiga pasal di atas terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Revisi UU ITE tahun 2016 rupanya tidak memberikan banyak perubahan terkait ketentuan pidana tersebut. UU Nomor 19 Tahun 2016 hanya menurunkan ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (3) terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun penjara dan/atau Rp 1 miliar menjadi 4 tahun penjara dan/atau Rp 750 juta. Dengan perubahan itu, maka tersangka kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat ditahan selama masa penyidikan karena ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU tersebut juga menyatakan bahwa ketentuan pidana soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Sementara, ancaman pidana bagi pelanggar pasal kesusilaan dan pasal ujaran kebencian tetap paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

Selain mengurangi ancaman hukuman terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di atas, setidaknya ada tiga perubahan signifikan lainnya dalam UU ITE hasil revisi tahun 2016. Perubahan pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan atau “the right to be forgotten”.

Hak tersebut ditambahkan pada Pasal 26. Intinya, tambahan pasal ini mengizinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, tetapi diangkat kembali. Salah satu contohnya, seorang yang sudah terbukti tidak bersalah di pengadilan, berhak mengajukan per-

mintaan agar berita pemberitaan tentang dirinya yang menjadi tersangka dihapus.

Kembali wacana merevisi UU ITE, terlebih datang dari Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat mencabut pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Junarto mengungkapkan ada sembilan bermasalah dalam UU ITE.

“Persoalan utama pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum,” tulis Damar melalui akun Twitter-nya. Pasal-pasal yang dinilai bermasalah itu adalah Pasal 26 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, Pasal



MC Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan partainya mengusulkan revisi Undang-undang ITE beberapa tahun terakhir, tetapi kandas karena kurang dukungan parlemen. Maka, kata dia, PKS menyambut baik dan sangat setuju jika pemerintah hendak mengajukan perubahan.

40 Ayat (2a), Pasal 40 Ayat (2b), dan Pasal 45 Ayat (3).

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnamasari berharap agar pernyataan Jokowi di atas tidak sekadar retorika. Ia mengingatkan, pasal karet yang ada di UU ITE sudah banyak memakan korban.

“Kita harus memastikan bahwa pendapat Presiden Jokowi tentang UU ITE bukan sekedar retorika politik saja. Tapi benar-benar diwujudkan,” tutur Era, Selasa, 16 Februari 2021.

Toh Analisis Politik Exposit Strategy Arif Susanto mensinyalir wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengemuka hanya sebatas alat pencitraan pemerintah. Kecurigaan itu muncul sebab menurut Arif, gagasan revisi UU ITE mencuat di tengah terpaan pelbagai kritik dari dalam negeri

dan internasional. Salah satu yang terbaru, survei The Economist Intelligence Unit (EIU) mendapati indeks demokrasi Indonesia menurun.

Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara dunia. Merosotnya indeks demokrasi tersebut bersamaan dengan bergulirnya pelbagai kritik mengenai kebebasan berpendapat dari publik di dalam negeri. "Kita layak curiga pernyataan Presiden Jokowi mengenai pentingnya revisi UU ITE sebagai alat pencitraan politik, kenapa demikian, karena sebelumnya ada sorotan dunia internasional dan kritik publik yang nyaris menunjukkan bahwa pemerintah tak mampu membuat capaian yang baik," kata Arif dalam diskusi virtual 'Revisi UU ITE: Setelah Korban Berjatuh', Jumat, 19 Februari 2021

Arif pun merinci setidaknya ada dua kritik dari dunia internasional yang mungkin



Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan mendukung revisi Undang-undang ITE. Namun menurut Saleh, inisiatif revisi itu sebaiknya datang dari pemerintah. "Biasanya kalau pemerintah yang mengusulkan birokrasi pelaksanaannya lebih mudah, tidak berbelit," kata Saleh.



jadi pertimbangan Jokowi untuk mencari cara mengamankan citra. Selain laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyatakan indeks demokrasi Indonesia mencatatkan skor terendah dalam 14 tahun terakhir, ada pula angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang juga anjlok ke posisi 102 dari 180 negara. "Kalau kita pertanyakan, apa capaian pemerintah yang sudah bisa dibanggakan dalam 1,5 bulan terakhir, hampir tak ada. Yang ada justru malah kritik-kritik," ucap Arif.

Kemudian, Arif juga curiga bahwa kabar revisi UU ITE ini hanya sebagai bagian dari barter politik. Ia menilai ada kemungkinan revisi UU ITE akan menggeser RUU

lainnya yang telah dipastikan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Kita patut khawatir bahwa rencana revisi UU ITE ini menjadi bagian dari barter politik. Juga mesti diwaspadai, ada kemungkinan seandainya revisi UU ITE ini masuk Prolegnas, bukan tidak mungkin RUU lain yang masuk dalam prolegnas akan didrop," ucap dia.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan telah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiapkan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini. "Yang dilakukan adalah mendapat masukan dulu dengan praktisi hukum dan media. Sehingga saat revisi sudah memenuhi keinginan yang dibutuhkan," kata Jokowi saat bertemu Pimpinan Redaksi Media Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.

Dari sisi lembaga legislatif, mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan mendukung niat Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meski dua partai besar agaknya masih enggan mendukung revisi pada saat ini. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, misalnya, mengakui memang ada dua pasal krusial dan menjadi perdebatan. Yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

Namun ia menilai tak ada pasal karet Undang-undang ITE seperti anggapan berbagai pihak selama ini. "Kedua pasal ini pernah dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review dan hasilnya tak ada masalah," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2020.

Hasanuddin berpendapat yang diperlukan adalah pemahaman penegak hukum terhadap dua pasal itu. Ia mengatakan, Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik bersifat delik aduan sehingga pelapor seharusnya orang yang merasa dirugikan langsung, dan bukan orang lain. Ia juga menyebut pasal tersebut sudah mengacu dan sesuai dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Adapun Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Dalam



penerapannya, kata Hasanuddin, tetap harus dibedakan antara kritik terhadap siapa pun dan ujaran kebencian serta penghinaan. "Kalau dicampuradukkan antara kritik dan ujaran kebencian, maka saya rasa hukum di negara ini sudah tak sehat lagi," kata dia.

Ia mempersilakan jika Undang-undang ITE harus direvisi, misalnya dengan membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal. "Kami di DPR terbuka, bila memang harus direvisi mari bersama kita revisi demi rasa keadilan dan demi tetap utuhnya NKRI," ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi I dari Partai Golkar, Christina Ariyani mengatakan Presiden Jokowi sebenarnya meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal UU ITE yang berpotensi multitafsir. "Apabila dalam level peraturan tersebut (Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri) problem multitafsir maupun saling lapor sudah bisa dieliminir maka revisi Undang-undang ITE belum diperlukan," kata Christina.

Dia bilang, revisi undang-undang bisa dilakukan jika ternyata peraturan Kapolri tersebut tak cukup untuk mengatasi problem multitafsir dan saling lapor bersenjata Undang-undang ITE. "Namun jika ternyata implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan harapan, maka revisi ITE menjadi satu-satunya jalan keluar," kata Christina.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari NasDem, Willy Aditya mengatakan revisi dapat membuat dunia digital Indonesia semakin sehat. Menurut dia, revisi Undang-undang ITE perlu difokuskan pada pasal-pasal karet dan tumpang tindih yang menimbulkan overkriminalisasi.

Politikus NasDem Taufik Basari yang juga anggota Komisi Hukum DPR juga menyatakan setuju Undang-undang ITE direvisi. "Sebaiknya pasal yang potensial menjadi pasal karet dihapus atau dicabut saja," kata dia.

Demikian pula PKB mendukung perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 itu. Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, pelaksanaan Undang-undang ITE melenceng dari tujuan awal untuk mencegah kejahatan transaksi elektronik. "Pasal karet yang ada di UU ITE sejatinya juga hasil revisi, namun masih parsial, multitafsir, dan mudah melenceng dari tujuan Undang-undang ITE," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Fraksi Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE. Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat, Irwan, mengatakan revisi UU

ITE sebenarnya telah masuk dalam long-list Program Legislasi Nasional 2020-2024. "Kalau memang dianggap prioritas oleh Presiden Jokowi kemungkinan masing-masing fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas prioritas 2021," kata Irwan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan partainya mengusulkan revisi Undang-undang ITE beberapa tahun terakhir, tetapi kandas karena kurang dukungan parlemen. Maka, kata dia, PKS menyambut baik dan sangat setuju jika pemerintah hendak mengajukan perubahan. "Jangan sampai revisi Undang-undang ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka," kata Sukamta.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan mendukung revisi Undang-undang ITE.



MC

Hasanuddin berpendapat yang diperlukan adalah pemahaman penegak hukum terhadap dua pasal itu. Ia mengatakan, Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik bersifat delik aduan sehingga pelapor seharusnya orang yang merasa dirugikan langsung, dan bukan orang lain. Ia juga menyebutkan pasal tersebut sudah mengacu dan sesuai dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun menurut Saleh, inisiatif revisi itu sebaiknya datang dari pemerintah. "Biasanya kalau pemerintah yang mengusulkan birokrasi pelaksanaannya lebih mudah, tidak berbelit," kata Saleh.

Selain itu Anggota Komisi I DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha juga setuju dengan rencana revisi UU ITE. Ia mengatakan hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ihwal bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi. "Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik," kata Tamliha. ♦



PENTAS MOELDOKO DI PELATARAN ISTANA

Bagaikan pentas drama, panggung politik nasional kini menampilkan Jenderal (Pur) Moeldoko sebagai figur yang sedang mendapat banyak sorotan tata cahaya. Lakonnya tentu saja dinamika politik domestik Indonesia.

Juga bagaikan pentas drama, khalayak sebagai penonton bisa saja banyak yang akan bertanya-tanya di mana muara alur cerita dengan melihat adegan-adegan berikutnya. Adegan awalnya sudah terekam beberapa waktu sebelumnya ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya.

"Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan

kapnya.

Maka sejak itulah nama Moeldoko yang menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mulai menampilkan adegan-adegan drama politik upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Moeldoko sempat menyampaikan tanggapan dan membantah bahwa dirinya ingin mengambil alih atau kudeta AHY selaku Ketum Partai Demokrat.

Sikap resmi Presiden Joko Widodo terhadap surat AHY juga sudah jelas. Presiden menegaskan tak akan menanggapi surat itu dengan alasan substansi masalah dalam surat itu merupakan persoalan internal Partai Demokrat. "Kami rasa kami tidak

Demokrat. Ketika turun dari mobil, Moeldoko dipakaikan jas dari Partai Demokrat berwarna biru dengan lambang bintang tiga mercy itu.

Sebelumnya, pimpinan sidang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Jhonny Allen Marbun mengatakan Moeldoko bakal tiba pada Jumat, 5 Maret 2021 petang. Namun jadwal itu mundur. Toh akhirnya tanpa kehadiran Moeldoko, para peserta sidang memilihnya sebagai Ketua Partai Demokrat usai dilakukan voting berdiri di KLB tersebut.

"Dengan demikian, secara resmi bahwa Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," ucap



konfirmasi dan klarifikasi dari beliau" kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin, 1 Februari 2021.

Berdasarkan penelusuran Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkaran istana yang mencoba mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat. "Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah. "Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo," ung-

perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Kamis, 4 Februari 2021.

Dinamika pentas terus berlangsung. Sebulan setelah Presiden Joko Widodo mengambil putusan tak akan membalas surat AHY, Jumat, 5 Maret 2021, sebuah acara di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tiba di lokasi sekitar pukul 21.40 WIB, Moeldoko langsung mendapat sorak gembira dari para peserta yang menyebut acara ini sebagai Kongres Luar Biasa Partai

Jhoni. Usai terpilihnya Moeldoko, pimpinan sidang KLB langsung memilih Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Jadi, Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung. Setelah diputuskan, panitia KLB menelepon Moeldoko.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat Bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun menyampaikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya. "Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai. Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata “sesuai” oleh peserta KLB.

Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum. Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata ‘serius’ secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan. Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

ia punya, duit cukup dari taipan, kualifikasi militer Moeldoko punya, popularitas sedang tinggi-tingginya, watak cocok, berani walau sering tak akurat. Punya ribuan buzzerRp yang dibiayai APBN. Komplet. Capres sudah di tangan,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, peta pencapresan otomatis berubah dengan hadirnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Sebab tujuan utama Moeldoko, untuk menjadi presiden bukan sekadar menjadi Ketum Parpol. “Tinggal garis tangannya Moeldoko yang akan menentukan qudrat dan iradatnya ke depan,” kata dia.

Yang menarik, kata Djoko Edhi, modus pencaplokannya. “Sama sekali baru. Lang-

mua pentolan Demokrat disedotnya, dan Demokrat kembali ke energi awalnya. Apakah AHY mampu bertahan?

Dari sisi AHY, sebenarnya sudah ada upaya mencegah KLB Sibolangit itu. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya sudah meminta pemerintah perlu turun tangan terkait digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang dilakukan oleh Jhoni Allen Marbun cs.

Menurut Herzaky, Partai Demokrat sudah mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly,



“Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat,” tandasnya melalui sambungan telepon.

Nah, bagaimana dengan reaksi penon-ton? Di mata politisi senior Djoko Edhi Abdurrahman, cara Moeldoko berpolitik ini memang luar biasa. “Ini pola baru cara mencaplok Parpol yang patut dicontoh. Canggih Moeldoko. Sisanya akan diberes-in oleh Menkumham sebagaimana mestinya,” ungkap Djoko Edhi dalam pernyataan yang viral di media sosial.

Menurut Djoko Edhi, Moeldoko pasti sukses mencaplok Demokrat. “Kekuasaan

sung head to head. Itu bukan lagi akuisisi. Cara Moeldoko itu, sangat efisien. Pertama, Demokrat sudah lulus parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara untuk mengikuti pemilihan umum), padahal jika membuat parpol baru, untuk lolos verifikasi faktual saja, setengah mati. Sangat mahal,” ungkap politisi yang pernah menjadi anggota DPR ini.

Kedua, sambunnya, Moeldoko sangat cerdas, punya sense of crisis. “Saya kira kalau ia jadi presiden, niscaya unggulan,” ujarnya

Ketiga, tambahanya, semua hambatan membuat parpol itu diterabas oleh Moeldoko dengan mudah. “Sebentar lagi, se-

serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Itu dilakukan supaya KLB tersebut bisa dihentikan.

“Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah. Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Herzaky, Jumat, 5 Maret 2021.

Namun, jelas sudah bawa kini ada

dua orang berbeda yang masing-masing mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Intelektual politik Denny Januar Ali melihatnya sebagai realpolitik.

KLB ini terjadi, kata Denny JA, tanpa dibubarkan polisi, Moeldoko berpartisipasi dalam KLB tanpa dilarang presiden. Dua hal itu, kata dia, menambah komplikasi persoalan. "Kita pun teringat dengan istilah Realpolitik. Istilah ini diciptakan oleh Ludwig von Rochau, pada 1853: Pemenang pertarungan politik acap kali ditentukan oleh Realpolitik. Bukan moral atau etika yang utama, tapi hukum pragmatisme politik yang bekerja," ujarnya.

Denny menyebutkan, selanjutnya re-

akukan ini kepada pihaknya.

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara ini, banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat, 5 Maret 2021.

SBY menilai KSP Moeldoko justru hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). SBY pun meminta maaf karena pernah menunjuk Moeldoko sebagai panglima TNI ketika dirinya menjabat sebagai presiden Republik

para kader di seluruh Indonesia tetap mengedepankan cara-cara yang elok untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Semua kader diminta untuk merapatkan barisan di bawah kepemimpinan AHY.

"Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang untuk mendapatkan keadilan," ujar SBY.

Meski begitu, ia mengaku tetap yakin dengan Presiden Joko Widodo memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.



alpolitik dualisme Ketua Umum Partai Demokrat akan berakhir dengan kemenangan figur yang menguasai tiga faktor real politik: Yang menguasai opini publik, yang paling bisa membujuk ketua wilayah dan cabang setelah KLB, dan yang paling mampu meyakinkan pemegang lisensi "keabsahan partai politik," yakni penguasa yang riil itu sendiri.

Sedangkan patron utama Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Ia juga menyatakan Moeldoko dan pelaku kudeta benar-benar tega mel-

Indonesia.

"Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Ia mengatakan, gerakan kudeta tersebut belum usai setelah KLB menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat ilegal. Geram, kesal, tak terima, hingga merasa disewenang-nikah pihak yang berkuasa dinilai SBY pasti dirasakan oleh seluruh kader partai berlambang bintang mercy itu.

Namun, ia tetap mengingatkan agar

Pemerintah dan negara juga tetap dipercaya SBY akan bertindak adil terhadap permasalahan ini.

"Serta akan menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Partai Politik maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat," ujar Presiden keenam Republik Indonesia itu.

Pentas politik masih akan berlanjut. Kisahnya mungkin pernah terjadi pula dengan partai-partai lain. Namun, dengan adegan-adegan yang diperankan Moeldoko, AHY, dan SBY itu, siapa tahu ada versi baru. ♦



KETIKA MIRAS MASUK KE RANAH EKONOMI POLITIK

Kajian mengenai minuman beralkohol (minol), termasuk jenis yang keras (*hard liquor*) atau miras di Indonesia memang tergolong langka. Harap maklum, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia memang ganti masih relatif rendah sehingga kajian semacam itu boleh jadi belum begitu mendesak. Namun minol dan miras sudah telanjur masuk ke ranah politik.

Empat tahun lalu, tepatnya pada Maret 2016, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menerbitkan sebuah kajian yang ditulis oleh Rudi Uddarojat. Kajian itu memang terkait dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan melarang produksi, distribusi dan konsumsi minuman dengan kandungan 1-55 persen kadar alkohol.

Dalam laporan CIPS itu terungkap, hanya sekitar 500.000 orang dari 270 juta penduduk Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol. Sebagian besar merupakan jenis minuman keras (*hard liquor*).

Pada sisi regulasi, Pemerintah Indone-

sia telah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol, termasuk ketentuan cukai yang mendorong harga penjualan sehingga pembelinya pun kian terbatas.

Pembatasan investasi asing juga telah meningkatkan harga minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi. Bir dan anggur fermentasi (*wine*) sulit diakses karena adanya larangan penjualan di toko-toko kecil dan minimarket. Sejumlah pemerintahan daerah pun telah menerapkan larangan penjualan minuman beralkohol dalam yurisdiksi (wilayah hukum) masing-masing melalui peraturan daerah (Perda).

Namun, kajian CIPS mencatat, akibat

mahal dan sulitnya mendapatkan minuman beralkohol, masyarakat Indonesia mengonsumsi jenis minuman beralkohol yang tidak tercatat (*unrecorded alcohol*) lima kali lebih banyak dari minuman beralkohol yang diperjualbelikan secara legal. Alih-alih mengandung alkohol jenis *ethanol* yang resmi, minuman beralkohol tidak tercatat seringkali mengandung kadar metanol yang sangat beracun dan menyebabkan kejang-kejang, kegagalan organ, dan kematian.

Banyaknya kasus minuman beralkohol palsu dan oplosan yang dilaporkan dari seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan penjualan minuman beralkohol menyebabkan peningkatan

permintaan terhadap minuman beralkohol palsu dan oplosan sebagai substitusi minuman beralkohol legal yang sulit dijangkau.

Riset CIPS membuktikan bahwa masih banyak data yang perlu dikumpulkan dan dianalisis sebelum menentukan kebijakan terkait produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Data yang tersedia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tingkat konsumsi minuman beralkohol yang diperjualbelikan secara legal.

Namun, CIPS menekankan, Pemerintah sepatutnya lebih fokus pada upaya mengurangi produksi, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol palsu dan oplosan di Indonesia. CIPS juga menilai, rencana pelarangan atas minuman beralkohol legal berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Pelarangan akan mendorong distribusi minuman beralkohol melalui pasar gelap yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap keamanan publik.

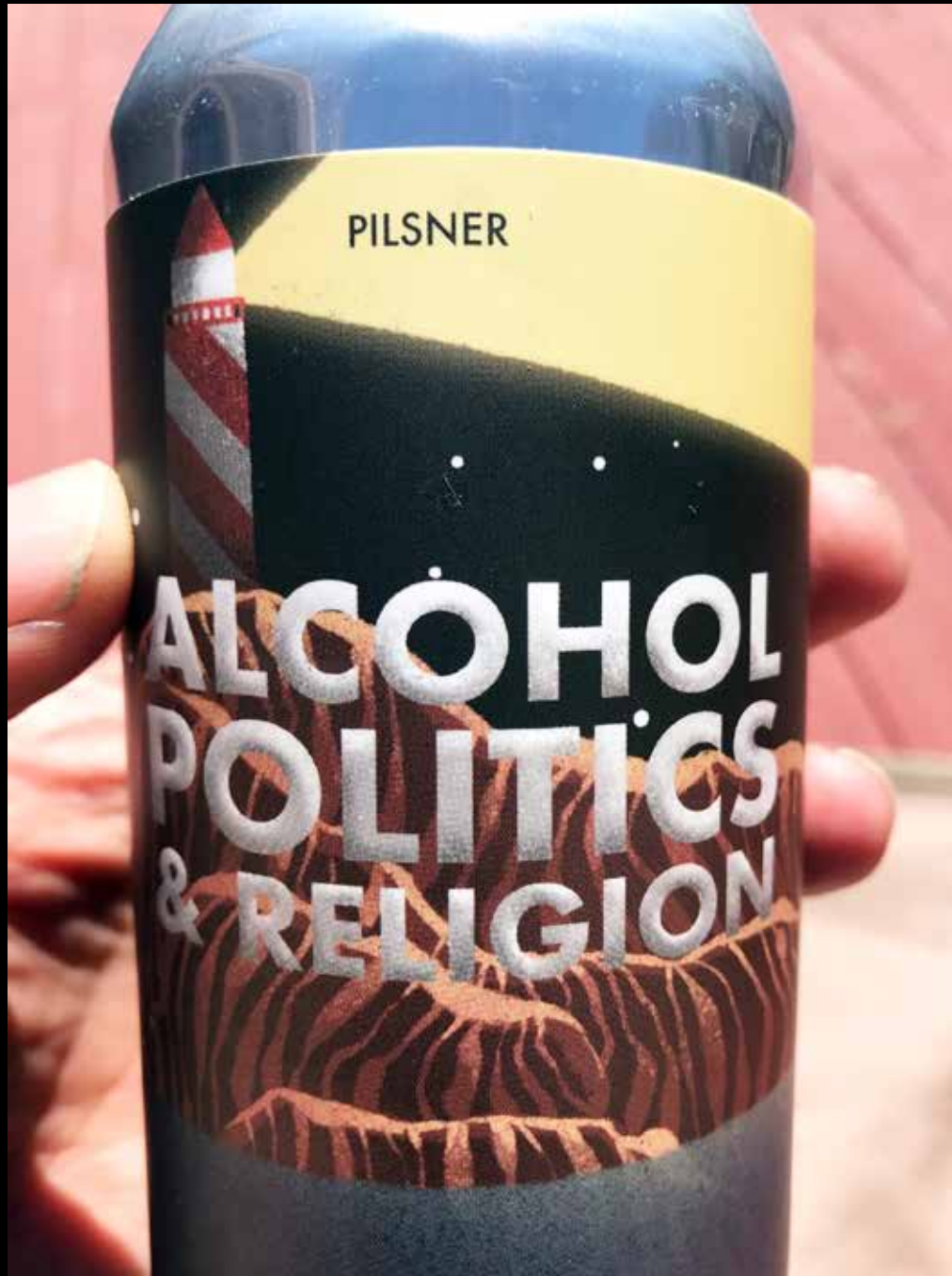
Pada sisi lain, kajian akademis terkait pembentukan RUU Larangan Minuman Keras mendasarkan gagasan pelarangan itu pada hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Kajian akademis Badan Legislasi DPR juga menyebutkan, secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, dan paranoid. Secara sosial pun, orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat.

Namun di sisi lain, di beberapa daerah tertentu di Indonesia, sebagian masyarakat dengan beragam budaya dan adat istiadatnya mengonsumsi minuman beralko-

hol adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Minuman beralkohol ini yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai minuman tradisional seringkali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam adat budaya, kebiasaan turun temurun, atau bahkan menjadi minuman utama

Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan yang bervariasi kebijakannya. Ada Perda yang secara tegas melarang beredarnya minuman beralkohol di wilayahnya, ada juga Perda yang sifatnya hanya mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dan lain sebagainya



untuk menjaga stamina.

Demikian juga di sebagian wilayah lain di Indonesia, minuman beralkohol tradisional ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata bagi wisatawan di kawasan pariwisata. Keberagaman sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadikan dasar bagi beberapa Pemerintahan

tergantung situasi dan kondisi wilayah serta karakteristik masyarakatnya.

Nah, yang terjadi kemudian, terbit Perpres izin investasi minuman beralkohol sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun kemudian Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres itu, kontroversi masih berlanjut. Memang belum tuntas. ♦



MENYIMAK KAJIAN AKADEMIS LARANGAN MINOL

Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol sudah bergaung sejak Presiden Joko Widodo belum menjabat. Malah kajian akademisnya sudah tersusun pada Juni 2014. Seperti apa isi kajian itu?

Dalam Kajian akademis terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol pengumpulan data untuk penyusunan naskah akademik dan draft RUU tentang pengaturan dan larangan berlangsung di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Pada setiap provinsi berlangsung pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM), produsen minuman beralkohol, distributor/sub distributor minuman beralkohol, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Beberapa hal penting yang menjadi target pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi dan masukan, memperdalam permasalahan yang terjadi selama ini, serta terkait dengan implementasi kebijakan. Alhasil, kajian ini menemukan di Provinsi Sumatera Utara terdapat sembilan produsen minuman beralkohol.

Menurut PHRI Sumut, usaha penjualan minuman beralkohol tidak terlalu berpengaruh bagi hotel dan restoran. Alasannya, persentase penjualan minuman beralkohol di hotel dan restoran sangatlah kecil dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

Temuan lain di Sumatera Utara, minuman beralkohol tradisional di Sumatera Utara dikenal dengan nama tuak. Tuak merupakan hasil fermentasi dari pohon aren yang kemudian dicampur dengan kayu lura. Di Medan, masyarakat bebas memproduksi dan mengkonsumsi tuak dalam jumlah yang tak terbatas, dan dalam kawasan manapun, termasuk kadar alkoholnya.

Sedangkan di Bali, keberadaan minuman beralkohol sudah menjadi bagian

penting dari pariwisata Bali. Penjualan food and beverage di Bali mencapai Rp7 triliun rupiah per tahun dan 30 antaranya berasal dari penjualan minuman beralkohol. Produk minuman beralkohol yang dijual merupakan produksi lokal (antara lain wine Bali, arak Bali, brem Bali) dan produksi impor. Di Provinsi Bali terdapat 21 produsen, dua importir, dan 10 distributor minuman beralkohol.

Kemudian di Sulawesi Utara, pada umumnya masyarakat kota Manado lebih suka tidak ada minuman beralkohol karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak ada kebiasaan atau tidak ada acara adat untuk minum-minuman beralkohol. Di Sulawesi Utara terdapat 11 perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol.

"Cap tikus" yang populer di Sulawesi Utara merupakan istilah dari bahan dasar minuman beralkohol yang terbuat dari nira yang mempunyai kadar alkohol dari 30-80 persen. Alkohol cap tikus ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman beralkohol dari berbagai merek di Sulawesi Utara.

Bahan baku alkohol cap tikus tidak dalam bentuk kemasan tetapi dimasukkan dalam drum/gallon yang diperkirakan isinya sampai 80 liter dan tidak ada label maupun merek dagang. Artinya langsung dikirim dari petani (produsen).

Petani bahan baku "Cap Tikus", jumlahnya ribuan. Bahan baku Cap Tikus yang berasal dari petani dijual kepada pengepul lalu para pengepul menjual kepada pabrik. Namun ada juga petani yang menjual langsung ke produsen.

Dari cap tikus ini, produsen minuman beralkohol tradisional/lokal mengolahnya menjadi minuman beralkohol lokal yang sudah dikemas dan diberi pita cukai lalu dijual melalui distributor. Contoh prosesnya: Perusahaan PD Champion membeli bahan baku cap tikus untuk kemudian diolah menjadi produk PD Champion.

Jadi, kajian akademis ini pun mengakui, Indonesia merupakan salah satu penghasil minuman beralkohol dengan jenis-jenis minuman tradisionalnya seperti Arak, Ciu, Tuak, hingga Cap Tikus. Bahan bakunya pun beragam, mulai dari beras, singkong, aren/enau, siwalan/lontar, hingga beragam jenis buah. Fermentasi karbohidrat menjadi unsur utama dalam pembuatan minuman beralkohol nusantara.

Antara lain berdasarkan temuan-temuan di beberapa daerah tadi, kajian akademis RUU Larangan Minol bertujuan melarang minuman beralkohol di seluruh wilayah Indonesia. Sekalipun demikian,

dengan pertimbangan kebutuhan terbatas, minuman beralkohol masih diperbolehkan.

Selain pelarangan dan pembolean secara terbatas, RUU ini mengatur mengenai pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam efektivitas pelaksanaan pengawasan pelarangan di masyarakat.

Kajian akademis RUU Larangan Minol juga menyebutkan, regulasi ini ingin memberikan kepastian hukum secara lebih



MC Petani bahan baku "Cap Tikus", jumlahnya ribuan. Bahan baku Cap Tikus yang berasal dari petani dijual kepada pengepul lalu para pengepul menjual kepada pabrik. Namun ada juga petani yang menjual langsung ke produsen.

baik, karena isinya menyangkut ketegasan penekanan pada larangan minuman beralkohol, pengawasan, dan penerapan sanksi secara memadai, sehingga terwujud lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera, bebas dari pengaruh minuman beralkohol.

Dalam pada itu, kajian akademis ini juga menyebutkan pengertian minuman beralkohol adalah yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan

lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Pada naskah kajian akademis juga terungkap RUU ini mendasarkan pembentukannya pada asas perlindungan, kepastian hukum, keberlanjutan, dan keterpaduan. Sedangkan tujuan RUU ini adalah: a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Kajian akademis ini menyebutkan, konsumsi minuman beralkohol kini seperti menjadi bagian gaya hidup dari sebagian

MC *Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang disekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut.*



masyarakat Indonesia. Berawal dari sekadar coba-coba, banyak yang kemudian akhirnya ketagihan dengan jenis minuman yang satu ini. Minuman beralkohol memiliki kadar yang berbeda-beda. Misalnya, bir dan soda alkohol (1-7 persen alkohol), anggur (10-15 persen alkohol), dan minuman keras atau biasa disebut dengan spirit (35-55 persen alkohol). Sedangkan konsentrasi alkohol dalam darah dicapai dalam 30-90 menit setelah diminum.

Selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol berlebih yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata, dan itu pun dapat hilang dengan sendi-

rinya. Tapi ternyata efek negatifnya tidak berhenti sampai di situ saja. Bukan hanya menyebabkan mabuk, alkohol juga memiliki dampak negatif lain bagi tubuh seperti merusak sistem metabolisme tubuh manusia yang kemudian menimbulkan ketagihan dan merusak sebagian unsur otak.

Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang disekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut.

Dalam jangka pendek alkohol bisa memberikan efek relaksasi, tapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40 persen peminum berat menunjukkan tanda-

tanda depresi. Semakin sering seseorang minum alkohol, maka semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pekerjaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran.

Mengonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Orang mabuk cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mu-

dah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bisa memicu keributan.

Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan masal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.

Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol). Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.

Tempat penjualan minuman beralkohol cukup mudah terjangkau termasuk oleh anak remaja yang belum dewasa seperti di minimarket atau swalayan, sehingga banyak anak remaja di bawah 21 tahun yang membeli minuman beralkohol tanpa memperdulikan lagi dampaknya bagi kesehatan melainkan untuk pergaulan. Hal ini diperlukan pengaturan yang lebih lanjut terutama agar pihak yang menjual minuman beralkohol tidak pada tempatnya atau kepada orang yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi yang lebih tepat sehingga menimbulkan efek jera.

Kajian akademis RUU Minol juga mengklasifikasikan beberapa golongan minol. Pertama, golongan A adalah dengan kadar etanol (C_2H_5OH) kisaran 1-5 persen. Kedua, golongan B dengan kadar etanol kisaran 5-20 persen. Ketiga, golongan C dengan kadar etanol kisaran 20-55 persen. Keempat, minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun; dan kelima, minuman beralkohol campuran atau racikan. Dari sisi pelarangan, cakupannya meliputi produksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual, serta mengonsumsinya. Pemerintah pusat dan daerah mendapat wewenang pengawasan.

Pengawasan Minuman Beralkohol di-

laksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya terdiri dari unsur: kementerian/dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, pengawasan obat dan makanan, keamanan dan ketertiban, Kepolisian, Kejaksaan, dan perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.

Kajian akademis RUU Minol juga membahas peran serta masyarakat secara aktif antara lain dengan berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peran serta masyarakat dilakukan dalam hal pengawasan minol dengan cara memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsinya. Pelaporan tersebut dapat dilakukan se-



MC Selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol berlebihan yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata, dan itu pun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatifnya tidak berhenti sampai di situ saja. Bukan hanya menyebabkan mabuk, alkohol juga memiliki dampak negatif lain bagi tubuh seperti merusak sistem metabolisme tubuh manusia yang kemudian menimbulkan ketagihan dan merusak sebagian unsur otak.

cara individu maupun oleh kelompok masyarakat.

Tentu saja, RUU Minol akan memuat sanksi untuk perorangan maupun korporasi yang melanggar larangannya. Untuk pelanggaran terhadap larangan produksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minol, ancaman pidananya penjara antara 2-10 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar. Sedangkan, pidana bagi yang mengkonsumsi minol, ancaman penjaranya antara tiga bulan hingga dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta. Malah jika konsumsi minol itu menyebabkan gangguan ketertiban umum atau mengancam keamanan orang, ancaman pidananya naik menjadi antara 1-5 tahun atau denda maksimal Rp100 juta. ♦

TETAP PERLU HATI-HATI MELARANG MINOL

Larangan minuman beralkohol dengan pengecualian tertentu akan memiliki implikasi serius. Ini adalah poin penting hasil kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

Salah satu kritik terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah rencana mengecualikan larangan di lokasi-lokasi wisata, hotel, dan restoran mewah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak merugikan RUU ini terhadap industri pariwisata.

Akan tetapi, menurut kajian CIPS, pada saat yang sama, pengecualian ini justru memberikan peluang bagi masyarakat kelas atas Indonesia untuk tetap mengonsumsi minuman beralkohol secara legal sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki pilihan lain karena mereka tidak mampu membeli minuman beralkohol dari hotel dan restoran mewah. Mereka akan terpaksa beralih ke minuman beralkohol palsu dan oplosan.

Secara umum, kajian CIPS mengungkapkan, tingkat konsumsi minuman be-

MC Selain itu, menurut WHO, masyarakat Indonesia cenderung rentan terhadap gaya minum episodik secara berlebihan (*Heavy Episodic Drinking*). Ini artinya, lebih dari 30 persen masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja melakukan hal tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat.

ralkohol di Indonesia tampak rendah apabila dibandingkan dengan konsumsi jenis minuman lain dan konsumsi minuman beralkohol di negara-negara lain. Survei Kementerian Kesehatan pada 2014 menemukan bahwa hanya ada sekitar 500.000 penduduk Indonesia, atau sekitar 0,2 persen dari keseluruhan populasi Indonesia, yang mengonsumsi minuman beralkohol.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia relatif lebih rendah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan jumlah konsumsi per kapita minuman beralkohol di Indonesia adalah sebesar 0,1 liter yang berasal dari minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan secara legal. Tingkat konsumsi ini jauh lebih rendah dari Thailand, Filipina, Vietnam atau Malaysia.

Selain itu, menurut WHO, masyarakat Indonesia cenderung rentan terhadap gaya minum episodik secara berlebihan (*Heavy Episodic Drinking*). Ini artinya, lebih dari 30 persen masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol sen-



gaja melakukan hal tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat.

Jadi, masyarakat Indonesia memang hanya mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah rendah, namun mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja mengonsumsi dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Meskipun begitu, hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sebagian besar minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan minuman yang termasuk dalam kategori C minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi, yaitu sebesar 20-55 persen. Hal ini didukung oleh survei rumah tangga Badan Pusat Statistik (BPS) yang menemukan bahwa konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi berjumlah lima kali lebih banyak dari konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol rendah seperti bir dan anggur fermentasi.

Kajian CIPS mencatat BPS dan WHO menerapkan metodologi penelitian yang berbeda dan sampai pada perkiraan konsumsi total minuman beralkohol yang berbeda pula. BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) per empat bulan dan melaporkan bahwa pada periode 2012-2014 konsumsi minuman beralkohol di Indonesia mencapai rata-rata 5.56 ml per minggu. Angka ini mencakup konsumsi minuman beralkohol baik yang legal maupun ilegal.

Di sisi lain, WHO mengumpulkan data melalui badan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO), dan melalui perusahaan riset pasar seperti Canadean dan IWSR. Alhasil WHO melaporkan bahwa konsumsi tahunan pada 2014 mencapai 0.6 liter, atau yang setara dengan 11.6 ml/minggu. Perkiraan WHO ini terdiri dari konsumsi minuman beralkohol legal sebanyak 0.1 liter dan minuman beralkohol ilegal sebanyak 0.5 liter. Konsumsi minuman beralkohol ilegal termasuk melalui pembelian lintas perbatasan, konsumsi minuman pengganti, minuman beralkohol produksi rumahan baik yang legal maupun ilegal, penyelundupan dan sebagainya.

Kajian CIPS mengutip perkiraan WHO bahwa Indonesia mengonsumsi lima kali lebih banyak minuman beralkohol tidak tercatat dari minuman beralkohol yang dibeli secara legal di vendor yang memiliki lisensi penjualan. Antara 2008-2010, konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat (unrecorded alcohol consumption) di Indonesia mencapai 0.5 liter per kapita sementara konsumsi minuman beralkohol

MC *Kajian CIPS mencatat BPS dan WHO menerapkan metodologi penelitian yang berbeda dan sampai pada perkiraan konsumsi total minuman beralkohol yang berbeda pula. BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) per empat bulan dan melaporkan bahwa pada periode 2012-2014 konsumsi minuman beralkohol di Indonesia mencapai rata-rata 5.56 ml per minggu. Angka ini mencakup konsumsi minuman beralkohol baik yang legal maupun ilegal.*

yang diperdagangkan secara legal tetap di titik 0.1 liter per kapita.

Sangat sulit untuk memastikan jenis minuman beralkohol dalam kategori yang tidak tercatat tanpa adanya data yang mencukupi. Beberapa merek asing berhasil diselundupkan ke Indonesia, ada pula minuman tradisional dan "jamu" yang diproduksi dalam negeri oleh kelompok etnis Indonesia, dan ada juga minuman oplosan yang dijual oleh pedagang kaki lima.

Minuman beralkohol tidak tercatat, bila mengandung metanol yang merupakan etil alkohol yang diproduksi untuk tujuan industri, menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat. Metanol memiliki bau yang sama dengan etanol yang merupakan etil alkohol yang digunakan untuk minuman beralkohol. Akan tetapi, metanol sangat beracun dan dapat menyebabkan kejang-kejang, kegagalan organ dan kematian.

Metanol dapat ditemukan dalam alko-



hol palsu dan oplosan apabila penyuling menggantikan etanol dengan metanol yang lebih murah untuk menghemat biaya produksi dan meningkatkan daya memabukkan minuman tersebut. Cairan tersebut dituangkan ke dalam botol minuman beralkohol bermerek ternama dan dijual sebagai minuman beralkohol impor. Minuman beralkohol palsu semacam ini sering dikonsumsi oleh wisatawan asing di Bali dan Lombok yangseringkali tidak menyadari zat-zat berbahaya yang terkandung dalam minuman mereka.

Kajian CIPS juga melihat Indonesia cenderung menekan risiko konsumsi minuman beralkohol dengan peraturan yang beragam, mulai dari menaikkan harga jual melalui pajak bea dan cukai hingga melarang penjualan minuman beralkohol di toko-toko kecil. Beberapa daerah juga telah menerapkan rezim pelarangan minuman beralkohol. Setidaknya, ada empat kebijakan penting menyangkut minol dalam kajian CIPS.

Pertama, Pemerintah telah menerapkan pajak bea cukai yang tinggi terhadap minuman beralkohol.

Pada 2015, pemerintah menaikkan tarif impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150

persen dari nilai barang yang diimpor. Cukai minuman beralkohol juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya, pada 2010, cukai terhadap minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri dinaikkan hingga 380 persen untuk kategori A, 500 persen untuk kategori B, dan 188 persen untuk kategori C. Pada 2014, angka ini kembali mengalami peningkatan sebesar 11,6 persen untuk semua kategori.

Walaupun untuk konsumsi minuman beralkohol impor tidak mengalami kenaikan sebesar minuman beralkohol domestik, cukai minuman beralkohol impor tetap lebih tinggi dari minuman beralkohol domestik. Cukai minuman beralkohol domestik dalam kategori A meningkat dari Rp2.500,- (2010) ke Rp11.000,- (2010) dan Rp13.000,- (2014) per liter.

Kebijakan penting kedua, Pemerin-



Salah satu implikasinya, peredaran minuman beralkohol produksi rumahan di Depok pada Desember 2015 merenggut lima jiwa warga. Setelah polisi menggerebek toko yang menjual minuman beralkohol mematikan di Depok tersebut, mereka menemukan beberapa zat beracun. Secara umum, minuman beralkohol ilegal mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menggantikan etanol, yang merupakan komponen utama dalam minuman beralkohol legal, termasuk metanol, racun anti serangga, pemanis dan lain sebagainya.



tah Indonesia secara berkala memperbarui daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal asing atau terbuka dengan persyaratan tertentu (Daftar Negatif Investasi/DNI). DNI sejak bulan April tahun 2014 melarang adanya investasi asing langsung dalam perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di Indonesia. Kebijakan inilah yang kemudian dicabut melalui Perpres No 10 Tahun 2021 dan sempat memicu kontroversi hingga akhirnya Lampiran III yang memuat pembukaan izin investasi minuman beralkohol di Perpres itu dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

Sedangkan kebijakan penting ketiga terkait minol adalah larangan yang berlaku untuk penjualan minuman beralkohol di minimarket. Walaupun data menunjukkan tingkat konsumsi minuman beralkohol kategori A yang sangat rendah, sejak 2015 Kementerian Perdagangan melarang penjualan bir pada 16.000 minimarket dan 55.000 toko kecil lainnya. Larangan parsial ini bertujuan untuk mencegah konsumsi minuman beralkohol oleh anak di bawah umur dan membuat minuman beralkohol yang diproduksi secara legal lebih sulit diakses oleh masyarakat. Perusahaan bir domestik telah melaporkan penurunan jumlah penjualan secara signifikan dari minuman beralkohol legal yang mereka produksi.

Keempat, sejumlah pemerintahan daerah telah menerapkan pelarangan minuman beralkohol dalam yurisdiksi mereka. Sejak awal era demokrasi dan desentralisasi pada 1998, banyak daerah di Indonesia mulai menerapkan Perda yang melarang minuman beralkohol. Kota Depok yang memiliki populasi sekitar 1.8 juta jiwa, terletak di provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Jakarta Selatan, merupakan salah satu daerah yang melarang minuman beralkohol.

Salah satu implikasinya, peredaran minuman beralkohol produksi rumahan di Depok pada Desember 2015 merenggut lima jiwa warga. Setelah polisi menggerebek toko yang menjual minuman beralkohol mematikan di Depok tersebut, mereka menemukan beberapa zat beracun. Secara umum, minuman beralkohol ilegal mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menggantikan etanol, yang merupakan komponen utama dalam minuman beralkohol legal, termasuk metanol, racun anti serangga, pemanis dan lain sebagainya.

Korban jiwa di Depok merupakan salah satu contoh dari ratusan masyarakat In-

donesia yang meninggal setiap tahunnya akibat dari minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal. Produsen dan penjual berskala kecil membuat minuman beralkohol jenis ini tersedia di seluruh pelosok Indonesia. Dengan menggunakan bahan kimia yang lebih murah dari etanol, mereka telah menyebabkan risiko kematian bagi para konsumennya.

Sayangnya, tulis laporan yang disusun oleh Rofi Uddarojat ini, belum ada data statistik jelas yang dapat mengukur besarnya permasalahan konsumsi minuman beralkohol. Pihak kepolisian pun tidak dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak jumlah kasus kematian, kekerasan, dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat terpengaruh minuman beralkohol.

Tidak ada data statistik yang menunjukkan bahwa konsumsi alkohol merupakan perhatian serius bagi penyedia layanan kesehatan. Sebaliknya, dengan mengamati angka-angka yang dihadirkan melalui data WHO, tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih rendah dan hal ini menyebabkan timbulnya keraguan mengenai besarnya masalah ini.

Apabila pemerintah masih ingin menyelesaikan masalah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, CIPS mengemukakan kebijakan berdasarkan bukti (evidence-based policy) dan tepat sasaran tidak mungkin diformulasikan tanpa estimasi permasalahan yang baik. Niat baik saja tidak akan menghadirkan hasil yang baik, terutama saat niat ini justru membuat konsumen minuman beralkohol Indonesia beralih ke jenis minuman yang jauh lebih berbahaya dan berpotensi menyebabkan cedera dan kematian yang serius. Jumlah minuman beralkohol palsu yang disita di Jakarta tampak mengindikasikan bahwa kecenderungan tersebut memang terbukti.

Saat konsumen minuman beralkohol di Indonesia mengonsumsi minuman tidak tercatat lima kali lebih banyak dari minuman beralkohol legal, pemerintah sepatutnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tingkat konsumsi minuman beralkohol legal. Sebaliknya, CIPS merekomendasikan pemerintah lebih menekankan upaya mengurangi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol palsu dan oplosan.

Dengan sejarah konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat yang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan minuman beralkohol tercatat, dapat diasumsikan bahwa konsumen minuman beralkohol tidak tercatat akan tetap mengonsumsi dan

bahkan meningkatkan jumlah konsumsi minuman beralkohol mereka apabila pemerintah menerapkan larangan terhadap semua minuman beralkohol legal. Larangan tersebut akan menciptakan peluang bagi sindikat kriminal untuk mendistribusikan minuman beralkohol terlarang melalui sistem distribusi pasar gelap.

Kejadian yang sama pun terjadi di Amerika Serikat saat minuman beralkohol dilarang pada tahun 1920 hingga 1933. Pelarangan ini justru menyebabkan meningkatnya minuman beralkohol palsu yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan mematikan.



MC Saat konsumen minuman beralkohol di Indonesia mengonsumsi minuman tidak tercatat lima kali lebih banyak dari minuman beralkohol legal, pemerintah sepatutnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tingkat konsumsi minuman beralkohol legal. Sebaliknya, CIPS merekomendasikan pemerintah lebih menekankan upaya mengurangi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol palsu dan oplosan.

CIPS membandingkan, pelarangan narkoba secara umum mengikuti "Iron Law of Prohibition" yang diformulasikan oleh Richard Cowan: "the harder the enforcement, the harder the drugs" (semakin keras penegakan, semakin keras narkoba). Saat narkoba dilarang, potensi dari peredaran narkoba tersebut justru meningkat. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang kemudian beralih ke narkoba yang dosisnya lebih kecil namun dengan efek yang jauh lebih kuat untuk mengurangi risiko tertangkap tangan membawa narkoba dan terkena hukuman.

Penjual minol ilegal juga mengakui kecenderungan ini. Minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi tidak memerlukan botol besar, lebih ringan, dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Jadi, melarang minol memang tetap harus hati-hati. ♦

OPLOSAN MEMANG PERLU PERHATIAN

Sejauh ini yang paling berbahaya di antara minuman memabukkan adalah yang dikenal sebagai oplosan. Ironinya, sekali waktu, pernah muncul kemasan oplosan bermerek Cherybelle.

Pada masanya Cherybelle adalah salah satu merek untuk campuran alkohol metanol dengan obat nyamuk dan obat tidur yang

metanol saja dalam minuman dapat menyebabkan kebutaan permanen, sementara 100 mililiter (sepuluh sendok) sudah bisa menyebabkan kematian. Keracunan

langsung merasakan dampak negatifnya, tetapi setelah beberapa lama mulai merasakan sesak, kejang-kejang, hingga koma sebelum meninggal, akibat kerusakan



kemudian disalahgunakan menjadi minuman dan banyak dijual di warung-warung kecil. Bahan campuran lainnya bisa saja, pewangi, zat pewarna, suplemen, bahkan cairan pembersih lantai.

Karena metanol sebenarnya bukanlah alkohol untuk diminum, jadilah peminumnya keracunan. Minuman memabukkan berbahan baku metanol Tentu saja bukanlah alkohol untuk diminum seperti etanol. Apalagi jika sudah dicampur dengan macam-macam bahan yang tak jelas lagi, kecuali semakin membahayakan.

Hanya 10 mililiter (satu sendok makan)

metanol dimulai dengan gangguan kesadaran, asidosis metabolik (gangguan meningkatnya produksi asam dalam tubuh), kerusakan penglihatan dan organ tubuh, dan akhirnya berakhir kematian. Gejala awal dari gangguan penglihatan yang bisa terlihat adalah pupil membesar, penglihatan menjadi kabur, kebutaan. Sementara gangguan metabolisme yang terjadi terlihat dari gejala mual, muntah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat, tekanan darah menurun, syok kemudian koma dan akhirnya meninggal.

Nah, para peminum Cherybelle tidak

saraf dan pernapasan. Meminum metanol terus-menerus sesungguhnya dapat menyebabkan kebutaan, gagal ginjal dan jantung, kerusakan otak, paru. Efek ini diperburuk dengan adanya tambahan obat penenang.

Penamaan Cherybelle untuk miras oplosan rupanya berdasar pada tampilan "minuman setan" itu yang berwarna-warni. Tidak hanya merah gelap layaknya teh maupun miras berharga tinggi, cherybelle juga ada yang berwarna kuning, merah menyala, ungu, dan hijau terang. Mengingat girlband Cherybelle mulai tenar sejak

2011, dalam beberapa tahun Cherrybelle menjadi bahasa slang untuk miras oplosan murah yang campurannya sangat bervariasi bergantung selera peminum maupun peraciknya. Bahasa slang itu pun membuat transaksi dan peredarannya tersamarkan dari radar pantauan.

Cherrybelle mulai menjadi ramai diperbincangkan setelah memakan korban delapan orang tewas di Sumedang, Jawa Barat sejak awal Desember 2014. Korban jiwa juga ditemukan di Garut dengan jumlah 16 orang. Akibat kejadian ini, timbul kepanikan di kalangan peminumnya sehingga puluhan orang beramai-ramai mendatangi rumah sakit. Total 63 orang, termasuk korban meninggal, yang sempat dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Sumedang. Usia peminumnya mulai dari pelajar SMP 11 tahun hingga kakek berusia 62 tahun.

Minuman bermerek Cherrybelle diduga disuplai dari sebuah gudang di Peruma-

Penamaan Cherrybelle untuk miras oplosan rupanya berdasar pada tampilan “minuman setan” itu yang berwarna-warni.

han Manglayang Regency, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dugaan muncul setelah anggota Polres Bandung menggerebek gudang tersebut pada 4 Desember 2014. Pemilik gudang, AT, ditetapkan sebagai tersangka, dengan ancaman hukuman dua tahun penjara karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Suami istri berinisial R dan Y juga ditangkap di kediamannya di Kecamatan Leles, Garut karena ikut mengedarkan minuman ini.

Dalam kasus hampir serupa sebelumnya di Surabaya pada 2013, polisi menyatakan bahwa tindakan menyimpan, memproduksi, memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar pangan, pengawasan dan pengendalian import, menjual, menawarkan, menyerahkan, serta membagi-bagi barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan

orang bisa dijerat Pasal 140 juncto Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 20 Permendagri RI Nomor: NO/15/M-DAG/PER/3/2006, tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Penedaran dan Penjualan, dan Perizinan Miras dan atau Pasal 204/205 KUHP. Bila peminumnya meninggal dunia, maka pelakunya bisa dihukum seumur hidup.

Sedangkan peraturan peredaran minuman keras diatur dalam Perpres No.74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peraturan ini masih memberikan ruang akses penjualan minuman keras berdasarkan golongan dan minuman keras tradisional yang diatur oleh kepala daerah untuk kepentingan tradisi dan keagamaan.



Namun peredaran miras kian sempit dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut melarang penjualan miras di gerai minimarket.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jakarta pernah meneliti perilaku peminum miras di Jakarta pada rentang Februari-Maret 2017. Sebanyak 71,5 persen penenggak miras cenderung mencari minuman oplosan warung jamu setelah adanya peraturan menteri perdagangan soal pelarangan penjualan miras di minimarket.

Sedangkan 14,3 persen mencari di

toko kelontong dan 7,1 persen membeli melalui perantara. Parahnya dari seluruh responden yang mereka temui, 65,3 persen di antaranya masih berada di bawah umur. Survei Lakpesdam ini melibatkan 327 responden remaja berusia 12-21 tahun. Responden dipilih secara random bertingkat, pengacakan kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga (RT) dengan tingkat kepercayaan 94,5 persen dan margin of error 5,2 persen.

Bahaya miras oplosan sendiri sudah memakan korban di beberapa daerah setelah kepala daerah melakukan pelarangan peredaran miras legal. Data Center For Indonesian for Policy Studies (CIPS) pada 2016 menunjukkan angka korban miras oplosan meningkat drastis di daerah pasca pelarangan oleh kepala daerah.

CIPS melakukan riset wawancara pada 2016 atas peredaran miras oplosan di enam kota, yakni Cirebon, Depok, Malang, Medan, Palembang dan Yogyakarta (termasuk di kabupaten Sleman dan Bantul). Mereka kebanyakan memilih miras oplosan karena harga miras legal melonjak hingga dua kali lipat pasca pelarangan miras oleh kepala daerah. Serta hilangnya terhadap alkohol legal membuat kian maraknya pasar gelap.

Lembaga tersebut juga melakukan riset pemberitaan atas korban jiwa karena miras ilegal. Kematian akibat miras ilegal meningkat tajam pada rentang 2013-2016 (487 korban jiwa) dibandingkan rentang 2008-2012 (149 korban jiwa). Miras ilegal itu ya oplosan yang pernah diberi merek Cherrybelle. Jadi, memang perlu perhatian. ♦



PEMBIAYAAN SYARIAH TURUN KE JALAN

Penerapan skema pembiayaan syariah sebagai alternatif memasuki babak baru: Mendanai proyek perbaikan (preservasi) Jalan Lintas Timur di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Sekaligus menjadi debut awal Bank Syariah Indonesia pasca merger pada Februari 2021.

Sudah mendekati seribu hari proyek perbaikan (preservasi) Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel) berhenti di tahap lelang. Sejak kajian prastudi kelayakan (FBC, final business case) tuntas dan pengumuman lelang pertama muncul pada 6 Juli 2018. Pembiayaan syariah menjadi penyelamat proyek perbaikan yang tersendat-sendat jika sulit disebut

mangkrak ini.

Jelas bukan gagal lelang yang menjadi penghambat proyek itu, melainkan pembiayaan yang seret akibat keterbatasan anggaran. Alhamdulillah, awal 2021 ini proyek Jalintim sumsel ini sudah berhasil menemukan sumber pembiayaan alternatif.

Akhirnya proyek infrastruktur berupa perbaikan (preservasi) Jalintim di Provinsi Sumsel senilai Rp644,76 miliar itu meng-

gaet pembiayaan hasil sindikasi yang dipimpin oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Sedangkan sindikasi pembiayaannya melibatkan BSI bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah. Bertindak sebagai pelaksana proyeknya adalah PT Jalintim Adhi Abipraya, konsorsium Badan Usaha Milik Negara, sebagai pemenang lelang.

Pada sindikasi ini, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, yaitu transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa. Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia.

"Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia

menjadi bagian dalam sejarah pemberian fasilitas Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini merupakan yang pertama kalinya menggunakan transaksi syariah," ungkap Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Senin, 22 Februari 2021. Ia mengatakan, sindikasi ini merupakan debut pertama pasca merger di awal Februari 2021 ini.

"Insya Allah, BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air," sambungnya. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini, menurut dia, menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem syariah.

Dari total pagu (plafon) pembiayaan sindikasi, porsi BSI mencapai Rp248 miliar. Sedangkan untuk alokasi PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing mencapai Rp248 miliar dan Rp148,76 miliar. Dalam pembiayaan sindikasi, BSI berperan sebagai Mandated Lead Arranger, Agen Fasilitas, Agen Jaminan, dan Agen Escrow.

Pinjaman bertenor 10 tahun ini akan membiayai ruas jalan sepanjang 29,87 km berikut jembatan dan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Acara Financial Closing Proyek Jalintim Sumsel ini berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR RI, Senin, 22 Februari 2021.

Dalam acara itu hadir sejumlah pejabat penting terkait pembiayaan sindikasi syariah ini. Tampak antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata. Tak ketinggalan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Sumatera Selatan Saiful Anwar.

Dari pihak sindikasi pembiayaan, tampak Wakil Direktur Utama 1 BSI Ngatari, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahrudaz, Direktur Utama Panin Dubai Syariah Brahta, dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo. PT PII bertindak sebagai lembaga penjamin.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi

masyarakat. Pasalnya, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan, sehingga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya polusi udara," ujar Hery.

Ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Sriwijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H Alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga akan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Ruas-ruas jalan ini membentang dari Indralaya, Ogan Ilir, hingga Kota Palembang arah Bandara.

Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi BSI dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, BSI akan aktif menyalurkan sindikasi ke sektor energi; salah satu proyek yang dibiayai adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Sampai Desember 2020, pembiayaan wholesale Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp48,03 triliun. Pada akhir 2021, Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4-6 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menjadi pemimpin sindikasi pembiayaan proyek perbaikan Jalintim Sumsel, dengan komitmen pembiayaan senilai Rp248 miliar, hanya sekitar lima per nil



atau setengah persen dari seluruh pembiayaan BSI. Jadi, mungkin masih ada proyek infrastruktur lainnya yang mendapat kucuran pembiayaan syariah, belum terhitung sektor energi yang berskema KPBU sebagaimana Jalintim Sumsel ruas sekitaran Kota Palembang tadi.

Proyek Jalintim Sumsel yang dibiayai sindikasi pembiayaan syariah ini menggunakan skema KPBU. Penandatanganan perjanjian kerja sama penjaminan dan regres proyek ini berlangsung pada Senin, 3

Usaha Pelaksana/BUP (Konsorsium dari PT Adhi Karya dan PT Brantas Abripraya.

Selanjutnya, Perjanjian Penjaminan, antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku Badan Usaha Penjaminan dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku Badan Usaha Pelaksana; Perjanjian Regres, antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku Badan Usaha Penjaminan dengan Kementerian PUPR c.q Direktorat Jenderal Bina Marga selaku PJPk.

Direktur Pengelolaan Dukungan

terus menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dan mempercepat delivery penyediaan layanan infrastruktur bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Proyek Jalintim Sumsel sepanjang 29,87 km dan total jumlah jembatan sebanyak 14 unit dengan nilai investasi mencapai Rp916,4 miliar. Biaya investasi ini terdiri dari biaya konstruksi dan bunga selama konstruksi dengan masa konsesi selama 15 tahun. Ruang lingkup yang dikerjakan sama dengan BUP dari Proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan adalah merancang, membangun dan membiayai pembangunan, memelihara seluruh infrastruktur selama masa kerja sama dan kemudian menyerahkan seluruh infrastruktur kepada PJPk pada saat masa kerja sama berakhir.

Pembiayaan Proyek KPBU-AP Jalintim Sumsel berasal dari badan usaha dan skema pengembalian investasi yang digunakan adalah skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Skema Availability Payment/ AP), pembayaran AP akan bersumber dari

Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

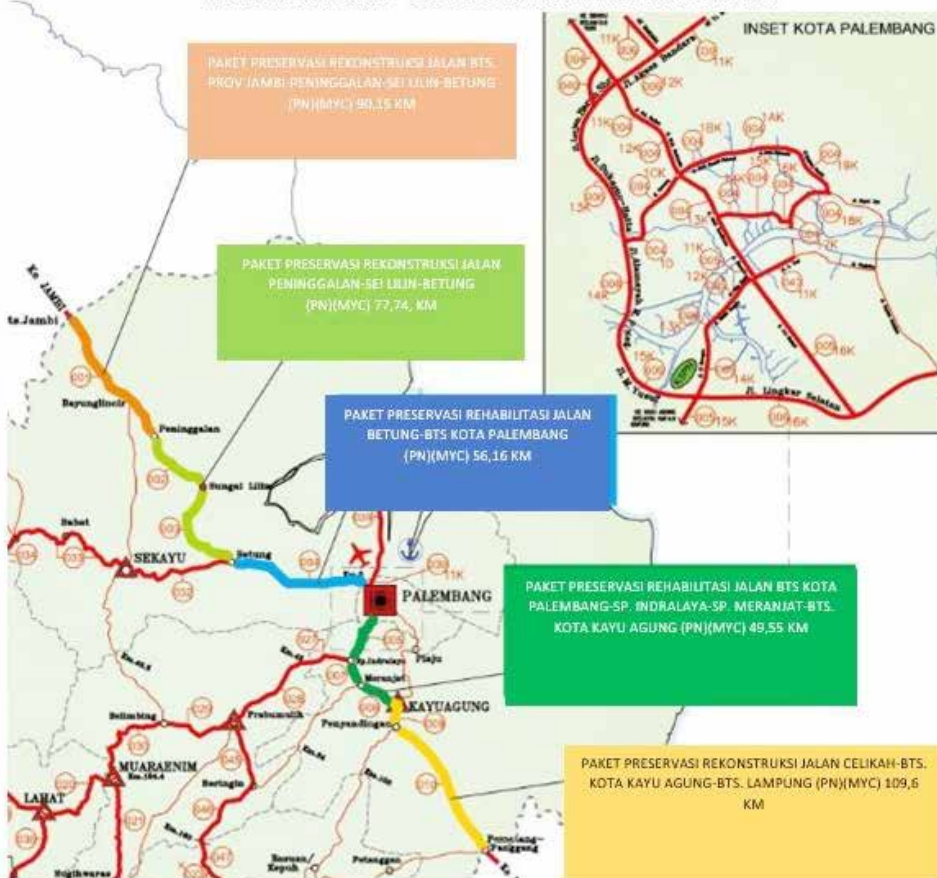
APBN dari DIPA Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan secara prinsip akan mendukung proses pengalokasian anggaran untuk pembayaran AP tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan adanya KPBU, maka tanggung jawab proyek tidak lagi sepenuhnya berada di bawah Kementerian PUPR. Terdapat kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT PII, dan PT Jalintim Adhi-Abipraya sebagai badan usaha pembangunan proyek.

“Saya pribadi suka dengan KPBU. Dengan ini berarti disangga bareng-bareng, di-manage bareng, ya mudah-mudahan tujuannya lebih baik hasilnya,” ujarnya.

Dengan sistem syariah pula pembiayaannya. Semoga sukses dan mendapat ridha Allah. ♦Rosy/Irma

SBSN TAHUN 2019 – 2020 PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sumber: Bid.Perencanaan dan Pemantauan BBPJN V

Agustus 2020 lalu.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII Muhammad Wahid Sutopo, serta Direktur PT Jalintim Adhi-Abipraya Paulus Bambang Sulistyanto.

Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatera Selatan itu mencakup sejumlah perjanjian kontrak. Antara lain, Perjanjian Kerja Sama PJPk dan Badan Usaha Pelaksana, antara Kementerian PUPR c.q Direktorat Jenderal Bina Marga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPk) dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku Badan

Pemerintah dan Pengelolaan Infrastruktur, Bramantio Isdijoso menyampaikan bahwa Proyek KPBU-AP Jalintim Sumsel merupakan proyek preservasi jalan non tol untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan logistik di Lintas Timur Sumatera sebagai tulang punggung pengembangan perekonomian regional yang selanjutnya akan mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

“Proyek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruas jalan non tol dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Kami berharap penggunaan skema KPBU dapat

KISAH PANJANG MENAMBAL 2.500 LUBANG

Senyum Kiagus Saiful Anwar mungkin sudah bisa terlihat sekarang. Sepanjang 2020, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V yang ber Kantor di Jalan Noerdin Pandji, Alang-alang Lebar, Kota Palembang ini beberapa kali terlihat tanpa senyum jika berkisah tentang perbaikan Jalintim Sumsel yang sudah berkali-kali tertunda pelaksanaannya.

Kiagus Saiful sudah hapat benar, perbaikan Jalintim Sumsel yang totalnya men-

memang menuntut perbaikan memadai. Hasil survei menjelang Idul Fitri 1440 Hijri pada 2019 lalu saja, ruas Palembang hingga perbatasan Provinsi Jambi sepanjang 236 Km menemukan setidaknya 2.500 titik lubang jalan. Tambahan pula drainase jalan yang buruk seringkali menjadi penyebab jalanan cepat rusak.

Air meluap keluar saluran dan mengganggu jalan merupakan salah satu penyebab kerusakan atau mengurangi keawetan permukaan jalan dengan

tinggal rencana yang tertunda-tunda.

Akibat tertundanya pengerjaan perbaikan jalan tersebut, maka dapat berdampak pada kualitas jalan, sehingga membuat pengendara kendaraan yang melintasinya akan tidak nyaman. "Memang untuk kenyamanan tidak tercapai tapi meminimalkan potensi kecelakaan," kata Kiagus Syaiful.

Sementara proyek belum berjalan, kata dia, BBPJN Wilayah V menggunakan dana transisi untuk melakukan pengerjaan sementara yang bersifat fungsional. Hanya



capai 383,20 kilometer memerlukan biaya hingga Rp1 triliun. Pembiayaan itu yang sulit terpenuhi oleh pelaksana proyek dengan skema public private partnership yang di Indonesia dikenal sebagai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Iya tiga kali gagal lelang karena penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan," katanya, Senin, 26 Agustus 2020 lalu. Selanjutnya, kata dia, lelang proyek ini diserahkan ke pusat.

Sedangkan kondisi Jalintim Sumsel

perkerasan aspal dan disaat bersamaan kendaraan bertonase besar/Over Dimension dan Overload (ODOL) seperti truk dan bus yang melintas berulang kali, mempercepat proses penyebaran retakan sehingga mengakibatkan kerusakan yang melebar.

Alhasil, perbaikan di jalan lintas timur tersebut terdiri dari lima paket pengerjaan, baik yang mengarah ke Jambi maupun Lampung. Awalnya, lelang tersebut ditargetkan dapat selesai usai Idul Fitri 2019 lalu. Namun rencana

mencakup penutupan lubang, pembersihan saluran atau pemotongan rumput.

"Dana transisi itu hanya untuk pekerjaan fungsional saja. Untuk pengerjaan struktural harus menunggu paket kontrak berjalan," katanya.

Namun, kini, PT Jalintim Adhi-Abipraya sudah mendapat pembiayaan syariah. Semoga senyum Kiagus Saiful mengembang, dan jalur mudik Lintas Timur Sumatera pada Idul Fitri 1442 Hijri pada Mei 2021 akan aman dan nyaman. Insya Allah. ♦ Rosy/Irma

WALIKOTA PALEMBANG AJAK WALIKOTA JAMBI KOLABORASI SUBUH BERJAMAAH

► Kenalkan Palembang Emas Darussalam

MEMAKMURKAN Masjid menjadi kewajiban setiap umat muslim. Untuk itu, Walikota Palembang, H. Harnojoyo bersama Walikota Jambi, Dr H. Syarif Fasha, SE, mengajak masyarakat Kota Palembang, untuk terus istiqomah dalam menjalani ajaran agama, untuk memakmurkan rumah Allah.SWT.



Hal itu disampaikannya, saat meresmikan renovasi masjid Al Hadi Asshiddiqi, yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan (Tembok Batu) Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju, yang dilakukan keluarga besar keluarga besar Dr H. Syarif Fasha, SE, Jumat (5/3/2021).

"Alhamdulillah, salah satu rumah Allah. SWT di Kota Palembang akan kembali diperindah. Kita berharap ini akan menjadi penyemangat umat muslim di kota ini, untuk selalu tawaduk kepada yang maha kuasa, dengan selalu menjalankan ibadah sholat di masjid," ungkapnya.

Harnojoyo juga tidak berhenti mengajak masyarakat khususnya umat muslim Kota Palembang, untuk selalu menganggungkan kebaesian Allah SWT dengan memakmurkan masjid.

"Kalau sudah dibuat bagus, harus dimakmurkan. Bagaimana caranya, dengan sholat berjamaah di masjid," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Harnojoyo juga menjelaskan sekilas program Subuh berjamaah kepada Walikota Jambi Dr H. Syarif Fasha, SE. Bahkan, ia mengajak Walikota kelahiran Kota Palembang tersebut untuk mengikuti jejaknya dengan melaksanakan program safari subuh berjamaah di Kota Jambi.

"Selain untuk memakmurkan masjid, Program subuh berjamaah, agar para pimpinan OPD dapat langsung menyerap aspirasi warga," sampainya.

Dihadapan politisi Partai Golkar tersebut, Harnojoyo menerangkan manfaat dan keuntungan pelaksanaan program subuh berjamaah. Selain untuk kedisiplinan, program yang telah ia mulai dari tahun 2014 ini, dapat menjadi penilaiannya terhadap kinerja OPD.

"Karena saat ini lagi pandemi, saya minta OPD melaksanakan di lingkungan tempat tinggal masing - masing, kalau kemarin kita mobile. Mungkin setelah pandemi ini berakhir kita akan lanjutkan, mungkin Walikora Jambi mau kolaborasi untuk skala Provinsi," tuturnya sambil tersenyum

Sementara itu, Dr H. Syarif Fasha, SE mengucapkan terimakasih atas sambutan dan kehadiran Walikota Palembang pada kegiatan renovasi masjid Al Hadi Asshiddiqi.

Kakak kandung Anggota DPRD Kota Palembang dari Partai PKB, Firmansyah

Hadi ini menuturkan, renovasi yang dilakukan oleh kuarga besarnya karena memang masjid tersebut memiliki banyak kenangan bagi dirinya.

"Saya sholat dan mengaji di masjid ini waktu saya kecil. Karena ada sedikit rezeki makan kami sekeluarga melakukan renovasi," jelasnya

Menurut Syarif, program subuh berjamaah yang diinisiasi Walikota Palembang



bang sudah cukup bagus. Dimana itu sebagai salah satu upaya memakmurkan rumah Allah SWT.

"Saya berharap setelah direnovasi, yang sholat di masjid ini akan semakin ramai. Benar apa yang dikatakan Pak Walikota Palembang, jika sudah dibuat bagus, harus dimakmurkan, caranya, dengan sholat berjamaah di masjid," tandasnya. ♦rms



PEDAGANG HARUS UTAMAKAN KEJUJURAN

► Siapkan Pojok Pasar

► Sidak Setiap Hari

Untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda gencar melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di pasar yang ada di Kota Palembang.

Bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM), seluruh sampel makanan diambil guna diperiksa, apakah ada bahan berbahaya di makanan yang dijual para pedagang pasar.

"Ini adalah ikhtiar kita, agar masyarakat Palembang mendapatkan makanan yang aman. Karena, masih banyak pedagang nakal yang menggunakan bahan-bahan berbahaya terhadap makanan yang dijual," sampai Fitri.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini sangat menyayangkan

MC Khusus di Kabupaten OKU lanjut HD, ada 41 kegiatan yang telah rampung dikerjakan. Dengan total nilai APBD Provinsi Sumsel tahun 2019 yang dikurkuran berjumlah Rp 133,9 miliar dan APBD Tahun 2020 berjumlah Rp 105 miliar lebih.

masih banyak ditemukan bahan-bahan berbahaya pada makanan yang dijual.

Seperti hasil sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dimana, hasil inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis, 25 Februari 2021 lalu, adik kandung mantan Walikota Palembang, Romi Hertono ini, kembali menemukan bahan kimia di beberapa makanan yang dijual di Pasar Tradisional Yada Matamerah Kecamatan Kalidoni.

"Saya sudah memberikan ultimatum, jika masih ada pedagang melakukan kecurangan maka tidak segan-segan pedagang tidak akan disuruh lagi berjualan di-



pasar dan dikenakan penindakan denda," sampainya.

Fitri menuturkan, zat kimia yang kalau dikonsumsi masyarakat melalui makanan, dapat merusak tubuh, apalagi anak-anak tentu dalam waktu jangka panjang akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

"Coba bayangkan, zat kimia yang berbahaya ada pada makanan. Bagaimana kita bisa sehat," ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Fitri telah mem-

**"Ini adalah
ikhtiar kita, agar
masyarakat Palembang
mendapatkan makanan yang
aman."**

berikan peringatan kepada seluruh pedagang makanan agar tidak mengambil ke distributor yang mengandung zat kimia dan distributor agar berhenti melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Sementara itu, Kepala BBPOM Palembang Yosef Dwi Irwan menambah, konsumen dan pedagang bisa mengujikan (menggunakan rapid test) pangan yg dibeli atau dijual secara gratis di tempat Bucu pasar (Pojo Pasar), atau bisa datang ke kantor BBPOM Palembang untuk uji cepat gratis.

Berikut nama-nama pasar yang ada Bucu pasarnya Pasar Km. 5, Pasar Bukit Kecil, Pasar Lemabang, Pasar Sekip Ujung, Pasar 10 Ulu dan Pasar Padang Selasa. ♦rms



MISKIN

Gunawan Effendi

Secara teratur Badan Pusat Statistik mengeluarkan data penduduk miskin di Indonesia. Untuk periode September 2020, hasil pengumpulan datanya keluar pada Februari 2021.

Alhasil secara nasional, per September 2020, jumlah warga miskin di Indonesia tercatat sebanyak 10,19 persen dari jumlah penduduk atau mencapai 27,55 juta jiwa. Bandingkan dengan jumlah warga miskin per September 2019 yang masih 9,22 persen dari total penduduk.

Bagaimana memahami angka-angka itu secara sederhana? Data BPS yang keluar pada Februari 2021 menunjukkan bahwa di antara 100 orang penduduk, setidaknya terdapat 10 orang yang berkategori miskin. Naik dari angka pada tahun sebelumnya, yaitu pada setiap 100 penduduk baru terdapat sembilan saja yang miskin. Jadi, ada peningkatan jumlah warga miskin dari 2019 ke 2020.

Mudah pula memahami kenaikan jumlah penduduk miskin itu dengan mengaitkannya pada penyebaran wabah Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi sehingga penghasilan penduduk berkurang. Pada gilirannya, ada sebagian penduduk yang semula masih berada di luar kategori miskin akhirnya masuk ke golongan ini.

Namun, sebaran penduduk miskin itu pasti tidak merata. Belum tentu ketika 100 orang berkumpul di satu ruas jalan akan menemukan 10 warga miskin. Belum tentu juga dari 100 warga di satu lingkungan Rukun Tetangga ada 10 yang miskin. Namun, boleh jadi di wilayah RT lainnya ada 15 atau 20 yang miskin di antara 100 warganya.

Nah, BPS yang banyak memiliki ahli statistik juga pasti menyadari bahwa sebaran warga miskin itu tidak merata. Oleh sebab itu, data penduduk miskin dikelompokkan lagi menurut wilayahnya. Jika dilihat persentasenya, mungkin angkanya berbeda sedikit saja.

Namun, cobalah melihat angka absolut atau hitungan nyatanya. Sebagai contoh, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa hanya 9,71 persen dibandingkan dengan di Sumatera yang tercatat 10,22 persen, atau Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 13,92 persen.

Pada kenyataannya, 9,71 persen penduduk Jawa yang miskin jumlahnya mencapai 14,75 juta jiwa. Sedangkan 10,22 persen penduduk Sumatera yang tergolong miskin jumlah nyatanya adalah 6,06 juta jiwa. Malah untuk penduduk Bali dan Nusa Tenggara yang tercatat 13,92 persen miskin, jumlah nyatanya ternyata hanya 2,11 juta jiwa..

Selanjutnya, di Sulawesi tercatat 2,06 juta penduduk mis-

kin atau 10,41 persen total penduduknya. Di Maluku & Papua tercatat 1,53 juta warga miskin yang mencakup 20,65 persen penduduk. Sedangkan di Kalimantan tercatat 1,01 juta warga miskin atau sekitar 7,15 persen jumlah penduduknya.

Namun, bisa juga mengelompokkan warga miskin menurut provinsi. Hasilnya adalah urutan provinsi termiskin di Indonesia menurut persentase jumlah penduduknya. Dari daftar persentasenya, muncul urutan sebagai berikut:

1. Papua: angka kemiskinan 26,8 persen penduduk.
2. Papua Barat: angka kemiskinan 21,7 persen penduduk.



3. Nusa Tenggara Timur: angka kemiskinan 21,21 persen penduduk.
4. Maluku: angka kemiskinan 17,99 persen penduduk.

5. Gorontalo: angka kemiskinan 15,59 persen penduduk.
6. Aceh: angka kemiskinan 15,43 persen penduduk.
7. Bengkulu: angka kemiskinan 15,30 persen penduduk.
8. Nusa Tenggara Barat: angka kemiskinan 14,23 persen penduduk.
9. Sulawesi Tengah: angka kemiskinan 13,06 persen penduduk.
10. Sumatera Selatan: angka kemiskinan 12,56 persen penduduk.

Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin paling rendah adalah sebagai berikut:

1. Bali, angka kemiskinan mencapai 4,45 persen penduduk.
2. DKI Jakarta sebesar 4,69 persen penduduk.
3. Kalimantan Selatan sebesar 4,83 persen penduduk.
4. Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,89 persen penduduk.
5. Kalimantan Tengah sebesar 5,26 persen penduduk.
7. Kepulauan Riau sebesar 6,13 persen penduduk.
8. Sumatera Barat sebesar 6,56 persen penduduk.
9. Banten sebesar 6,63 persen penduduk.
10. Kalimantan Timur 6,64 persen penduduk.

Semuanya adalah angka dan bisa mendapatkan tafsirnya masing-masing. Namun, penting pula memahami apa pengertian penduduk miskin menurut BPS.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep

tuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Lalu, apa batas garis kemiskinan itu? BPS sudah menghitung dengan metode ilmiah yang secara sederhana merupakan rata-rata pengeluaran bulanan seseorang untuk makanan dan bukan makanan yang pada periode 2020 dikonversikan mendekati angka Rp455 ribu per bulan atau rata-rata sekitar Rp15 ribu per hari.

Jadi, jika satu rumah tangga beranggotakan suami-istri dengan dua anak hingga jumlah nya empat orang dan rata-rata belanja hariannya kurang dari Rp60 ribu atau Rp1,8 juta per bulan, maka keluarga itu tergolong miskin. Jika seorang gadis atau bujang hidup mandiri namun pengeluarannya kurang dari Rp454 ribu per bulan atau Rp15 ribu per hari, ia adalah jomblo yang miskin.

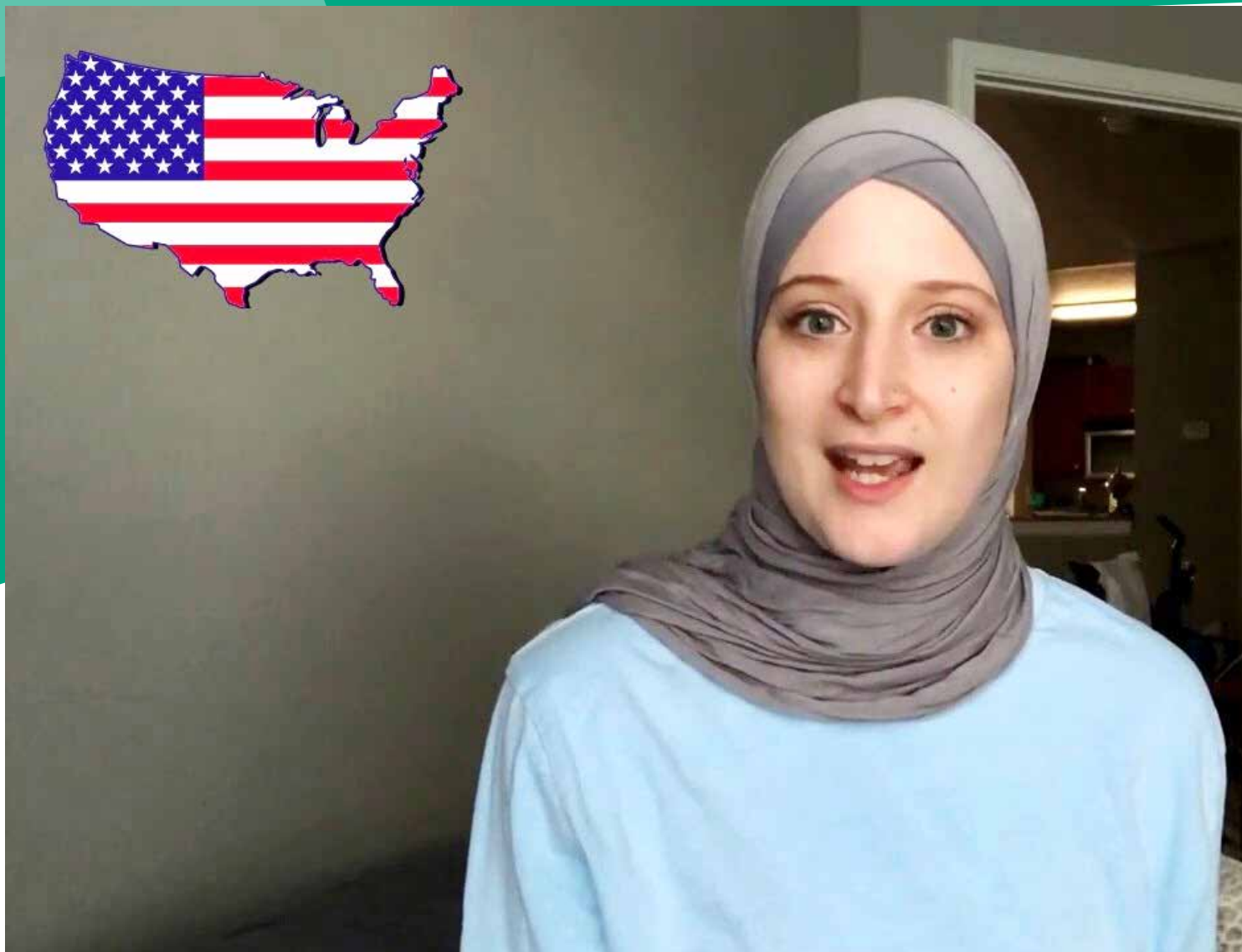
Dalam konteks kehidupan umat, setidaknya ada 33 ayat yang menyebut kosa kata miskin. Yang paling banyak terdapat di Surat Al Baqarah (2), masing-masing pada ayat 83, 177, 184, dan 215. Belum lagi jika kita membahas perbedaan antara fakir dan miskin.

Namun yang lebih penting sebenarnya bagaimana mengatasi kemiskinan itu. Bukan melecehkan kemiskinan



kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebu-

seseorang atau daerah tertentu, melainkan menciptakan kesejahteraan. Kemiskinan lebih merupakan data, kesejahteraan akan lebih terasa. ♦



Ashley

MASUK ISLAM SETELAH IKUT GERAKAN "WORLD HIJAB DAY"

Hari Hijab Sedunia atau World Hijab Day yang dirayakan setiap 1 Februari memberikan arti tersendiri bagi sebagian orang. Gerakan Kampanye Hijab ini sendiri telah membuat banyak wanita Muslim tergerak hatinya untuk berhijab atau menutup aurat.

Dan gerakan yang diserukan World Hijab Day ini, ternyata tak hanya menyentuh kalangan Muslim saja, melainkan juga

non-Muslim. Karena terbukti tak sedikit wanita non-Muslim yang tertarik pada Islam melalui gerakan Hijab Day ini.

Salah satunya adalah wanita cantik



berkulit putih, bernama Ashley. Dia kini telah menjadi seorang Muslimah selama hampir dua tahun. Bagaimana Hari Hijab Dunia (World Hijab Day) mampu mempengaruhi ketertarikannya kepada Islam?

**Salah satunya
adalah wanita can-
tik berkulit putih,
 bernama Ashley.
Dia kini telah
menjadi seorang
Muslimah selama
hampir dua tahun.**



Mulai Mengenal Islam

Ashley, tumbuh dan besar di Arkansas, Amerika Serikat, yang merupakan negara bagian Selatan di wilayah 'Sabuk Alkitab' dengan jumlah pemeluk agama Kristen yang sangat besar. Di tempat tersebut banyak orang yang rajin melaksanakan ajaran agama mereka dengan pergi ke Gereja. Mereka berada di area yang didominasi kulit putih dan tidak belajar banyak tentang agama atau budaya lain.

Ketika duduk di bangku kuliah, Ashley mulai mengenal Islam. Dia dihadapkan pada budaya yang berbeda dan bahkan dengan orang-orang kulit berwarna. Dia juga aktif mengikuti program, di mana mereka bergabung dengan siswa Amerika dengan siswa Internasional.

Dan secara tidak sengaja, Ashley dipasangkan dengan pasangannya di sekolah pascasarjana yang berasal dari Arab Saudi, dan mereka pun akhirnya menjadi teman yang sangat akrab. Hubungan mere-

ka pun berjalan dengan sangat baik, dan saling menghormati satu sama lain.

Meski akrab, namun mereka tidak banyak bicara tentang agama yang mereka anut. Ashley sering mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi topik agama tidak pernah menjadi masalah baginya. Sayangnya, hubungan pertemanan mereka berakhir setelah Ashley lulus.

Gabung dalam Gerakan Hari Hijab Dunia

Pada tahun berikutnya, Ashley melanjutkan pendidikannya di sekolah pascasarjana, dan tepat malam sebelum 'Hari Hijab Sedunia' digelar, Ashley memutuskan untuk mengambil bagian dan ikut terlibat dalam acara 'Hari Hijab Sedunia'.

Tentu saja, keikutsertaan Ashley yang seorang non-Muslim di acara Hijab Day mendapat banyak tanggapan positif, terutama dari kalangan umat Islam. Ashley sendiri bahkan sangat senang dengan sambutan yang diterimanya.

Ashley pun kemudian diangkat menjadi duta 'Hari Hijab Sedunia' dan pada 2018, dia ingin mengadakan acaranya sendiri. Dia pun mulai terhubung dengan Masjid setempat dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Islam di daerah tersebut.

Kemudian tiba-tiba, seorang pria memberinya dua buah salinan

MC

Mendengar kata-kata pria tersebut, Ashley pun tersentak. Dan kata-kata tersebut benar-benar melekat dalam hatinya, hingga Ashley pun tergerak hatinya untuk belajar lebih banyak tentang apa itu Islam.



Al-Quran dan tepat sebelum pertemuan dimulai, pria tersebut mengatakan sesuatu kepada Ashley.

"Anda tahu cara media menggambarkan agama kami, itu hanya agama yang paling disalahpahami," kata pria tersebut.

Mendengar kata-kata pria tersebut, Ashley pun tersentak. Dan kata-kata tersebut benar-benar melekat dalam hatinya, hingga Ashley pun tergerak hatinya untuk belajar lebih banyak tentang apa itu Islam.





Memutuskan Masuk Islam

Selain mulai giat belajar tentang Islam, Ashley juga memutuskan untuk mengambil bagian dalam acara tantangan hijab 30 hari. Yakni harus mengenakan hijab dan menutup aurat selama satu bulan. Tak hanya itu, Ashley juga memutuskan melakukan puasa Ramadhan juga.

Menurut pengakuan Ashley, saat dirinya belajar lebih banyak tentang Islam, dia merasakan perubahan terjadi pada dirinya. Ashley lalu meminta temannya



Selain mulai giat belajar tentang Islam, Ashley juga memutuskan untuk mengambil bagian dalam acara tantangan hijab 30 hari. Yakni harus mengenakan hijab dan menutup aurat selama satu bulan. Tak hanya itu, Ashley juga memutuskan melakukan puasa Ramadhan juga.

untuk mengajarnya cara berdoa dalam Islam. Dan pada akhir bulan suci Ramadhan, Ashley benar-benar telah jatuh cinta dengan agama Islam.

Kemudian pada hari terakhir bulan suci Ramadhan, yaitu pada hari Lebaran atau Idul Fitri, yang merupakan hari kembalinya seseorang menjadi suci, Ashley memutuskan menjadi seorang Muslimah. Dia merasa telah siap untuk mengucapkan Dua Kalimah Syahadat, yang artinya Ashley resmi menjadi seorang Mu'alaf. ♦mt/About Islam

Tampil Stylish dan Fashionable dengan Atasan Off Shoulder

INI 8 INSPIRASI DAN TIPS PADU-PADANNYA AGAR TAK SALAH KOSTUM

Dengan berhijab tak lantas membuat seseorang mati gaya. Banyak kreasi yang bisa diciptakan untuk membuat penampilan lebih cantik dan menawan, khususnya bagi para hijaber muda. Apapun gaya pakainya, semua bisa dirancang dan didesign, serta dipadu-padankan hingga menjadi sebuah penampilan yang modern, namun tetap memenuhi syarat sebagai busana Muslimah.

Seperti halnya busana atasan dengan model yang terbuka di bagian pundak, yang disebut dengan off shoulder, atau yang sering juga disebut sebagai atasan model Sabrina, hingga kini masih menjadi salah satu atasan yang paling diminati para hijaber muda.

Busana dengan gaya yang satu ini telah menjadi tren di musim panas yang sudah lewat beberapa bulan lalu, namun masih banyak para wanita muda yang kerap mengenakannya di berbagai kesempatan. Modelnya yang manis membuat pemakainya terlihat sangat chic, girly, feminin dan fashionable.

Lalu, apakah atasan jenis ini bisa dipakai oleh hijaber? Tentu, kenapa tidak? Untuk Anda para hijaber, memang harus punya trik sendiri jika ingin mengenakan model atasan off shoulder ini, agar tetap terlihat modis dan lebih sopan. Caranya, Anda bisa mengenakan dalaman atau manset untuk menutupi area bahu yang 'terbuka' supaya tidak terlalu menampilkan kesan 'bolongnya'.

Berikut 8 Inspirasi dan Tips Padu-Padan Busana Off Shoulder dan Hijab seperti dirangkum dari Hipwee Style:

1. Gunakan Warna Senada

Pilihlah manset berwarna senada dengan atasan Off Shoulder untuk menampilkan kesan natural, lalu kenakan hijab berwarna kontras, namun tetap senada dengan bawahan Anda agar tidak terlihat monoton.

Atasan Off Shoulder berwarna putih dengan lengan 3/4 akan sangat manis jika diberi tambahan

dalaman atau manset berwarna putih juga. Untuk menyiasati agar warnanya tidak terlalu monoton, Anda bisa memadukannya dengan hijab berwarna kontras, yang disesuaikan dengan aksentuasi pada bawahan.

Seperti misalnya jika aksentuasi celana yang dikenakan berwarna biru tua, maka pilihlah warna yang sama dengan warna hijab Anda. Atau, Anda juga bisa menyamakan warna hijab dengan warna sepatu yang dikenakan.

2. Boleh Tabrak Warna Asal 'Nyambung'

Untuk penampilan yang lebih santai, Anda bisa mengenakan atasan Off Shoulder tanpa lengan. Padukan dengan dalaman, hijab maupun bawahan berwarna kontras alias tabrak warna.

Anda juga bisa mengenakan atasan Off Shoulder tanpa lengan untuk tampilan santai dan casual. Coba padukan dengan dalaman pastel yang berbeda warna, bawahan lebih kontras, dan hijab bercorak.

Jangan takut untuk mencoba aksentuasi tabrak warna, asal masih terlihat 'nyambung'. Gaya ini akan cocok untuk Anda



yang suka traveling atau jalan-jalan.

3. Tampil Formal dan Dinamis

Untuk Anda hijaber yang ingin terlihat formal dan dinamis, maka Anda bisa memadukan jumpsuit Off Shoulder ber lengan pendek dengan kemeja putih polos.

Kemeja putih polos akan memberikan penampilan yang dinamis dan formal. Kenakan sebagai dalaman jumpsuit Off Shoulder berwarna gelap. Untuk padu padan yang dinamis, pilih hijab dengan motif yang cocok, baik warna maupun coraknya.

4. Tampil Kasual tapi Tetap Trendy

Jika Anda ingin tampil kasual, maka Anda dapat mengganti kemeja putih polos dengan kaus bergaris lengan panjang atau dress bermotif. Dan agar tak terlihat ramai, maka untuk hijabnya pakailah warna polos, yang sesuai dengan warna bawahan atau manset yang digunakan sebagai penutup bahu.





Sehingga penampilan Anda akan terlihat santai namun tetap keren dan trendy.

5. Tampil dengan Layering

Jika ingin tampil dengan layering, maka hindari busana Off Shoulder dengan banyak motif dan jangan terlalu ketat.

Pilih atasan yang berpotongan longgar. Hindari menggunakan Off Shoulder blouse yang terlalu ketat, karena akan



terlihat sesak dan membentuk tubuh saat dipadukan dengan kemeja atau atasan lainnya. Perhatikan juga penggunaan hijab agar sesuai dengan warna yang lainnya.

6. Tampil Feminin dengan Rok

Untuk Anda Hijaber yang tidak bisa lepas dari rok, atasan Off Shoulder juga sangat cocok jika dipadukan atasan





model terbuka ini. Asal, Anda pandai me-mix and match warna saja.

Misalnya, rok yang dipilih adalah model A-line yang mengembang lebar, pilihlah atasan Off Shoulder yang sedikit pas badan, supaya bisa dimasukkan ke dalam rok. Gunakan manset dengan warna polos muda. Cukup tonjalkan atasan Off Shoulder dan rok saja untuk warna kontrasnya.

7. Tampil Lebih Formal dengan Off Shoulder

Model Off Shoulder tidak hanya tampak modis untuk kesan kasual, tapi juga akan terlihat anggun jika digunakan sebagai kostum yang lebih formal, seperti untuk ke pernikahan atau meeting dengan atasan.

Tidak hanya sebagai atasan saja, Anda juga bisa tampil anggun dengan dress model Off Shoulder. Kuncinya, pastikan Anda memilih warna yang tidak terlalu cerah atau ramai, supaya tidak menghilangkan kesan elegan, dan tetap terlihat stylish dan fashionable.

Model dress Off Shoulder ini memang berpotongan terbuka, namun untuk dalamannya pun tetap ada. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Sedangkan untuk hijabnya, pilihlah hijab simpel seperti turban atau pashmina untuk menutup dada jika ingin tampil lebih syar'i.

8. Tambahkan Aksesori Sebagai Pemanis

Jangan takut bermain aksesori, meski



Tidak hanya sebagai atasan saja, Anda juga bisa tampil anggun dengan dress model Off Shoulder. Kuncinya, pastikan Anda memilih warna yang tidak terlalu cerah atau ramai, supaya tidak menghilangkan kesan elegan, dan tetap terlihat stylish dan fashionable.

busana Anda sudah bertumpuk saat mengenakan Off Shoulder.

Kenakan aksesori seperlunya dan dianggap penting. Jangan mengenakan aksesori secara berlebihan. Jika busana yang Anda kenakan polos dan tanpa motif, tidak ada salahnya jika menambahkan kalung panjang untuk pemanis penampilan. Atau, Anda juga bisa memilih sepatu dan tas yang eye catching. Dan yang lebih penting adalah pilihlah hijab polos untuk memberi kesan penampilan yang simple, namun tetap modis dan modern.

Meski berhijab, Anda masih dapat memadu-padankan busana-busana yang sebelumnya membuat Anda cemas tidak bisa mengenakannya lagi, seperti model atasan off shoulder ini. Asal sesuai dengan syariat wanita Muslimah, maka semua kecemasan itu tidak akan pernah jadi masalah. ♦mt/net



Safari Jumat di Masjid Al Ikhlas

GUBERNUR HD SOSIALISASIKAN VAKSINASI COVID-19

Seiring pelaksanaan vaksinasi tahap kedua pada awal Maret 2021, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mensosialisasikannya langsung di tengah warga. Masjid menjadi tempat pilihan sosialisasi kali ini mengingat vaksinasi tahap kedua mencakup pula prioritas bagi warga lanjut usia yang kerap salat berjamaah di masjid.

Begitulah, maka pada kesempatan Safari Jumat pekan pertama Maret 2021, rombongan Gubernur Herman Deru (HD) berhimpun dengan jamaah salat Jumat di Masjid Al Ikhlas, Jalan Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan.

Jamaah Masjid Al Ikhlas sudah karib dengan Gubernur HD yang sebelumnya pernah bersilaturahmi Pada November 2020 lalu, misalnya, HD juga berhimpun dengan jamaah masjid di acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Jadi, silaturahmi di Masjid Al Ikhlas kali ini pun mendapat sambutan jamaah Jumat, 5 Maret 2021. Dalam kesempatan kali ini Gubernur HD mengajak masyarakat aktif berperang melawan wabah Covid-19 dengan mengikuti vaksinasi yang telah menjadi program pemerintah. Vaksinasi, kata Gubernur HD, merupakan salah satu cara paling efektif menekan laju penularan pandemi Covid-19.

"Salah satu yang paling mungkin untuk mencegah penyebaran wabah itu adalah vaksin. Untuk itu, saya harapkan masyarakat tidak takut divaksin karena vaksin ini akan menambah imunitas tubuh. Kita jangan termakan berita bohong yang mengatakan vaksin itu berbahaya," kata Herman Deru

Terlebih, sambungnya, pandemi covid 19 saat ini masih berlangsung dan menghambat aktivitas masyarakat termasuk dalam menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid. Antara lain karena jumlah jamaah yang hadir harus dibatasi dan protokol kesehatan mengharuskan jarak antarjamaah berjauhan.



"Aktivitas ekonomi, kesehatan, dan si-laturahmi kita terhambat oleh pandemi ini. Termasuk ibadah kita sempat terhambat. Wabah ini harus cepat kita musnahkan. Namun memang harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh masyarakat itu sendiri. Ini juga merupakan ujian keimanan kita," ungkapnya.

Sumsel sendiri, sambungnya, memang bukan termasuk wilayah yang tinggi terpa-par covid-19. Kendati begitu, tetap harus dilakukan penanganan secara masif agar penyebaran wabah tersebut tidak meluas.

"Protokol kesehatan harus terus diterapkan. Kita harus terbiasa dengan cara hidup yang baru agar aktivitas kita bisa tetap terus berjalan. Waspada itu harus tapi jangan takut. Pemerintah akan turun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Program Safari Jumat yang digagas Gubernur HD pun menjadi salah satu sarana untuk memberikan edukasi tersebut. "Pemerintah itu memang harus turun langsung melihat kondisi masyarakatnya sehingga sehingga keluhan masyarakat dapat bisa segera dijawab," sambung Gubernur HD.

Sedangkan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Ikhlas Zainuddin MZ mengaku program safari Jumat yang kerap digelar Gubernur Sumsel H Herman Deru tentu menjadi kebanggaan masyarakat. Selain sebagai sarana ibadah berjamaah, safari Jumat itu juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

"Ini menandakan jika Gubernur Herman Deru merupakan pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Mudah-mudahan hal semacam ini terus dilakukan, bahkan pemimpin ke depannya juga harus melakukan hal demikian," ujar Zainuddin.

Jamaah Masjid Al Ikhlas 5 Ulu Palembang kemungkinan akan menjadi bagian dari sekitar 91.000 warga Sumsel yang menjalani vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua ini terjadwal pada awal Maret 2021.

"Tahap kedua vaksinasi untuk lansia baru difokuskan pada area Kota Palembang, karena vaksinnya masih terbatas. Untuk di luar wilayah Palembang, baru dilakukan apabila vaksinasi sudah mencukupi," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Ferry Yanuar, akhir Februari 2021 lalu.

Prioritas vaksinasi tahap kedua adalah warga lanjut usia, termasuk jamaah masjid dan ibu-ibu majelis taklim. Selain itu,

tenaga kesehatan yang belum sempat divaksin pada tahap pertama dan petugas pelayanan publik.

Sedangkan pemberian vaksin akan berlangsung di tempat pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing yang sudah

keterbatasan tempat penyimpanan vaksin yang masa berlakunya juga terbatas. Oleh sebab itu, untuk vaksin tahap kedua, satu paket vaksin berisi 10 vial (satuan) sehingga dapat digunakan oleh lima orang.

Vaksinasi Covid-19 berlangsung dua



disiapkan pemerintah daerah. Selanjutnya vaksinasi akan meluas ke wilayah Sumsel lainnya setelah mendapatkan kiriman vaksin Covid-19 dari Bio Farma. Seluruh vaksin itu akan didistribusikan langsung ke 17 kabupaten dan kota di Sumsel.

Sebenarnya bukan jumlah vaksin yang terbatas saja kendalanya, melainkan juga

kali untuk setiap orang. Setelah vaksinasi pertama, yang kedua berlangsung sekitar dua pekan kemudian. Dinas Kesehatan menyiapkan skema dengan membuat jadwal pengambilan vaksin untuk seluruh lokasi vaksinasi.

Semoga Sumsel maju untuk semua dan sehat juga semuanya. Insya Allah. ♦



Jadikan Covid-19 Tantangan dan Peluang DEKRANASDA SUMSEL TETAP AKTIF GERAKKAN EKONOMI KREATIF

Produk kerajinan (handicraft) unggulan Sumatera Selatan, antara lain kain tradisional khas, masih dapat berkreasi, berpromosi, dan bertransaksi di tengah banyak kendala seperti wabah Covid-19. Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menggugah Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumsel untuk mewujudkannya.

Dekranasda Sumsel tetap aktif melangkah dalam mengembangkan kerajinan daerah untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sudah pas pula Dekranasda dan Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga berada dalam satu koordinasi. Antara lain dalam mengembangkan kreativitas kain tradisional khas Sumsel.

Menyambut langkah-langkah itu, usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda dan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK (Rakon TP PKK) Sumsel tahun 2021 Gubernur Sumsel H. Herman Deru pun menegaskan, keindahan kain tradisional khas Sumsel tak kalah bersaing dengan kain dari daerah lainnya di Indonesia. Karena itu, Ia yakin jika kain-kain khas Sumsel ini akan semakin banyak yang

dapat menembus pasar nasional hingga internasional.

Terlebih lagi Gubernur HD sudah menyaksikan sendiri penampilan aneka jenis lokal seperti kain sulam angkinan dan kain kawai kanduk yang tampil di pentas dalam bentuk pergelaran busana (*fashion show*). Dalam pergelaran bertajuk Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021 ini, tampil puluhan perwakilan Kabupaten dan Kota se-Sum-



sel. Pergelaran ini berlangsung seiring dengan acara Rakerda Dekranasda dan Rakon TP PKK yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Palembang, pada Kamis, 4 Maret 2021.

"Saya ucapkan terima kasih atas karya-karya yang ditampilkan pada hari ini. Tadi kita lihat ada produk kain tenun yang beraneka ragam, dan ini benar-benar luar biasa," kata Gubernur HD.

Menurut dia, dari sekian banyak jenis kain indah yang tampil, tentu ada yang belum begitu populer di kalangan masyarakat. Padahal produk yang dihasilkan sangat luar biasa. Karena itu menurut dia, keistimewaan kain khas Sumsel ini harus lebih gencar dipromosikan.

Melalui Rakerda Dekranasda dan Rakon TP PKK ini Gubernur HD juga berharap semua daerah dapat menyamakan persepsi. Sehingga tiap daerah dapat menghasilkan produk-produk baru yang semakin mewarnai kekayaan kain tradisional di Sumsel.

"Kita harus bersatu, buatlah satu keanekaragaman produk di daerahnya masing-masing yang dapat diunggulkan. Apapun itu. Sepatutnya Pemprov akan mendorong pengembangannya " kata Gubernur HD.

Dalam kesempatan tersebut HD juga mengatakan agar Dekranasda terus meningkatkan peran mensosialisasikan produk-produk khas Sumsel. Sehingga dapat menarik perhatian para pembeli yang akan datang ke Sumsel.

"Kalau kita berhasil membuat suatu produk unggulan ini tentu akan memancing orang datang. Dekranasda Sumsel sudah menunjukan karyanya dengan membuka Kriya Sriwijaya sebagai display. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal,"



ungkapnya di hadapan para peserta Rakerda Dekranasda dan Rakon TK PKK Sumsel yang anggotanya adalah istri para bupati dan wali kota yang tentu saja diketuai oleh istri Gubernur Febrita Lustia (Feby) Herman Deru.

Menurut dia untuk mengenalkan produk daerah, masyarakat bisa memulai dari diri sendiri. Dengan rajin mengenakan-

ya bangga dengan produk luar," jelasnya.

Dalam Rakerda Dekranasda dan Rakon TP PKK, HD juga meminta struktur organisasi tidak hanya bersifat formalitas, tapi juga melibatkan Tenaga Ahli (TA) seperti bidang ekonomi, administrasi dan produksi. Selain itu, HD ingin para Ibu-ibu berperan aktif untuk memberikan ilmu pengetahuan dan edukasi kepada para

dalam Rakon TP PKK dan Rakerda Dekranasda dan bersama Kabupaten/Kota bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mensinergikan program. Sasarannya adalah membangkitkan semangat perajin serta meningkatkan kreativitas dan daya saing produk kerajinan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Ya memang pas, kerajinan buatan tangan (handicraft) untuk meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga dan keluarganya dalam lingkup PKK. "Jadi kami akan menyamakan persepsi terkait program-program apa saja yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/ kota. Jadi meski di pandemi ini kami akan terus membangkitkan lagi UMKM yang ada di Sumsel," katanya.

Sebagai mitra pemerintah, lanjut Feby, PKK dan Dekranasda membantu, mendukung laju pertumbuhan ekonomi dengan mengadakan kegiatan baik itu di Provinsi maupun kabupaten/kota dengan



nya dengan percaya diri maka produk itu dapat dikenal semua orang sehingga menarik minat orang untuk datang dan membeli. "Maka kita harus bangga dengan produk daerah kita sendiri. Bukan sebaliknya

UMKM dan IKM terkait tentang perbankan yaitu permodalan seperti KUR.

Sementara itu dalam sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru menyampaikan

"Kalau kita berhasil membuat suatu produk unggulan ini tentu akan memancing orang datang. Dekranasda Sumsel sudah menunjukkan karyanya dengan membuka Kriya Sriwijaya sebagai display. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal,"

membina dan mengembangkan produk kerajinan yang bernilai budaya dan ekonomi dengan ciri khas potensi masing-masing daerah.

"Untuk UMKM kita angkat angkinan, jumputan, kawai kanduk. Sementara ini kita mengangkat angkinan yang mana saat ini sudah agak penuh. Jadi angkinan itu bukan hanya untuk sarung bantal, ataupun baju pengantin tapi lebih dari itu. Kita juga akan mensosialisasikan kepada UMKM dan IKM soal permodalan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah. ♦



Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021

FEBY DERU TANAMKAN KEBANGGAAN PADA PRODUK LOKAL

Tampil dalam balutan busana bernuansa merah dengan kain angkinan, kain khas Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru tampak kompak bersama Wakil Ketua Dekranasda Sumsel Fauziah Mawardi yang mengenakan busana senada menghadiri pergelaran busana 'Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021', di hotel Aryaduta, Kamis, 4 Maret 2021 malam.

Sewet adalah penamaan lokal untuk kain. Sedangkan Gelaran itu sendiri merupakan rangkaian acara Rakerda Dekranasda yang telah berlangsung sejak pagi. Feby mengungkapkan dampak pandemi covid-19 tak lantas menghalangi semangat dan kreativitas perajin kerajinan daerah dan pelaku fashion di Sumsel.

Dalam pergelaran busana itu, tampil sejumlah karya terbaik hasil kolaborasi Dekranasda kabupaten/kota dengan para desainer kebanggaan Sumsel. Selain busana wanita, berbagai busana pria juga ikut tampil menggambarkan bahwa kain (sewet) khas daerah juga fungsional untuk semua gender.

"Mengusung tema pakaian Ready-to-Wear (siap pakai), diharapkan karya-karya dalam fashion show 'Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021' dapat menjadi inspirasi trend fashion yang memadukan kain khas daerah dengan outfit yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari," kata Feby.

Di tengah kesulitan dan tantangan yang muncul akibat dampak pandemi covid-19, lanjut Feby, masih ada peluang dan harapan besar bagi industri kerajinan tangan di Sumsel. Selama ini, Dekranasda kabupaten/kota di Sumsel telah berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan serta memajukan kerajinan khas daerah dan produk fashion masing-masing.

"Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi sumber inovasi Dekranasda kabupaten/kota di Sumsel dalam upaya meningkatkan daya saing produk kerajinan daerah serta mewujudkan kesejahteraan keluarga masyarakat Sumsel," terangnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk mendukung kemajuan para perajin, desainer, pelaku fashion serta UMKM di industri kerajinan dan fashion di Sumsel untuk semakin kreatif dalam berinovasi. "Banggalah dengan produk lokal. Karena secara tidak langsung kita ikut andil dalam meningkatkan pemulihan ekonomi," tuturnya.

Setidaknya enam daerah yang menampilkan karya busana para desainer pada fashion show 'Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021', yang diperagakan dengan elok dan menawan oleh para model. Salah satunya antara lain adalah kain songket perahu kajang.

Terinspirasi dari sejarah Biduk Kajang (Perahu Kajang) yang sudah ada di perairan sungai Komering, Ogan Komering Ilir, pada tahun 1829, Dekranasda Kabupaten OKI menampilkan kain songket perahu kajang. Kain ini menggambarkan kerukunan, kerja sama dan tanggung jawab masyarakat.

Sementara itu, berkolaborasi dengan desainer Lina Dedy, Dekranasda Kabupaten OKU Timur menampilkan busana kain angkinan. Angkinan ini berbahan kain beludru, benang emas, benang sulam, dan aneka jenis benang lain yang menjadi penunjang utama pembuatan aksesoris rumah tangga kerajinan sulam itu. Kain ini menggambarkan keindahan motif bunga dalam angkinan, memiliki makna sebuah keanggunan atau keindahan.

Tak kalah menarik, Dekranasda Kota Prabumulih bersama desainer Siung

Siung menampilkan busana kain motif simprit bungaran. Kain jumputan dengan pewarnaan alam limbah nanas, buah yang mengaitkan budaya Melayu Palembang dengan kawasan lain di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam.

Proses pengerjaannya kain simprit bungaran berlangsung dengan teknik ikat celup yang memanfaatkan limbah nanas sebagai pewarna dasar. Selanjutnya, pewarnaan berkombinasi dengan perpaduan warna alam lainnya.

Sedangkan Dekranasda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menampilkan busana kain khas Gambo Muba, rancangan desainer Intan Sari. Tetangga Muba, Banyuasin menampilkan batik rampai.

Batik rampai merupakan desain khusus yang memiliki karakteristik kuat menggambarkan keberagaman kekayaan lokal Banyuasin yang menjadi satu dalam satu perbedaan. Mencerminkan sisi feminin dan tangguh bagi orang yang memakainya.

Batik ini merupakan batik kontemporer yang diperuntukkan "ready to wear" dalam suasana formal maupun informal kreasi Ketua Dekranasda Kabupaten Banyuasin, dr. Sri Fitriyanti Askolani dalam memajukan kerajinan tangan lokal.

Selanjutnya Dekranasda Kabupaten Lahat bersama desainer Yuli Susanti menampilkan kain songket Lahat dengan ciri khas motifnya Bukit Serelo dan buah manggis. Dekranasda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tak ketinggalan dengan menampilkan kain batik pali bermotif relief candi Bumi Ayu -peninggalan purba bercorak Hindu, perkecualian dari masa-masa Sriwijaya yang dominasi ajaran Budha.

Kota dan kabupaten lain siap-siap menyusul. Ekonomi kreatif tetap dapat berkembang di tengah pandemi Covid-19. ♦



GUBERNUR HD SAMBUT KEDATANGAN PANGlima TNI DAN KAPOLRI DI SUMSEL

Jarang-jarang Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) berkunjung ke Sumatera Selatan secara berbarengan. Namun, itulah yang terjadi pada Kamis, 4 Maret 2021. Pemulihan kesehatan dan perekonomian menjadi agenda kunjungan kali ini.

Tentu saja Gubernur Sumsel H Herman Deru sebagai shohibul bait (tuan rumah) menyambut kedatangan Panglima dan Kapolri dalam kunjungan langka itu. Gubernur HD menyambut kedatangan itu di Bandara In-

ternasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.

Rombongan kemudian melihat jalannya vaksinasi bagi dua ribu personel TNI dan Polri dengan rincian seribu prajurit TNI (850 TNI AD, 50 TNI AL, 100 TNI AU) dan

seribu anggota Polri. Vaksinasi dipusatkan di Gedung Warsito Komplek Pakri Mapolda Sumsel.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan vaksinasi yang dilakukan merupakan tahap 2 yang

diperuntukkan bagi prajurit TNI/Polri yang telah dimulai di beberapa tempat sejak 1 Maret 2021 lalu. Menurutnya prioritas pertama pada tahap ini adalah Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, serta para Bhabinkamtibmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Diharapkan setelah melaksanakan vaksinasi ini, langsung diterjunkan di beberapa Puskesmas untuk dilakukan tracing. Membantu menegakan protokol kesehatan. Rencananya pelaksanaan 2 hari yang ditargetkan selesai pada akhir atau pertengahan Maret 2021," ungkapnya.

Ia berharap vaksinasi prajurit TNI dan Polri, bisa segera mencapai target, yang berujung pada pemulihan perekonomian nasional. Menurut Panglima, target kekebalan kelompok atau herd immunity akan segera tercapai sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat tercapai lebih cepat.

Sedangkan Gubernur Sumsel, Herman Deru mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam proses vaksinasi di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Gubernur HD hal ini adalah satu upaya untuk mempercepat vaksinasi yang telah ditargetkan. Untuk Sumsel, progres vaksinasi tenaga kesehatan mencapai 100.200 vial dan yang sudah divaksin 88,3 persen. Vaksin untuk lansia dan pelayanan publik sebanyak 18.270 vial untuk dua kali penyuntikan. Belum lagi ditambah Polri 1.050 vial dan TNI 410 vial.

"Hari ini dua ribu personel TNI dan Polri di Sumsel divaksin mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Babinpotmar, dan Babinpotdirga yang merupakan ujung tombak. Kemarin kita juga telah berikan vaksin bagi para pedagang pasar. Harapan kita Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat bekerja maksimal membantu Satgas Covid-19 Sumsel. Sebagai salah satu upaya kita mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.

HD juga menjelaskan, setelah Gubernur, Bupati dan Walikota, Sumsel telah melakukan vaksinasi untuk warganya. Selanjutnya Gubernur HD menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi di wilayah Sumsel sejauh ini tidak ada kendala secara psikologi, sehingga berjalan dengan baik, termasuk untuk para personel TNI dan Polri tentunya.

Gubernur HD berharap, setelah divaksinasi, para Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat membantu Satgas Covid-19 Sumsel dalam rangka upaya bersama menekan

perkembangan wabah di Sumsel. "Vaksinasi untuk personel TNI dan Polri juga dapat menjadi contoh sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin dan meyakinkan bahwa vaksinasi adalah cara terbaik untuk kita," ujarnya.

Turut hadir pada acara kali ini, antara lain Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus

ran 2000 personel terdiri dari TNI dan Polri, yang nantinya setelah usai pelaksanaan vaksin, maka peserta sasaran vaksinasi yang terdiri dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas langsung akan diterjunkan ke beberapa Puskesmas untuk membantu melaksanakan tracing (pelacakan) di beberapa tempat dan Puskesmas.



Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Ikut pula dalam rombongan, sejumlah pejabat utama Kodam II dan Polda Sumsel serta Pemprov Sumsel.

Dalam arahannya Panglima TNI menyampaikan, kegiatan vaksinasi TNI-Polri yang diselenggarakan ini dengan sasa-

Panglima Hadi Tjahjanto menjelaskan, para anggota TNI-Polri akan ditempatkan untuk membantu dalam rangka menegakkan protokol kesehatan, karena setelah di vaksin pun para anggota tetap harus mengikuti Protokol kesehatan. "Meski sudah di vaksin kita wajib untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut," tegasnya.

Kegiatan vaksinasi kali ini berlangsung selama dua hari untuk mencapai target. Pelaksanaan vaksinasinya untuk seluruh jajaran di Indonesia akan selesai pada akhir atau pertengahan Maret 2021. Karena Babinsa dan Babinkamtibmas adalah ujung tombak sehingga diutamakan

tika masyarakat umum juga sudah divaksin, maka health immunity bisa dicapai. "Harapannya dengan tercapainya target sasaran vaksinasi secara nasional tercapai, maka target percepatan pemulihan ekonomi nasional akan terjadi sesuai yang kita inginkan bersama," kata Panglima

jut tenaga yang berada di garis depan (frontline) dan anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas penanggulangan Covid-19 menjadi prioritas.

"Ini kita laksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga untuk kemudian melaksanakan kegiatan penegakan juga mempersiapkan anggota-anggota, yang siap untuk menjadi vaksinator sehingga kemudian program vaksinasi yang ditargetkan dalam satu hari bisa dilaksanakan satu juta, bisa betul-betul bisa diwujudkan dengan tenaga kerja tenaga kesehatan dari Dinkes dari TNI dari POLRI beserta beberapa personel yang diberikan pelatihan untuk memperkuat agar kegiatan vaksinasi bisa berjalan dengan lancar," urainya.

Lebih lanjut ia menegaskan jika kegiatan ini berjalan dengan baik, maka target



untuk segera melaksanakan vaksinasi dan segera diterjunkan di lapangan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat.

Sehingga nantinya, tambah Panglima lagi, para anggota yang telah divaksin bisa membantu untuk mengawasi bahkan membantu untuk melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat umum. Diharapkan ke-

Di tempat yang sama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, selaku Kapolri bersama dengan Panglima mengecek langsung kelanjutan dari kegiatan penanggulangan Covid-19, yaitu pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan dengan berbagai risiko. Sebelumnya, kata Kapolri Sigit, tenaga kerja kesehatan lebih dulu, kemudian berlan-

Harapannya dengan tercapainya target sasaran vaksinasi secara nasional tercapai, maka target percepatan pemulihan ekonomi nasional akan terjadi sesuai yang kita inginkan bersama

health immunity bisa terbentuk dan diharapkan dengan pengendalian Covid-19 yang maksimal serta mampu menekan secara maksimal pertumbuhan covid, dan kemudian diharapkan pertumbuhan ekonomi pun bisa berjalan dengan baik.

"Kita di kuartal pertama ini diharapkan bisa masuk pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan bersama. Oleh sebab itu, upaya mencegah secara maksimal perkembangan covid-19 harus terus dilakukan bersama," ujarnya.

Tak lupa Gubernur HD menyampaikan kunjungan Panglima TNI dan Kapolri secara bersamaan kali ini merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sumsel. Terlebih acaranya adalah melihat langsung upaya penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumsel. "Terima kasih juga untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak untuk menanggulangi Covid-19 di Sumsel," ungkapnya ♦



SEKALIAN MERESMIKAN PABRIK 4B ARWANA CERAMICS

Wabah Covid-19 menghadirkan tantangan di bidang kesehatan dan dampaknya terhadap ekonomi. Upaya memulihkan kedua aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga tampak dalam kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Sumatera Selatan.

Beriringan dengan pelaksanaan vaksinasi untuk personel TNI dan Polri di Palembang, rombongan juga menyempatkan diri hadir dalam peresmian pabrik baru PT Arwana Citramulia Tbk (Arwana Ceramics) di Kabupaten Ogan Ilir, tetangga Kota Palembang. Keramik produksi Arwana ini untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia.

Peresmian Plant 4B dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP. Selain Panglima TNI, acara juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru beserta jajaran Forkopimda Sumsel; Bupati Ogan Ilir Panji Wijaya Akbar; Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel M Rum, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi; dan jajaran komisaris dan direksi PT Arwana Citramulia Tbk.

Dalam sambutannya, Marsekal TNI Hadi mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Arwana Ceramics Tandean Rustandy yang telah mengundang dirinya melihat pabrik Arwana Ceramics di Ogan Ilir. "Ini kehormatan bagi saya bisa datang untuk melihat secara langsung perkem-

bangsan proyek perluasan Plant 4B Arwana Ceramics di Ogan Ilir. Perluasan Plant 4B merupakan indikator keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang di tengah pandemi Covid-19 dan tidak tergo-yahkan," tuturnya.

Panglima TNI berharap PT Arwana Citramulia Tbk bisa meningkatkan kapasitas produksinya dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia, serta terus melayani bangsa dan menjadi inspirasi bagi semua.

Sedangkan Direktur Utama Arwana Ceramics Tandean Rustandy mengungkapkan, Plant 4B telah selesai dibangun tahun lalu. Namun karena kondisi pandemi Covid-19, peresmiannya tertunda dan baru bisa direalisasikan pada tanggal 4 Maret 2021.

"Plant 4B ini berkapasitas 4 juta m² dan memproduksi keramik ukuran 50x50. Sedangkan dalam dua tahun ke depan, Arwana Ceramics berencana meningkatkan total kapasitas terpasang perusahaan hingga mencapai 71 juta m² per tahun," ungkap Tandean Rustandy,

Tandean mengungkapkan, pembangunan pabrik di Ogan Ilir ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dibanding pabrik Arwana Ceramics lainnya. "Arwana Ceramics pertama kali masuk di Ogan Ilir pada 2012, belum ada jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan pabrik terkendala dengan kondisi jalanan, tetapi kami bisa melewatinya," tutur Tandean.

Mencari sumber daya manusia (SDM)

yang berpengalaman di industri saat itu juga disebutnya sangat sulit, SDM di Sumatera Selatan umumnya berpengalaman bekerja di perkebunan. Begitu juga untuk mencari supplier, tetapi dengan semangat "say no to no", Arwana Ceramics mampu menaklukkan segala keterbatasan.

"Pabrik Arwana Ceramics di Ogan Ilir semakin produktif dan efisien dengan ada tambahan kapasitas dari Plant 4B yang memakai material lokal dengan tingkat TKDN mencapai 87 persen. Dengan demikian, Arwana Ceramics turut menghidupkan supplier-supplier lokal dan UMKM sesuai program pemerintah," tutur Tandean. "Dan 99 persen tenaga kerja di pabrik ini berasal dari wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya," ujar Tandean bangga.

Awal 2021 menjadi periode yang cukup sibuk bagi PT Arwana Citramulia Tbk. Pada 22 Februari 2021 lalu, bertepatan dengan ulang tahun ke-28, PT Arwana Citramulia Tbk mengadakan seremoni penyalan mesin kiln untuk menandai rampungnya pembangunan pabrik baru Plant 5B di Mojokerto, Jawa Timur.

Seiring dengan itu, pada 8 Maret 2021, PT Arwana Citramulia Tbk melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sebagai catatan, pada tahun buku 2020, PT Arwana Citramulia Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp323,01 miliar, naik 49,87 persen dari hasil 215,54 miliar pada tahun buku 2019. ♦



ERICK RAMPINGKAN BUMN DARI RATUSAN JADI PULUHAN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merampingkan 142 BUMN menjadi 41 perusahaan saja. Sedangkan jumlah klaster yang tadinya tercatat ada 27 dikurangi menjadi 12. Langkah perampingan BUMN dan klasternya dicatat sebagai upaya transformasi perseroan negara.

"Transformasi menjadi agenda penting. Kementerian BUMN sedang merampingkan portofolionya saat ini. Kami telah berhasil mengurangi jumlah perusahaan dari 142 menjadi 41. Dan juga, saat ini kami sedang melakukan pengurangan jumlah klaster dari 27 menjadi 12 perusahaan," katanya baru-baru ini.

Upaya efisiensi portofolio BUMN tersebut membawa pemegang saham BUMN memperoleh aset sebesar 650 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 9.100

triliun (kurs Rp14.000 per dolar).

Jumlah aset BUMN tersebut diyakini Erick akan memberi kontribusi besar bagi pembangunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan begitu, misi Kementerian BUMN untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia bisa terealisasi.

"BUMN telah berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, dan perjalanan pertumbuhannya dengan total aset sekitar 650 miliar dolar AS. Kontribusi terbesar kami terhadap PDB dan misi

kami untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Karena itu, merupakan komitmen saya untuk mentransformasi BUMN Indonesia menjadi lebih akuntabel, profesional dan transparan," tutur dia.

Saat ini, Mantan Bos Inter Milan itu terus mengawal perbaikan BUMN. Dimana, peta jalan strategis BUMN didasarkan pada lima pilar utama. Salah satunya, inovasi model bisnis termasuk membangun ekosistem timbal balik dan kerja sama dengan pihak swasta.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa



memberikan dampak yang nyata berarti meningkatkan kinerja BUMN Indonesia, dan memberikan nilai lebih bagi perekonomian negara,” kata dia.

Selain merampingkan, Erick Thohir juga melakukan transformasi terkait transparansi dan kasus-kasus hukum. Ia mengungkapkan menuturkan bahwa saat mulai bekerja dan membuka kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN jumlahnya yaitu 159 kasus dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53 orang.

Perkara tindak pidana tersebut terjadi, ungkapnya, karena iklim investasi di Kementerian BUMN dan perseroan pelat merah yang terjalin secara tidak sehat. Saat itu, investasi dan program yang dijalankan pejabat kementerian hanya didasarkan pada proyek base dan tidak berorientasi pada bisnis proses.

“Bayangin pertama kali saya menjabat dapat laporan ada 159 (kasus korupsi) di BUMN, kenapa kasus korupsi, 53 tersangka, karena apa? Tadi bukan menciptakan ekosistem investasi yang sehat, tetapi berdasarkan proyek base, tidak bisnis proses, itu yang saya tekankan lagi,” ujar.

Untuk mencegah tindak kejahatan

kembali terjadi, Erick pun mengubah lima prioritas utama Kementerian BUMN. Adapun lima prioritas dari hasil revisi tersebut diantaranya.

Pertama, restrukturisasi model bisnis BUMN melalui pengembangan ekosistem kerja sama. Serta pertimbangan kebutuhan stakeholder, dan fokus pada bisnis utama (core business).

Kedua, mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk Indonesia, profesionalitas tata kelola dan sistem seleksi SDM.

Ketiga, memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced analytic, big data, artificial intelligence.

Keempat, meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Kelima, optimalisasi nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

Sebagai pimpinan Kementerian, Erick justru berpikir terbalik, bagaimana Kementerian BUMN harus mengintropeksi diri dibandingkan menyalahi yang mengalami kasus korupsi. Karena dia yakin dengan

perbaikan sistem, dan pemilihan pimpinan BUMN yang berintegrasi dapat meminimalisasi tindak korupsi di BUMN.

“Tentunya Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri, karena saya yakin dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas tentu kita harapkan bisa meminimalisasi dari kasus-kasus tersebut,” jelas Erick.

Erick menambahkan bahwa dirinya telah menerbitkan Peraturan Menteri untuk mendukung transparansi dan transformasi. Pihaknya baru-baru ini juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri tambahan agar tidak terjadi kebijakan yang overlapping atau tumpang tindih.

“Peraturan Menteri yang kita keluarkan di minggu ini adalah salah satunya Peraturan Menteri tentang PNM, bahwa kita tidak mau lagi ada PNM-PNM yang tidak transparan secara prosesnya. PNM penugasan harus ditandatangani oleh menteri terkait yang menugaskan dan dikomunikasikan ke Kementerian BUMN, lalu Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan duduk bersama untuk menyepakati penugasan tersebut,” pungkas Erick Thohir. ♦

PEMERINTAH BAKAL REKRUT 1,3 JUTA ASN DAN GURU

Pemerintah berencana akan membuka penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru berskema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengenai jadwal penerimaan, tengah disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rencan ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mempam RB) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Menurut Tjahjo, proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 dengan total jumlah sekitar 1,3 jut pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah. "Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujarnya.

Karena itu, pemerintah, kata Tjahjo, mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keajegan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Pengadaan ASN dan Guru PPPK ini adalah sebuah upaya yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM, terutama SDM ASN yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai ASN," katanya.

Menteri Tjahjo menambahkan, setiap tahun pemerintah memang melakukan rekrutmen. Tetapi pada tahun 2020, pemerintah membatalkan seleksi pegawai ASN karena kondisi pandemi Covid-19. Namun demikian, pembatalan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk merencanakan dengan baik seleksi yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

"Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta Guru PPPK, Kemenpan RB mendukung upaya Kemendikbud untuk merekrut pegawai pemerintah



dengan PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Tjahjo, diputuskan, untuk membuka sejumlah kurang lebih 1 juta lowongan guru dengan skema PPPK. Dan, para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Para Guru Eks Tenaga Honorer Kategori-2, dan lulusan PPG atau Pendidikan Profesi Guru yang tidak mengajar pun bisa mengisi lowongan Guru PPPK ini.

“Bahkan Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali,” katanya.

Masih terkait dengan seleksi ASN dan Guru PPPK, kata Tjahjo, kementerian yang dipimpinnya, Kemenpan RB bersama dengan Kemendikbud serta BKN menyusun rencana ini sejak Februari 2020. Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran.

“Sementara terkait dengan pengadaan ASN di Pemerintah Daerah, perlu saya jelaskan, untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000

MC *“Secara proporsional 70-80% merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh KB, atau pegawai yg langsung bertugas di lapangan,” terang Tjahjo.*

pegawai,” ujarnya.

Kebutuhan 189.000 pegawai yang akan diadakan pada tahun 2021 ini menurut Tjahjo terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan. Termasuk tenaga kesehatan, dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan.

“Secara proporsional 70-80% merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh KB, atau pegawai yg langsung bertugas di lapangan,” terang Tjahjo.

Jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun 2020 pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen.

“Sedangkan terkait dengan pengadaan ASN di Pemerintah Pusat, untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 baik dari CPNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan,” katanya.

Jumlah kebutuhan pegawai di instansi pusat tersebut, kata Tjahjo, merupakan kebutuhan untuk dua tahun yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun kemarin pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen. ♦





Mendagri Minta Satpol PP dan Satlinmas

BERORIENTASI MENJAGA KEPUASAN PUBLIK

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di lapangan perlu lebih berorientasi pada menjaga kepuasan publik. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri syukuran HUT Satpol PP ke-71 dan HUT Satlinmas ke-59, baru-baru ini.

la mengingat bahwa Indonesia yang merupakan negara demokrasi, legiti-masi dan dukungan publik menjadi kunci dari keberadaan suatu organisasi, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Oleh karena itu, paradigma ini harus di-operasionalisasikan dalam tindakan Satpol PP dan Satlinmas di lapangan, yang lebih berorientasi pada menjaga kepuasan publik.

"Makanya survei-survei banyak tentang kepuasan publik, itulah salah satu indikator atas publik merestui legitimasi memberikan dukungan kepada institusi pemerintah maupun non-pemerintah," kata Tito Karnavian.

Meski perlu mendapat dukungan dari publik, lanjutnya, bukan berarti Satpol PP dan Satlinmas melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang melanggar peraturan.

Sebab, pelanggaran hukum, menurut Tito, dapat merugikan masyarakat lainnya. Untuk itu, Satpol PP dan Satlinmas perlu



Kendati demikian, Tito menekankan, baik Satpol PP maupun Satlinmas jangan sampai terlena. Sehingga, pemerintah maupun masyarakat perlu terus diyakinkan bahwa keberadaan Satpol PP dan Satlinmas itu penting.

melakukan introspeksi terhadap kinerja yang sudah dilakukan.

Tito bilang, usia Satpol PP dan Satlinmas yang saat ini diperingati menandakan bahwa kedua organisasi itu berada pada usia yang matang. Menurutnya, tidak banyak organisasi yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Banyak instansi di dalam negeri maupun luar negeri yang justru dibubarkan karena dianggap sebagai beban negara.

Kemampuan bertahan lama itu, sambungnya, didapatkan karena keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, bertahanya suatu organisasi juga karena kinerjanya yang diakui.

Kendati demikian, Tito menekankan, baik Satpol PP maupun Satlinmas jangan sampai terlena. Sehingga, pemerintah maupun masyarakat perlu terus diyakinkan bahwa keberadaan Satpol PP dan Satlinmas itu penting.

"Mari kita jadikan HUT Satpol PP dan

HUT Satlinmas ini sebagai momentum untuk mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat menuju Indonesia Maju,” kata Mendagri.

“Saya tekankan betul, titip kepada rekan-rekan masalah kualitas ini, jangan berhenti untuk berlatih, baik berlatih tentang hal-hal attitude yang dasar seperti masalah sikap, penampilan yang bagus dan rapi, memiliki kemampuan profesional yang baik, tidak kasar seperti yang viral-viral itu,” tambah Mendagri.

Membangun kualitas organisasi dan SDM sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari publik. Untuk itu, pengembangan diri perlu dilakukan melalui berbagai cara, misalnya saja dengan melakukan studi kasus.

“Latihan-latihan yang di luar, outdoor, lakukan juga yang indoor dalam bentuk case study, studi kasus dalam bentuk kelompok, itu harus rajin dilakukan, mungkin mingguan, itu akan membangun kualitas yang lebih baik, profesionalisme,” ujarnya.

Di samping itu, para pimpinan organisasi juga dipandang perlu untuk membangun kapasitas SDM. Pasalnya, kualitas SDM menjadi kunci dalam memperkuat organisasi.

“Para pimpinan harus punya konsep untuk memperkuat organisasi, memperkuat sarana prasarana, memperkuat kemampuan perorangan baik kuantitatif jumlah yang kurang, kemudian kualitatif, kualitas. Buat konsep untuk membesarkan organisasi baik lembaganya, sarana prasarana, kemampuan apa yang diperlukan,” beber Mendagri.

Satpol PP dan Satlinmas, selain menjadi mitra aparat keamanan, dan mengemban fungsi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) juga memiliki peranan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karenanya, Mendagri juga menekankan agar pengetahuan dan kemampuan khusus perlu dikembangkan untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas dan dipercayai publik.

Pedoman kerja bagi Satpol PP merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; dan bagi Satlinmas keterlibatan secara aktif sebagai tenaga Pengamanan Langsung (Pamsung) dalam Kelompok.

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada



MC
“Tingkatkan profesionalisme serta kapasitas aparatur, ciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia Maju,” pesan Mendagri.

anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat atas pengabdianya dalam mengemban tugas dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa tertib, tenteram dan aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam perayaan HUT yang bertema “Peningkatan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Menuju Indonesia Maju”, Mendagri juga meminta Satpol PP dan Sat-Linmas untuk senantiasa mengedepankan profesionalitas dan meningkatkan kapasitas diri guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Tingkatkan profesionalisme serta kapasitas aparatur, ciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia Maju,” pesan Mendagri.

Di akhir, Mendagri mengucapkan selamat atas perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dan Sat-Linmas hingga menginjak usianya yang sekarang. ♦



Ketua MPR RI, Bamsoet bersama pengurus APLI.

KETUA MPR DORONG PLATFORM E-COMMERCE DUKUNG PRODUK UMKM

Para pelaku usaha Koperasi dan UMKM memanfaatkan keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang telah resmi diundangkan pemerintah pada Februari 2021. PP tersebut merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah memberikan banyak keuntungan bagi Koperasi dan UMKM.

"Salah satu hal krusial yang diatur dalam PP tersebut yakni adanya kewajiban penyediaan 30 persen area infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api, untuk lahan usaha koperasi dan UMKM. Melalui PP tersebut, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi juga menjadi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula, dengan menekankan pelaksanaan pelatihan

kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menerima pengurus Koperasi UKM Indonesia Sejahtera, baru-baru ini.

Ketua DPR RI ke-20 ini juga menyoroti perkembangan jual beli produk melalui berbagai platform e-Commerce atau marketplace yang telah mengambil alih peranan perdagangan cara tradisional melalui pasar-pasar lokal. Keberadaan platform e-

Commerce tersebut justru malah menggerus produk dalam negeri, karena menjadi sarana membanjirnya produk impor dari berbagai negara.

"Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, dan berbagai instansi terkait lainnya harus membuat peraturan yang memaksa platform e-Commerce memberikan ruang bagi pelaku

usaha Koperasi dan UMKM Indonesia. Sehingga mereka bisa menjajakan barangnya ke luar negeri. Selain juga menjadi raja di negerinya sendiri” ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, *platform e-Commerce* juga harus memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha koperasi dan UMKM. Sehingga skill kewirausahaan mereka bisa meningkat.

“Dengan 270,2 juta penduduk, Indonesia menjadi market luar biasa bagi berbagai produk. Jangan sampai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri justru dipasok melalui impor dengan keberadaan *platform e-Commerce*. Kehadiran *e-Commerce* justru harus bisa memberikan kontribusi bagi rakyat Indonesia. Sehingga bisa tercipta simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan,” ujar Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet mendukung langkah Shoppe menggandeng pemerintah melahirkan 500 ribu ekportir pada 2030 melalui Sekolah Ekspor. Program ini berkerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (SMESCO), didukung Kemenkop UKM dan Kementerian Perdagangan.

“Langkah ini harus diikuti berbagai *platform e-Commerce* lainnya seperti JD.id, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Platform *e-Commerce* jangan menjadi gerbang masuk produk impor, justru harus berkontribusi dalam mendorong ekspor Indonesia. Mereka beroperasi di Indonesia mendapatkan keuntungan dari rakyat Indonesia, tentunya harus turut berkontribusi dalam perekonomian masyarakat,” ujar Bamsoet.

Ia menjelaskan, informasi yang dari manajemen Shoppe, penjual ekspor binan akan dibekali dengan kiat-kiat sukses ekspor yang secara spesifik merujuk ke penerapan literasi digital. Melalui kanal Kreasi Nusantara ‘Dari Lokal untuk Global’.

“Shopee Indonesia dan Sekolah Ekspor akan menghadirkan registrasi formulir terbuka untuk publik yang ingin menjadi salah satu bagian dari program ekspor Shopee. Jadi pelaku usaha UMKM dan koperasi dari manapun bisa ikut dalam program ini,” jelas Bamsoet.

Mantan Jurnalis ini mengajak para pelaku usaha koperasi dan UMKM memanfaatkan program sekolah ekspor tersebut. Selain bisa menambah keahlian dan pengetahuan, juga memperkuat jaringan usaha.

“Pelaku usaha koperasi dan UMKM nasional sebetulnya tak kalah dengan China. Hanya kurang pembinaan saja. Melalui sekolah ekspor, diharapkan kita bisa menge-

jar ketertinggalan tersebut. Sehingga melalui *e-Commerce*, produk Indonesia bisa membanjiri pasar Asia dan dunia,” pungkask Bamsoet.

Sementara itu, saat bertemu dengan Pengurus Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Bamsoet mendorong para pelaku industri *direct selling*/penjualan langsung, atau yang biasa akrab dikenal masyarakat dengan *multi level marketing* (MLM), bersinergi dengan *financial technology* (fintech) agar bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

APLI yang bisa mencapai USD 4 ribu per bulan. Ditengah besarnya peran mereka dalam memajukan perekonomian nasional, berbagai hambatan dan tantangan atas keberadaan UU Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, juga dihadapi oleh APLI.

“Antara lain kebijakan verifikasi perizinan perusahaan *direct selling* yang saat ini diserahkan kepada asosiasi, justru bagi APLI lebih bagus jika dikembalikan kepada



Ketua MPR RI, Bamsoet berbincang dengan pengurus Koperasi UKM Indonesia Sejahtera

Terlebih karena pandemi Covid-19, tak memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung. Karenanya, pelaku usaha MLM harus memanfaatkan teknologi informasi.

“Laporan tahunan dari 147 perusahaan *direct selling* pada tahun 2019, mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Di tahun 2020, jumlahnya diperkirakan meningkat mencapai Rp 16,3 triliun. Bahkan EuroCham memperkirakan potensi ekonomi dari industri *direct selling* di tahun 2021 diperkirakan menembus Rp 25 triliun. Menunjukan betapa kuat dan besarnya industri *direct selling* sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Bamsoet.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa kekuatan industri *direct selling* juga terlihat dari besarnya pendapatan anggota

pemerintah sebagai penyelenggara verifikasi. Mengembalikan kembali perizinan ke satu pintu melalui BKPM, sehingga pelaku usaha *direct selling* tidak bingung,” jelas Bamsoet.

Di tengah perkembangan *platform e-Commerce* yang malah membuat produk impor membanjiri dalam negeri, ujarnya, industri *direct selling* justru berjasa dalam menjaga dan melindungi produk dalam negeri. Karena lebih dari separuh produk yang dijual APLI adalah produk dalam negeri.

“Karenanya pemerintah perlu memberikan keberpihakan kepada pelaku industri *direct selling* agar mereka bisa menjajakan dagangannya melalui sarana digital marketplace. Sehingga bisa semakin menggaikahkan pelaku UMKM dalam negeri. Hasil produk dalam negeri harus menjadi raja di negeri sendiri,” pungkask Bamsoet. ♦



Ketua DPR, Dr. (HC) Puan Maharani

DI TENGAH TANTANGAN PASTI ADA PELUANG

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meyakini bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini pasti selalu ada peluang untuk dimanfaatkan menjadi solusi. Ia mengajak semua pihak untuk optimis, tetap bekerja keras, serta hati-hati dalam melangkah.

"Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi, saya yakin ada jendela peluang (*window of opportunity*) yang bisa kita manfaatkan untuk melahirkan sebuah solusi. Tepatnya solusi dalam bentuk transformasi strategis ekonomi Indonesia," kata Puan saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional XVII BPP HIPMI, belum lama ini.

Puan menambahkan, seluruh pihak

menginginkan transformasi yang akan mempercepat terwujudnya ekonomi Indonesia yang berdikari. Dalam kesempatan itu, Puan mengajak HIPMI turut bergotongroyong menjadikan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan Indonesia.

"Termasuk pemulihan ekonomi Indonesia. HIPMI perlu menjadi bagian dari solusi kemajuan ekonomi Indonesia," ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Puan yang menyampaikan materi ten-

tang "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Landasan Kebangkitan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19", menegaskan, UU tersebut dibuat sebagai landasan kebangkitan ekonomi Indonesia. Ia yakin implementasinya bisa mempercepat usaha membangkitkan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

"Tahun 2020 adalah tahun yang dapat membalik semua prediksi. Akibat pandemi

Covid-19, perekonomian global melambat, harga komoditas menurun, volume perdagangan dunia menurun, sejumlah negara melakukan pelanggaran kebijakan moneter,” ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko) periode 2014-2019 itu menyampaikan, setidaknya ada tiga dampak besar dari pandemi Covid-19 bagi perekonomian Indonesia.

Pertama, konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen perekonomian, jatuh cukup dalam.

Kedua, ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha dan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Serta ketiga, berlanjutnya pelemahan ekonomi dunia yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

“Saya melihat HIPMI berada dalam posisi unik dan strategis untuk berperan dalam pemulihan dan memajukan ekonomi kita. Dengan kader-kader yang muda, maka HIPMI ini adalah wajah dari ekonomi masa depan Indonesia, yang turut memegang kunci kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan,” pungkask wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Sedangkan saat Puan Maharani hadir secara virtual dalam acara The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, baru-baru, Puan Maharani menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut Puan, kerja sama internasional sangat baik dilakukan di tengah berbagai tantangan global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Pandemi global ini menyadarkan akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah bersama ini. Saat ini kerja sama internasional telah menjadi kepentingan nasional masing-masing negara,” kata Puan Maharani.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan pandangannya bahwa agenda 5WCSP kali ini diadakan pada saat yang tepat, yaitu di saat dunia menghadapi tantangan besar untuk mengatasi pandemi Covid-19. Menurutnya, acara ini akan menjadi forum yang bermanfaat untuk mempererat kemitraan global, dan memperkuat solidaritas bersama.

Termasuk untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kepemimpinan parlemen untuk berkontribusi menangani pandemi, dan melakukan pemulihan pasca pandemi yang sejalan dengan pencapaian SDGs, perubahan iklim, dan pemberdayaan perempuan.

“Kerja sama internasional merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai upaya meneguhkan kembali komitmen kita akan prinsip multilateralisme yang menjunjung tinggi solidaritas dan kolaborasi,” ujar pimpinan parlemen perempuan pertama di Indonesia itu.

Pertemuan the World Conference of speakers of Parliament diadakan setiap lima tahun dan merupakan pertemuan puncak Inter-Parliamentary Union (IPU). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama Parlemen dunia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama Parlemen dunia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama Parlemen dunia.

tang direncanakan diadakan di Wina, tanggal 6-9 September 2021. Selain pertemuan utama 5WCSP, pada kesempatan itu akan diadakan pula Summit of Women Speakers of Parliament (SWSP).

Pertemuan dipimpin oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan dihadiri oleh 19 anggota Preparatory Committee, yang merupakan Speaker dan Presiden Parlemen berbagai negara. Preparatory Committee ini bertugas menyiapkan pertemuan utama 5WCSP terkait substansi, tema, format, dan hasil pertemuan.

Puan merupakan satu-satunya pimpinan Parlemen dari Asia Tenggara yang menjadi bagian dari Preparatory Committee. Pada pertemuan Preparatory Committee ini, Puan juga diminta untuk menyiapkan SWSP, bersama beberapa Pimpinan Parlemen perempuan lainnya.

Terkait konferensi, Puan mengusulkan tema ‘Kepemimpinan Parlemen dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19’. “Tema ini akan memberikan pandangan ke depan bagaimana parlemen dapat berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi penyelesaian pandemi Covid-19,” pungkasknya. ♦





SETAHUN BERSAMA COVID-19

Setahun sudah wabah global Covid-19 sampai di Indonesia. Mutasi virus asal Inggris yang jenisnya lebih ganas juga sudah muncul.

Sepanjang Maret 2020 hingga Maret 2021, terhitung setahun wabah Covid-19 menjangkau Indonesia. Upaya mengatasi wabah global itu memang perlu lebih serius lagi.

Terlebih, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono mengonfirmasi, mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7 sudah masuk ke Indonesia. Dante mengatakan, sudah ditemukan dua kasus Covid-19 dengan mutasi virus corona tipe B.1.1.7 tersebut.

"Tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B.1.1.7 UK di Indonesia, ini fresh from the oven baru tadi malam ditemukan dua kasus," kata Dante dalam acara "Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih Pasca Pandemi", Selasa, 2 Maret 2021.

MC

Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menjelaskan, munculnya strain baru SARS-CoV-2 umum terjadi pada wilayah yang tidak terkendali pandeminya. Dengan begitu, lanjutnya, jika Indonesia juga gagal mengendalikan wabah Covid-19, mungkin saja ditemukan jenis mutasi virus baru di dalam negeri.

Menurut Dante, masuknya mutasi virus corona dari Inggris ini akan membuat tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 semakin berat. Oleh sebab itu, kata dia, dibutuhkan riset dan model penanganan yang lebih baik.

"Mudah-mudahan kolaborasi yang kita kerjakan dari masyarakat, Kementerian Kesehatan dan Kemenristek/BRIN itu akan membuat hal positif yang akan membuat kita keluar dari pandemi ini," ujarnya.

Jenis baru B.1.1.7 ini diketahui lebih menular hingga 70 persen dibandingkan dengan varian awal SARS-CoV-2 yang ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sejauh ini, selain jenis B.1.1.7 yang pertama sekali muncul di Inggris, ada dua jenis mutasi virus B.1.351 dari Afrika Selatan dan B.1.1.28.1 dari Brasil. Ketiga jenis varian virus penyebab Covid-19 itu menjadi perhatian utama karena lebih menular dibandingkan dengan jenis lain.

Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menjelaskan, munculnya strain baru SARS-CoV-2 umum terjadi pada

wilayah yang tidak terkendali pandeminya. Dengan begitu, lanjutnya, jika Indonesia juga gagal mengendalikan wabah Covid-19, mungkin saja ditemukan jenis mutasi virus baru di dalam negeri.

"Indonesia berpotensi melahirkan strain baru. Potensi Covid-19 menjadi endemi sangat tinggi," kata Dicky, Sabtu, 20 Februari 2021. Tahun ini, sambungnya, tahun ini potensi kemunculan mutasi virus memang tinggi dan berpotensi merugikan pengendalian pandemi seperti di Brasil, Afrika Selatan, dan Inggris.

Selain tiga varian baru di atas, Dicky menyebutkan, ada tujuh varian baru yang ditemukan di Amerika Serikat, tetapi masih diteliti. Malah, kata Dicky, masih ada varian lain yang belum ditemukan.

Saat ini, kata dia, total mutasi sudah mencapai puluhan ribu. Dicky menyebut sudah 40.000-an, karena setiap bulan muncul, terutama di negara yang belum bisa mengendalikan pandemi.

Meski mutasi wajar belaka, apalagi untuk virus semacam corona bertipe ribonucleic acid, RNA (jenis protein yang berada di sel genetik makhluk hidup), kewaspadaan terhadap mutasi virus memang perlu. Yang perlu diwaspadai adalah jika terjadi anomali genetik sehingga menyebabkan mutasi virus yang lebih cepat menular, viral load-nya tinggi, bisa menurunkan efikasi vaksin, dan sebagainya.

"Yang paling dikhawatirkan (mutasi yang) menimbulkan keparahan," kata Dicky. Seperti yang terjadi di Afrika Selatan, sambungnya, varian baru bisa menurunkan efikasi vaksin sekitar seperdelapannya. Sedangkan di Inggris, viral load-nya tinggi atau lebih cepat menular hingga 30 persen dan lebih mudah menyebabkan kematian.

Nah, bagaimana strategi menghadapinya? Dicky mengatakan, pencegahan munculnya strain baru bisa dilakukan dengan strategi 3T dan 5M dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Strategi 3T adalah testing, tracing, treatment atau uji penularan, melacak kontak yang tertular dan penanganannya termasuk vaksinasi. Strategi 3T adalah bagian dari kebijakan penyelenggara negara. Sedangkan 5M merupakan porsi warga negara untuk mencegah penularan Covid-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi pergerakan di luar rumah.

Dicky pun menekankan pentingnya pelacakan untuk menemukan jenis virus baru. "Kita harus menguatkan surveillance. Virusnya sama SARS-CoV-2, penyakitnya sama Covid-19, cara penularannya sama,

tapi yang berbeda adalah kode genetiknya, itu yang namanya mutasi," kata Dicky.

Berkaitan dengan itu, Dr Faheem Younus, muslim dokter yang bermukim di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, kerap menjadi rujukan dalam menangani Covid-19 karena aktivitasnya yang terkenal menjelaskan kesalahpahaman terhadap Islam dan muslim sejak peristiwa pengeboman gedung World Trade Center, New York pada 2011 lalu.



MC "Yang paling dikhawatirkan (mutasi yang) menimbulkan keparahan," kata Dicky. Seperti yang terjadi di Afrika Selatan, sambungnya, varian baru bisa menurunkan efikasi vaksin sekitar seperdelapannya. Sedangkan di Inggris, viral load-nya tinggi atau lebih cepat menular hingga 30 persen dan lebih mudah menyebabkan kematian.

Menurut dokter Faheem, ada lima pelajaran penting untuk mengatasi wabah Covid-19. Pertama, pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi wabah. Kedua, kesehatan masyarakat dan ekonomi adalah dua hal yang saling bergantung, tidak bisa salah satu saja yang diutamakan.

Ketiga, mukjizat atau keajaiban untuk mengatasi Covid-19 akan datang ketika umat manusia bekerja sama. Tambah pula, yang keempat, faktor komunikasi menjadi genting, artinya keterbukaan sangat diperlukan untuk mengatasi wabah. Akhirnya yang kelima, segenap umat manusia perlu menyadari bahwa perlakuan diskriminatif terhadap sesama manusia akan menyulitkan upaya mengatasi Covid-19 karena virus tidak mendiskriminasi siapa yang tertular. ♦

MENCINTAI NASIHAT DAN PARA PEMBERI NASIHAT

Nasihat adalah cinta. Saling menasihati itu tanda cinta. Karena nasihat berarti menginginkan kebaikan pada orang lain. Kita ingin saudara kita itu jadi baik ketika dinasihati, bukan ingin mereka direndahkan atau disalahkan. Inilah dasar nasihat.

Ketika ada seorang pemimpin minta dikritik dan dinasihati oleh rakyatnya itu pertanda cinta dan kebaikan untuk keberlangsungan nilai demokrasi, sepanjang pemimpin tersebut kemudian tidak menangkap dan memenjarakannya.

Imam Nawawi rahimahullah membawakan suatu Bab dalam kitab fenomenal beliau, yaitu kitab *Riyadhus Shalihin*, "Bab: Memberi Nasihat. Beliau rahimahullah membawakan beberapa dalil berikut dalam bab tersebut: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara." (QS. Al Hujurat: 10), "Dan aku memberi nasihat kepadamu." (QS. Al A'raf: 62), dan "Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." (QS. Al A'raf: 68).

Dan beberapa hadits yang dibawakan yakni: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad Daari radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam umumnya." (HR. Muslim no. 55).

Dari Jarir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku pernah berbaiat (berjanji setia) pada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam supaya menegakkan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari no. 57 dan Muslim no. 56)

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45)

Di awal bahasan Imam Nawawi menyampaikan ayat bahwa setiap muslim itu bersaudara. Dan di akhir bahasan beliau sampaikan hadits yang menunjukkan bahwa di antara bentuk cinta adalah menginginkan kebaikan pada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain seperti kita.

Ini menunjukkan bahwa saling menasihati itu didasarkan karena kita adalah bersaudara sehingga kita ingin agar saudara kita pun menjadi baik. Dan juga menunjukkan bahwa bentuk kasih dan sayang terhadap sesama muslim adalah dengan saling menasihati.

Maka tidaklah tepat sikap sebagian orang yang berucap, biarkan sajalah saudara kita beramal seperti itu. Padahal ama-



lan yang dilakukan tidak ada tuntunannya seperti “mengabdi” dan “menghamba” selain kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal seperti itu adalah tingkah laku orang musyrik yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam perangi di masanya.

Jika memang benar kita mencintai saudara kita sesama muslim, maka nasihatilah mereka supaya terhindar dari syirik, bid’ah, dan berbagai macam maksiat lainnya. Karena arti nasihat menurut para ulama adalah menginginkan kebaikan pada orang lain. Sebagaimana kata Al Khattabi rahimahullah, “Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada yang dinasihati.” (Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1: 219)

Imam Nawawi rahimahullah berkata,

“Menasihati sesama muslim (selain ulil amri) berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat serta melakukan amar ma’ruf nahi munkar.” (Syarh Shahih Muslim, 2: 35)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Ut-saimin saat menerangkan hadits Jabir, yaitu bagaimanakah cara menasihati sesama muslim, maka beliau katakan hal itu sudah dijelaskan dalam hadits Anas: “Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seba-



gaimana ia mencintai dirinya sendiri." Kata Syaikh Ibnu 'Utsaimin, "Nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Engkau juga merasa sakit ketika mereka disakiti. Engkau bermuamalah (bersikap baik) dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu." (Syarh Riyadhis Sholihin, 2: 400)

Al Fudhail bin 'Iyadh mengatakan, "Seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Sedangkan orang fajir (pelaku dosa) biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya." (Jaami'ul 'Ulum wal Hikam, 1: 225).

Al Hasan Al Bashri berkata, "Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hamba-Nya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi, ia pun memberi nasihat pada orang lain." (Jaami'ul 'Ulum wal Hikam, 1: 224).

Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita sifat saling mencintai sesama dengan saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Pemberian paling berharga dari seseorang untuk saudaranya yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak adalah nasihat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Sebab, nasihat merupakan urusan yang paling pokok di dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Agama adalah nasihat." (HR. Muslim dari Tamim ad-Dari radhiallahu 'anhu).

Upaya saling menasihati dalam kebaikan merupakan salah satu jalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian dunia dan akhiratnya, "Jika saudaramu meminta nasihatmu, berilah nasihat untuknya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu).

Nasihat yang benar adalah dibangun di atas al-Qur'an dan as-Sunnah, wajib didengar dan diterima, karena nasihat tersebut adalah agama dan pemberian yang sangat berharga dari saudara kita. Orang yang menerima nasihat berarti dia telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kebinaan dan kerugian.

Sebaliknya, orang yang menolak nasihat berarti dia telah menghadapkan dirinya ke dalam jurang kebinaan, sebagaimana yang dialami oleh umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika menolak nasihat dari para nabi. Contohnya ialah kaum Tsamud ketika menolak nasihat Nabi Shalih 'alaihissalam.

Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lalu datanglah goncangan gempa menimpa mereka sehingga mereka mati bergelim-

pangan di rumah mereka. Nabi Shalih pun pergi berpaling meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah sampaikan risalah dari Rabbku. Aku telah berusaha untuk menyampaikan nasihatku kepada kalian. Namun, kalian tidak menyukai orang yang memberi nasihat." (QS. Al-A'raf: 78-79).

Di dalam ayat tersebut, terdapat anjuran kepada kita untuk mencintai nasihat dan mencintai para pemberi nasihat.

Semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati kita sehingga diberi kelapangan dada



untuk menerima nasihat kebenaran, karena hal itu merupakan tanda keimanan.

Sebagaimana firmanNya, "Sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan dirimu (Nabi Muhammad) sebagai penengah dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian, tidaklah ada keberatan di hati mereka untuk menerima apa yang engkau putuskan dan mereka menerimanya dengan sepe-nuh hati." (QS. An-Nisa': 65).

Semoga Allah Azza wa Jalla memasuk-

kan kita ke dalam golongan orang yang mendapat petunjuk dari Allah Swt sebagaimana firmanNya, "Orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang yang memiliki akal sehat." (QS. Az-Zumar: 18).

Hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai hidayah dan taufik sehingga kita mudah menerima nasihat dan kebenaran.

Di antara faktor yang menghalangi sese-



orang menerima nasihat adalah tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla.

Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." (QS. Al-Qashash: 56).

Sepantasnya pula kita sering permohonan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari tipu daya syaitan yang senantiasa berusaha menghalangi manusia dari

nasihat dan kebenaran. Sebab, Iblis telah menyatakan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam al-Qur'an, "Iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu, aku pasti akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih." (QS. Shad: 82-83).

Iblis berkata, "Karena Engkau (Allah) telah menyesatkaniku, aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus." (QS. Al-A'raf: 16).

Hendaknya pula kita senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Sebab, hawa nafsu sangat kuat berperan dalam menghalangi seseorang untuk menerima nasihat.

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Rabbku." (QS. Yusuf: 53).

Jauhilah sikap sombong dan angkuh, karena kesombongan menyebabkan seseorang menolak nasihat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seseorang yang di dalam kalbunya terdapat kesombongan sebesar biji sawi tidak akan masuk surga... Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang." (HR. Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu).

Di antara faktor yang membantu seseorang mudah menerima nasihat adalah sifat jujur. Sebaliknya, dusta adalah sebab yang menyulitkan seseorang menerima nasihat dan kebaikan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Hendaknya kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa ke surga...," "Tinggalkanlah kedustaan, karena dusta akan membawa kepada kejahatan, sedangkan kejahatan akan membawa ke neraka." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu).

Untuk itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditunjukkan oleh-Nya mana yang benar sehingga kita bisa mengikutinya dan mana yang batil sehingga kita bisa menjauhinya,

"Ya Allah, perhatikan kepada kami bahwa kebenaran itu kebenaran, dan berilah rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Perhatikanlah kepada kami bahwa kebatilan itu kebatilan, dan berilah rezeki kepada kami untuk menjauhinya."

Semoga Allah Azza wa Jalla mengurniakan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa mencintai nasihat dan mencintai para pemberi nasihat untuk meraih ridha-Nya. Aamiin Ya Rabb. Wallahua'lam bishawab. ♦red/ dirangkum dari berbagai sumber

NAMA-NAMA SURGA DAN CALON PENGHUNINYA

Surga merupakan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an, surga disebut sebagai Jannah yang digambarkan sebagai tempat yang sangat luas dan berisi segala kenikmatan. Terdapat istana dengan sungai yang mengalir di bawahnya, tahta kebesaran dengan apa-apa yang terbuat dari emas dan permata, buah-buahan, dan juga para bidadari.

Macam-macam nama surga yang disebut dalam Al-Qur'an dan juga para calon penghuninya adalah sebagai berikut :

1. SURGA FIRDAUS.

Surga Firdaus disebut sebagai surga paling tinggi tingkatannya diantara surga lainnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri disebutkan, "Surga terdiri atas seratus tingkat. Antara tingkat yang satu dengan lainnya berjarak seperti bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah Surga Firdaus."

Seperti yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 1-11 Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri mereka calon penghuni surga firdaus.

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,—(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya,—Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna,—Dan orang-orang yang menunaikan zakat,—Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,—Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.—Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.—Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya.—Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.—Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,—(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Mukminun: 1-11).

2. SURGA 'ADN

Calon penghuni surga 'Adn yang terbuat dari intan putih ditulis dalam ayat berikut ini.

"Dan orang-orang yang sabar karena

mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat mas-



uk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;(sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (Q.S Ar-Raad: 22-24)

3. SURGA NAIM

Surga Naim merupakan surga yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari perak putih. Calon penghuninya adalah

orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa dan beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan." (Q.S Luqman: 8).

"Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya." (Q.S Al-Qolam: 34)

4. SURGA MA'WA

Ini adalah surga yang diciptakan dari zamrud yang hijau. Para calon penghuni surga ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah As-Sajdah: 19:

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi



mereka jannah ma'wa tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan."

5. SURGA DARUSSALAM

Surga ini diperuntukkan bagi hamba-Nya yang istiqomah, selalu mengamalkan ayat-ayat Allah SWT, dan beramal sholeh.

Surga ini akan dihuni oleh orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-

An'am ayat 126-127:

"Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan."

6. SURGA DAARUL MUQOMAH

Surga ini adalah surga yang terbuat dari permata putih. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu." (Q.S Al-Fathir: 34-35)

7. SURGA MAQOOMUL AMIN

Surga Maqoomul Amin disebut dalam surah Ad-Dukhaan ayat 51-57:

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman (maqoomul amin), (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air; mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar."

8. SURGA KHULDI

Surga Khuldi, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari marjan merah dan kuning.

Calon penghuninya, yakni orang-orang yang tunduk melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya.

"Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?" Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?" (Q.S Al-Furqan: 15)

Itulah beberapa nama-nama surga beserta calon penghuni nya. Masya Allah, sungguh Allah Maha Kuasa dalam menciptakan tempat kembali yang seindah-indahnya. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung akan tinggal di dalamnya. Aamiin Ya Rabb. Wallahua'lam bishawab. ♦red/wag



Inna Lillahi ...

5 ARTIS INI MENINGGAL AKIBAT TERINFEKSİ COVID-19

Pandemi Covid-19 hingga kini masih terus berlangsung dan masih menakutkan bagi setiap orang di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pasalnya, kasus Positif Virus Corona di Indonesia saat ini masih cukup tinggi.

Melansir data dari kemkes.go.id, covid19.go.id, BNPB, hingga Rabu, 3 Maret 2021, jumlah kasus Virus Corona di Indonesia telah mencapai 1.350.791 orang, serta 36.681 orang meninggal, 147.704 orang positif aktif (masih dirawat), dan 1.166.406 orang dinyatakan sembuh.

Untuk itu, penting sekali untuk selalu diingat tentang pencegahan Covid-19 agar terhindar dari risiko penularan. Dilansir dari laman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), cara paling umum untuk mencegah penularan Covid-19 adalah dengan melakukan 3M, yaitu Mencuci tangan, Memakai masker, dan Menjaga

jarak.

Dalam panduannya, WHO menyarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan orang lain untuk mengurangi risiko infeksi saat mereka batuk, bersin, atau berbicara.

Akibat makin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, baik yang mengalami gejala ringan, sedang maupun berat, maka makin meningkat pula kasus meninggal yang disebabkan virus asal Wuhan China tersebut. Dan dari 36.681 korban Covid yang meninggal, beberapa di antaranya adalah para selebritis.

Berikut 5 Artis Indonesia yang Meninggal karena Covid-19:

1. Soraya Abdullah

Kabar meninggalnya aktris dan pemain sinetron, Soraya Abdullah cukup mengejutkan. Pasalnya, wanita kelahiran 3 Agustus 1978 ini tak terdengar sakit ataupun terpapar virus corona. Sehingga saat dinyatakan meninggal pada 1 Februari 2021 karena Covid-19, berita tersebut hampir tak bisa dipercaya.

Kabar meninggalnya artis pemeran Gerhana II itu diketahui melalui sahabatnya, Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik (mantan istri alm Ustadz Uje). Sebelum meninggal, Soraya memutuskan untuk tidak lagi aktif di dunia akting dan lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dakwah.

Menurut rekannya sesama artis, Indadari, Soraya Abdullah memiliki penyakit bawaan, yakni asma.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'uun ... Telah meninggal dunia sahabat fillah, Soraya Abdullah Balfas, siang ini di RS Siloam Kelapa Dua, Tangerang dengan diagnosa Covid komorbid Asma," tulis Indadari di akun Instagramnya.

Sosok Soraya Abdullah mulai dikenal ketika membintangi sinetron Gerhana II. Sejak saat itu, dia mulai membintangi banyak judul sinetron, seperti Tersanjung 3, Tersanjung 4, Tersanjung 5, Hidayah, Kehormatan, Misteri Ilahi dan banyak lagi.

Selain itu, wajahnya juga tak asing karena sering menghiasi layar TV lewat berbagai iklan produk, dari mulai iklan kendaraan hingga pengharum pakaian, seperti Daihatsu Taruna, Bayfresh, Nescafé, Vaseline, Softener So Klin, Cussons Imperial Leather, dan beberapa iklan lainnya.

Pada 2001, Soraya menikah dengan Marik Guizot, namun pernikahan mereka tak bertahan lama hanya dua setengah tahun. Pada 2004 mereka resmi berpisah. Dari pernikahannya tersebut, Soraya dikarunia dua orang anak, yaitu Muhammad Senarai Ikhtiar dan Siti Aisyiah Az-Zahra.

Nama Soraya Abdullah sempat kembali menyita perhatian, ketika dia dikaitkan dengan teroris bernama Mohamad Jibril. Terutama selepas peristiwa pengeboman di hotel Ritz Carlton dan JW Marriott pada Juli 2009. Soraya menghilang, dan tak diketahui keberadaannya.

Menurut kabar, kedekatannya dengan Mohamad Jibril-lah yang membuat Soraya kemudian mengenakan cadar dan menjadi Ustadzah. Kabarnya, Soraya juga sempat akan menikah dengan Jibril, namun karena sebab tertentu, pernikahan tersebut batal.



Nama Soraya Abdullah sempat kembali menyita perhatian, ketika dia dikaitkan dengan teroris bernama Mohamad Jibril. Terutama selepas peristiwa pengeboman di hotel Ritz Carlton dan JW Marriott pada Juli 2009. Soraya menghilang, dan tak diketahui keberadaannya.

Pada Oktober 2015, Soraya juga ramai diberitakan telah menikah dengan aktor Indra Bruggman, namun hal itu disangkal oleh Indra. Indra menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menikah dengan Soraya.

Kemudian pada 5 Mei 2017, Soraya kembali dikabarkan menikah dengan seorang pengusaha asal Dubai, Alaa Abdulkarim Adly Abbas Elkasaas. Setelah menikah dengan El Kasaas, Soraya mulai membuka usaha biro perjalanan umroh dan wisata, serta sebuah restoran ma-

kanan Indonesia di Kairo, Mesir. Di Mesir inilah Soraya dan El Kasaas pertama kali bertemu pada 2017.

Soraya Abdullah meninggal dalam usia 42 tahun di Rumah Sakit Siloam, Kelapa Dua Jakarta. Dia dimakamkan pada 2 Februari 2021 di TPU Jeruk Purut dan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

2. Farida Pasha

Aktris lain yang juga meninggal akibat virus asal Wuhan, China tersebut adalah Farida Pasha. Aktris yang populer lewat perannya sebagai Mak Lampir di Sinetron Misteri Gunung Merapi ini meninggal dunia pada Sabtu, 16 Januari 2021 setelah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Kabar meninggalnya aktris senior ini diumumkan oleh penyanyi Ify Alyssa, yang tak lain adalah cucu Farida Pasha sendiri. Farida Pasha meninggal dalam usia 68 tahun.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda/Nenek kami tercinta Hj Farida Pasha binti Ali Husen," tulis Ify pada Minggu, 17 Januari 2021 di akun pribadinya.

Proses pemakaman Farida Pasha pun dilakukan sesuai dengan protokol Covid-19. Sebagaimana diungkap sang



Proses pemakaman Farida Pasha pun dilakukan sesuai dengan protokol Covid-19. Sebagaimana diungkap sang cucu, Ify Alyssa.

cucu, Ify Alyssa.

"Mohon maaf, kami baru bisa kasih kabar karena protokol pemakaman yang sangat ketat dan dikhususkan untuk keluarga inti. Mohon doanya untuk ibu. Ibuuu!! seneng-seneng di sana yaa, kangen-kangenan sama Uyt, teman-teman dan papa. Insya Allah doa Ify enggak akan pernah putus untuk ibu. Doain kita semua kuat di sini," tulisnya di Instagram pribadinya.

3. Stan Isakh

Awalnya, Penyanyi Stan Isakh optimis dirinya akan sembuh saat dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 pada awal Mei 2020. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain, Stan Isakh meninggal dunia pada Minggu, 10 Mei 2020.

Stan bahkan sempat mengungkapkan rasa rindunya untuk syuting, namun keinginannya itu tak tersampaikan saat virus Covid-19 merenggut nyawanya.

Meninggalnya Penyanyi sekaligus aktor Stanley Isakh menambah daftar panjang Selebritas Tanah Air yang meninggal karena Covid-19. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, pelantun lagu Memilih Hatimu ini, banyak membagikan aktivitasnya selama diisolasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta.



Namun siapakah sosok Stan Isakh? Serta bagaimana perjalanan kariernya hingga dia dinyatakan sebagai pasien PDP?

Berikut 5 Fakta Tentang Stan Isakh, Seperti Dilansir dari Suara.com:

1. Karier Musik

Mengutip LinkedIn, Stan Isakh mulai mengawali karier sebagai penyanyi tahun 2009. Di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia, ia tergabung dalam grup band Stereosoul.

Pada 2014, Stan Isakh mulai mencoba peruntungan sebagai solois dan merilis lagu perdana, Untuk Indonesia. Dilanjutkan setahun setelahnya, Menatap Wajahmu.

Pertengahan 2018, Stan Isakh memutuskan hengkang dari label lamanya dan bergabung ke dalam Arus Musik. Ia merilis dua single, Menang dan Hijau, di mana lagu itu mengisahkan tentang lingkungan.

2. Karier akting

Bukan hanya di dunia musik, Stan Isakh juga sempat mencicipi profesi sebagai aktor. Pada Januari 2019, Stan terlibat dalam drama musikal Khatulistiwa. Serta beberapa penampilan teater dan juga film.

MC

Stan bahkan sempat mengungkapkan rasa rindunya untuk syuting, namun keinginannya itu tak tersampaikan saat virus Covid-19 merenggut nyawanya.

3. Kolaborasi dengan penyanyi hits

Kepiawaian Stan Isakh dalam memainkan alat music, juga membawanya bisa berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia lainnya. Seperti Judika, Astrid, Gita Gutawa, Fatin, Melly Mono hingga Mytha Lestari.

Bukan hanya itu, Stan Isakh juga menjadi opening act konser, Taylor Swift bersama Niki Zefanya di Jakarta. Kemudian, dia juga pernah mengiringi penyanyi asal Australia, Guy Sebastian hingga terlibat dalam konser penyanyi legendaris, Rick Price.

4. Penyakit yang diderita

Stan Isakh sempat mengumumkan tengah dirawat di Rumah Sakit Persahabatan sejak April 2020. Hal itu lantaran ia divonis PDP dan harus menjalani isolasi.

Sebelumnya, Stan Isakh juga mengalami sesak napas lantaran penyakit pneumonia duplex (paru-paru basah).

Memasuki hari ke-8 masa isolasi, Stan Isakh masih menunjukkan semangat untuk tetap sembuh. Dia juga menganjurkan kepada masyarakat agar selalu menjaga diri. Namun sayang, Tuhan punya kehendak lain.

5. Impian yang Ingin Diwujudkan

Dua hari sebelum Stan Isakh mening-



gal dunia, dia sempat menuliskan impian yang ingin diwujudkan saat sembuh nanti. Yaitu keinginannya bisa kembali berkarya di dunia entertainment.

"Kangen syuting, bikin Video klip. Ahhh, semoga pandemi corona segera cepat berlalu.. Sehat dulu yaaaaa," tulisnya di Instagram.

4. Rina Gunawan

Artis senior Tanah Air, Rina Gunawan menambah daftar artis Indonesia yang meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19. Istri aktor Teddy Syah itu meninggal pada Selasa, 2 Maret 2021 malam. Dikabarkan Rina Gunawan meninggal saat menjalani perawatan setelah dinyatakan positif Covid-19 dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) asma.

Saat diketahui terpapar covid-19, Rina Gunawan menjalani isolasi mandiri. Namun kondisi artis kelahiran 28 Juni 1974

MC Kabar meninggalnya Rina Gunawan dibenarkan oleh manager Rina Gunawan, Evi G Margarethna, yang mengatakan sambil menangis terisak. Teddy Syah, sang suami, juga ikut membenarkan kabar tersebut. Menurut kakak aktor dam model, Atalarik Syah itu, istrinya meninggal dunia sekitar pukul 18.45 WIB

itu makin memburuk, hingga dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Simprug, Jakarta Selatan.

Kabar meninggalnya Rina Gunawan dibenarkan oleh manager Rina Gunawan, Evi G Margarethna, yang mengatakan sambil menangis terisak. Teddy Syah, sang suami, juga ikut membenarkan kabar tersebut. Menurut kakak aktor dam model, Atalarik Syah itu, istrinya meninggal dunia sekitar pukul 18.45 WIB

Menurut Teddy, istrinya masuk rumah sakit sejak seminggu sebelum meninggal, karena mengalami sesak nafas,





akibat terinfeksi virus corona. Rina langsung dimasukkan ke ruang ICU Rumah Sakit Pertamina Simprug.

"Karena sesak napas. Memang ada penyakit bawaan asma dan radang paru-paru," jelas Teddy Syah.

Rina Gunawan yang bernama panjang Mustikana Gumilang Gunawan dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Rina tak hanya sukses dalam kariernya sebagai presenter ataupun penyanyi, namun sukses pula sebagai seorang pengusaha.

Rina Gunawan adalah pemilik Wedding & Event Organizer yang didirikan pada 28 Juni 1992 di Jakarta.

Event organizer tersebut mengkhususkan diri pada pengerjaan layanan jasa hiburan (showbiz Entertainment), seperti pengerjaan sejumlah paket hiburan dan juga mengkoordinir penyelenggaraan acara pernikahan dan acara-acara lainnya.

Rina Gunawan dinikahi aktor Teddy Syach pada 11 April 1999, dan mereka dikarunia dua anak, yaitu Aqshal Ilham Syafatullah dan Karnisya Rahmasyach.

5. Yopie Latul

Penyanyi legendaris Indonesia, Yopie Latul meninggal dunia pada 9 September 2020 karena terpapar Covid-19. Musisi kelahiran Ambon, 7 September 1955 ini



Penyanyi legendaris Indonesia, Yopie Latul meninggal dunia pada 9 September 2020 karena terpapar Covid-19. Musisi kelahiran Ambon, 7 September 1955 ini meninggal tidak lama setelah dinyatakan positif Covid-19.

meninggal tidak lama setelah dinyatakan positif Covid-19.

Sebelum dinyatakan positif, pelantun lagu yang sangat populer Poco Poco ini berstatus sebagai OTG alias Orang Tanpa Gejala. Hal tersebut dibenarkan oleh sepupunya, Carolin. Menurutnya, tidak ada gejala yang terlihat pada diri Yopie.

Setelah dinyatakan Positif Covid-19, Yopie sempat menjalani perawatan selama kurang lebih lima hari, sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Yopie Latul meninggal dalam usia 65 tahun.

Menurut penuturan putra sulungnya, Carlo Satryo, bahwa ayahnya tertular Covid-19 saat tampil di sebuah acara yang berlangsung di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Menurut Carlo, saat itu imun ayahnya sedang menurun.

"Kita enggak tahu ya kalau ada acara itu, kita enggak tahu Papa ketemu siapa. Siapa yang sakit atau ada yang kena, kami enggak tahu," kata Carlo.

Menurut Carlo, sang ayah tidak memiliki penyakit bawaan sama sekali, termasuk jantung maupun diabetes.

"Dia sebenarnya enggak ada penyakit bawaan. Kayak jantung, gula itu enggak ada. Karena memang dia rajin buat pemeriksaan atau kontrol badannya," tambahnya. ♦
mt/berbagaisumber

MENUMBUHKAN KESADARAN TENTANG PERUBAHAN IKLIM

Orang-orang kaya dan pintar seperti Bill Gates tampaknya sudah khawatir betul dengan perubahan iklim akibat asap yang keluar dari bahan bakar fosil: minyak dan gas bumi, juga batu bara maksudnya. Asap dan gas dari bahan bakar migas itu menghasilkan karbon dikenal sebagai efek rumah kaca yang pada gilirannya mengubah iklim—kondisi cuaca dalam periode bulanan, biasanya ditandai dengan musim dominan: kemarau dan penghujan di iklim tropis atau empat musim di iklim sub tropis.

Bill Gates telah menghabiskan satu dekade untuk menyelidiki penyebab dan efek perubahan iklim. Dengan bantuan para ahli di bidang fisika, kimia, biologi, teknik, ilmu politik, dan keuangan, ia telah berfokus pada apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pergeseran planet ke bencana lingkungan tertentu. Dalam buku ini, dia tidak hanya menjelaskan mengapa kita perlu mengupayakan emisi bersih-nol dari gas rumah kaca, tetapi juga merinci apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sangat penting ini.

Berdasarkan pemahamannya tentang inovasi dan apa yang diperlukan untuk memasukkan ide-ide baru ke pasar, ia menjelaskan bidang-bidang teknologi yang telah membantu mengurangi emisi, ketika dan bagaimana teknologi saat ini dapat berfungsi lebih efektif, saat teknologi-teknologi terobosan berada. dibutuhkan, dan siapa yang mengerjakan inovasi penting ini.

Akhirnya, ia menjabarkan rencana nyata dan praktis untuk mencapai tujuan nol emisi — menyarankan tidak hanya kebijakan yang harus diadopsi oleh pemerintah, tetapi juga apa yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk menjaga agar pemerintah, pemberi kerja, dan diri kita sendiri bertanggung jawab dalam perusahaan penting ini.

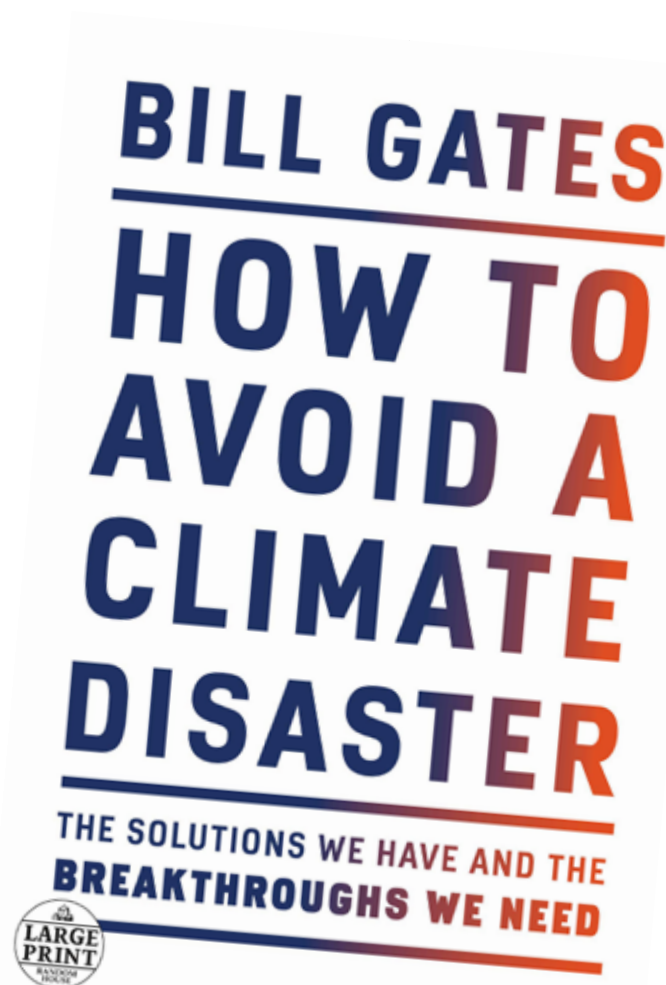
Namun di mata Bob Ward, ahli lingkungan dan perubahan iklim di London School of Economics and Political Science, buku Bill Gates kurang menekankan

pentingnya negara-negara kaya mencapai nol emisi pada 2050, dan 10 tahun ke depan hingga 2030, adalah titik gentingnya. Faktanya, kata Ward, jumlah pemanasan yang kita hadapi bergantung pada emisi kumulatif, sehingga negara-negara penghasil emisi karbon besar perlu mengurangi secara tajam mulai sekarang, dan selama 30 tahun ke depan.

Ward menghadapkan pendiri raksasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Microsoft itu dengan gaga-

san Profesor Michael E. Mann dalam buku *The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet* yang menekankan bahwa energi baru dan terbarukan sebenarnya sudah mencukupi untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Toh kata Ward, baik Bill Gates maupun Michael E. Mann sama-sama optimistik bahwa dunia akan sanggup menghindari bencana perubahan iklim. Persoalannya, untuk negara-negara yang belum maju, kesadaran tentang perubahan iklim tampak belum menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan. Pada saatnya akan lebih jelas seperti apa dinamika antara upaya mencegah bencana iklim dan hasilnya. ♦



| JUDUL BUKU |
|---|
| How to Avoid A Climate Disaster |
| PENULIS |
| Bill Gates |
| PENERBIT |
| Alfred A. Knopf (Penguin Random House New York) |
| TEBAL |
| 272 halaman |
| UKURAN : |
| 241 x 25 x 162 mm |
| EDISI |
| Cetakan Pertama (16 Februari 2021) |
| ISBN |
| 978-0735280441 |



ANDA INGIN BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 125.000,- 6 EDISI (6 BULAN) RP 250.000,- 12 EDISI (12 BULAN) RP 500.000,-



(021) 791 96781
(021) 791 96786



HUBUNGI: PROMOSI/SIRKULASI
PT. INTER MEDIA DIGITAL

Jalan Raya Kalibata No. 8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

EMAIL : moeslimchoice@gmail.com

WEBSITE: www.moeslimchoice.com

FACEBOOK : moeslimchoice

TWITTER : @moeslimchoice



Museum of Islamic Art, Doha, Qatar

6 MUSEUM ISLAM TERLENGKAP DI DUNIA

► **Salah Satunya Ada di Indonesia**

Beberapa negara di dunia memiliki Museum yang berisi tentang koleksi Islami yang lengkap. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Qatar, Indonesia, Malaysia, dan Turki. Selain itu, ada pula sejumlah negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim seperti Australia dan Kanada, namun memiliki Museum-museum Islami yang men-

goleksi benda-benda bersejarah peninggalan peradaban Islam.

Berikut 6 Museum Islam Terlengkap di Dunia:

1. **Museum of Islamic Art, Doha, Qatar**

Museum of Islamic Art adalah museum yang terletak di salah satu ujung Corniche sepanjang tujuh kilometer (4,3 mil)

di Doha, Qatar. Sesuai spesifikasi arsitek IM. Pei, museum ini dibangun di sebuah pulau di lepas semenanjung proyeksi buatan di dekat pelabuhan tradisional dhow.

Taman yang dibangun khusus mengelilingi bangunan di fasad timur dan selatan, sementara dua jembatan menghubungkan fasad depan selatan properti dengan



semenanjung utama yang menahan taman. Fasad barat dan utara ditandai oleh pelabuhan yang menampilkan masa lalu pelayaran Qatar.

Museum of Islamic Art merupakan Museum Islam pertama di Teluk Persia yang memiliki banyak koleksi, sehingga mengundang decak kagum para wisatawan yang mengunjunginya.

Museum ini memiliki taman, bengkel untuk sekolah dan masyarakat umum, dan perpustakaan yang menyediakan informasi tentang Seni Islam dalam bahasa Inggris dan Arab. Perpustakaan juga memiliki sembilan ruang belajar.

Museum ini dipengaruhi oleh arsitektur Islam kuno, namun memiliki desain modern unik yang melibatkan pola geometris. Ini adalah yang pertama dari jenisnya yang menampilkan lebih dari 14 abad seni Islam

di negara-negara Arab di Teluk Persia.

Menempati area seluas 45.000 m² (480.000 kaki persegi), Museum ini berada di semenanjung buatan yang menghadap ke ujung selatan Teluk Doha. Pembangunan gedung dilakukan oleh sebuah perusahaan Turki, Baytur Construction, pada tahun 2006. Ruang galeri interior dirancang oleh tim dari Wilmotte Associates. Museum ini dibuka pada 22 November 2008 oleh emir Qatar saat itu, Sheikh Hamad. Namun baru dibuka untuk umum pada 8 Desember 2008.

Pada usia 91 tahun, sang arsitek Museum, yaitu I.M. Pei harus dibujuk agar tidak pensiun untuk menjalankan usaha ini. Dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia Muslim dalam perjalanan enam bulan untuk mempelajari tentang arsitektur dan sejarah Muslim dan membaca teks-teks Muslim untuk mendapatkan inspirasi untuk desainnya tersebut. Di antaranya adalah berkunjung ke Masjid Agung di Cordoba Spanyol, Fatehpur Sikri di Mughal India, Masjid Agung Umayyah di Damaskus Suriah, dan benteng Ribat di Monastir dan Sousse di Tunisia.

Tetapi tak satu pun dari bangunan tersebut memunculkan esensi sejati yang dia cari. Inspirasi desain I.M. Pei untuk Museum of Islamic Art, Doha akhirnya ditemukan pada Sabil (Air mancur untuk berwudhu) buatan abad 13 dari Masjid Ahmad Ibn Tulun yang dibangun pada abad ke-9 di Kairo, Mesir.

Bangunan Induk Museum terdiri dari lima lantai, kubah utama, dan menara pusat. Itu terhubung dengan bangsal pendidikan melalui pengadilan pusat yang besar.

Interior bangunan didekorasi oleh beberapa seni Islam, dan lampu gantung logam besar digantung di tangga utama lobi. Banyak elemen yang ditemukan di Masjid Ibn Tulun diwakili dalam bangunan sebagai bentuk abstrak. Hal ini memungkinkan adanya kesepakatan dengan nilai dan prinsip tren sejarah arsitektur post-modern yang menyelaraskan antara modernitas dan identitas arsitektur Islam historis.

Museum of Islamic Art ini mewakili seni Islam dari tiga benua selama lebih dari 1.400 tahun. Koleksinya meliputi karya logam, keramik, perhiasan, kerajinan kayu, tekstil, dan kaca yang diperoleh dari tiga benua dan berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-19.

Museum ini menyimpan koleksi karya yang dikumpulkan sejak akhir 1980-an termasuk manuskrip, tekstil, dan keramik. Ini adalah salah satu koleksi artefak Islam ter-

lengkap di dunia, dengan barang-barang yang berasal dari Spanyol, Mesir, Iran, Irak, Turki, India, dan Asia Tengah.

Salah satu koleksi terbaik yang ada di Museum ini adalah lukisan 'Laila Majnun' yang diadaptasi dari kisah cinta klasik karya Nizami Ganjavi, seorang penyair Persia, serta sebuah manuskrip Al-Quran penting dalam koleksi ini adalah MS.474.2003.

2. Bayt Al Quran & Museum Istiqlal, Indonesia

Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal (BQ & MI) merupakan kesatuan dari dua lembaga yang berbeda. Bayt Al-Qur'an yang berarti rumah Al-Qur'an dengan materi pokok berupa peragaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sedangkan Museum Istiqlal menampilkan hasil-hasil kebudayaan Islam Indonesia.

Bangunan ini berada di atas tanah seluas 20.013 m² yang terbuka untuk umum bersamaan dengan saat peresmian oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1997.

Museum ini mempunyai tujuan untuk menampilkan Islam sebagai pemersatu bangsa dari berbagai etnik di Indonesia, dengan menampilkan ajaran budaya Islam Indonesia yang berkualitas dan kreatif dalam upaya untuk memantapkan jati diri bangsa, menampilkan wajah Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Museum ini berisi karya-karya unggulan para ulama dan intelektual Muslim Nusantara sejak abad ke-17 sampai ke-20, yang bernilai historis. Warisan budaya berupa Mushaf, Manuskrip Al-Qur'an, Arsitektur, seni rupa Islami yang memiliki keindahan seni juga tersimpan.

Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, memang menghadirkan pesona untuk direnungkan.

Ruang pameran Bayt Al-Qur'an menghadirkan beragam seni Mushaf dari dalam dan luar negeri, seperti Mushaf Istiqlal yang menjadi primadona pada festival Istiqlal tahun 1995, lalu Mushaf Wonosobo yang merupakan terbesar hasil karya dua orang santri asal Pondok Pesantren Al-Asy'ariah, Wonosobo, Jawa Tengah. Lalu Mushaf Sundawi yang menampilkan iluminasi ragam hias khas Jawa Barat, dan Mushaf Malaysia yang menampilkan ragam hias khas Malaysia.

Ditampilkan pula Al-Qur'an standar Departemen Agama RI, Al-Qur'an biasa dan braille untuk umat Islam tunanetra. Disajikan juga Al-Qur'an interaktif dalam bentuk perangkat lunak (software) komputer yang dapat dioperasikan secara digital seperti

program-program komputer lainnya.

Ruang peraga Museum Istiqlal menyimpan dan menampilkan benda-benda budaya yang telah berabad-abad usianya, menembus peradaban suku, bahasa, daerah dan adat-istiadat di Indonesia. Kejayaan historis masa lalu dan masa kini berbaur dalam suatu peristiwa.

Manuskrip Al-Qur'an, benda-benda tradisi dan warisan, arsitek, seni rupa kontemporer, serta benda Islami lainnya, semua tersimpan di sini, sebagai hasil implementasi dan aplikasi budaya yang ber-

3. Islamic Art Museum, Malaysia

Islamic Art Museum (Museum Seni Islam), Malaysia, secara resmi dibuka pada 12 Desember 1998. Museum ini terletak di jantung kawasan wisata Kuala Lumpur di tengah rimbunnya tanaman hijau di Kebun Raya Perdana dan dalam jarak yang dekat ke Masjid Nasional, Taman Burung dan Planetarium Nasional.

Museum ini adalah museum seni Islam terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 7.000 artefak dari dunia Islam.

Museum ini terdiri dari 12 ruang galeri,

enal dengan koleksi barang pecah belah Islam kuno.

Museum ini juga memiliki fasilitas pendidikan, penelitian, dan konservasi ekstensif. Salah satu pameran permanen paling terkenal adalah "Kamar Ottoman" dari awal abad ke-19 yang telah dipugar dengan baik dan lengkap.

Para konservator menggunakan data yang lahir dari restorasi ruangan ini untuk sering berkolaborasi dengan kolega internasional, menambah percakapan yang lebih luas tentang pelestarian arsitektur



Bayt Al Quran & Museum Istiqlal, Indonesia

sumber dari Al-Qur'an.

Bangunan ini memiliki 4 lantai dengan lingkungan yang jauh dari polusi. Selain itu, tempat ini juga memiliki fasilitas ruangan yang lengkap seperti ruang serba guna (main hall), auditorium, audio visual, ruang kelas, pameran, balkon, dan lain-lain. Semua itu dapat digunakan untuk mengadakan kegiatan seperti seminar, pertunjukan, pameran, perlombaan, forum ilmiah, syukuran, dan lain-lain.

tersebar di dua tingkat. Tingkat satu berisi galeri yang didedikasikan untuk Arsitektur, Al-Qur'an, dan Manuskrip lainnya, dan masing-masing untuk seni India, China, dan Semenanjung Malaya.

Galeri rumah tingkat dua yang didedikasikan untuk Senjata & Armor, Tekstil, Perhiasan, dan Koin, dengan tiga galeri lainnya terdiri dari karya seni yang dikategorikan berdasarkan bahannya- Logam, Kayu, dan Keramik. Museum ini juga terk-

vernakular Islam, dan untuk menarik perhatian pada efek pada "kayu dicat di iklim tropis seperti Asia Tenggara."

4. Topkapi Museum, Turki

Topkapi Museum atau yang dikenal dengan Topkapi Palace (Istana Topkapi) adalah sebuah Museum terbesar di Timur distrik Fatih, Istanbul di Turki. Pada abad ke-15 dan 16 Istana tersebut berfungsi sebagai kediaman utama dan markas admin-

istrasi Sultan Ottoman.

Konstruksi, diperintahkan oleh Sultan Mehmed sang Penakluk, dimulai pada 1459, enam tahun setelah penaklukan Konstantinopel. Topkapı awalnya disebut sebagai 'Istana Baru' untuk membedakannya dari Istana Lama di Beyazıt Square.

Nama Topkapı, yang berarti Gerbang Meriam dibangun pada abad ke-19. Kompleks ini berkembang selama berabad-abad, dengan renovasi besar-besaran setelah gempa bumi 1509 dan kebakaran tahun 1665.

mereka di sepanjang Bosphorus.

Pada tahun 1856 Sultan Abdulmejid I memutuskan untuk memindahkan Istana ke Istana Dolmabahçe yang baru dibangun. Topkapı mempertahankan beberapa fungsinya, termasuk perbendaharaan kekaisaran, dan perpustakaan.

Setelah berakhirnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1923, keputusan pemerintah tertanggal 3 April 1924 mengubah Topkapı menjadi Museum. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki sekarang mengelola Museum Istana Topkapı.

kementerian serta penjaga bersenjata dari militer Turki menjaga kompleks tersebut.

Istana Topkapı merupakan bagian dari Area Bersejarah Istanbul, sekelompok situs di Istanbul yang diakui UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada tahun 1985.

Di Museum yang dulunya merupakan Istana megah di kota tua Istanbul ini, memiliki ruangan megah berkubah yang menyimpan koleksi-koleksi penting, seperti jubah dan pedang Nabi Muhammad SAW.

Jubah tersebut disimpan dengan apik di dalam kotak emas. Selain itu, di Mu-



Islamic Art Museum, Malaysia

Kompleks Istana terdiri dari empat halaman utama dan banyak bangunan kecil. Anggota perempuan dari keluarga Sultan tinggal di Harem, dan pejabat negara terkemuka, termasuk Wazir Agung, mengadakan pertemuan di gedung Dewan Kekaisaran.

Setelah abad ke-17, Topkapı secara bertahap kehilangan arti pentingnya. Para sultan pada masa itu lebih suka menghabiskan banyak waktu di Istana baru

Kompleks Istana memiliki ratusan kamar, tetapi hanya yang paling penting yang dapat diakses untuk umum pada tahun 2020, termasuk Harem Kekaisaran Ottoman dan perbendaharaan, yang disebut hazine tempat Berlian Pembuat Spoon dan Belati Topkapı dipajang.

Koleksi Museum juga termasuk pakaian Ottoman, senjata, baju besi, miniatur, relik keagamaan, dan manuskrip berharga seperti manuskrip Topkapı. Pejabat

seum ini juga terdapat jenggot, jejak kaki, dan surat kuno milik Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini juga disimpan salah satu manuskrip Al-Quran tertua di dunia. Semua koleksi Islami di Topkapı Museum masih tersimpan dengan baik hingga saat ini.

5. Islamic Museum of Australia, Australia

Australia bukanlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, namun negara



Topkapi Museum, Turki

ini memiliki museum Islam yang mengagumkan. Bahkan Islamic Museum of Australia pernah mendapatkan penghargaan dalam Museum & Galleries National Award 2014 sebagai salah satu Museum yang terbaik di Australia.

Museum ini dibuat dengan tujuan awal untuk mengenalkan wajah Islam seutuhnya kepada warga Australia. Selain juga tentu sebagai wadah pertunjukan warisan seni dan sejarah Islam di Australia. Museum ini menyimpan banyak artefak sejarah dan karya seni. Ada pula beragam koleksi lukisan, kaligrafi, arsitektur, keramik, kaca dan tekstil yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Islamic Museum Australia terletak di Anderson Road, Thornbury, Victoria. Untuk menuju ke museum, hanya memerlukan waktu 30 menit berkendara dari pusat Kota Melbourne, atau bisa juga dengan menaiki trem, moda transportasi andalan Kota Melbourne.

Bangunan Museum berdiri megah di lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi. Museum ini dibangun pada tahun 2010 dan selesai pada 2014. Sejak dibuka pada 2014, sudah lebih dari 20 ribu orang mengunjungi Museum tersebut.

"Museum ini didirikan enam tahun lalu

dan sudah dibuka selama 2 tahun. Sudah lebih dari 20 ribu orang yang mendatangi Museum ini dan sebagian besar di antaranya adalah non Muslim," kata Education Director Islamic Museum Australia, Sherene Hassan, seperti dilansir dari detik.com.

Museum Islam pertama di Australia itu benar-benar mengenalkan Islam seutuhnya bagi warga. Saat masuk ke museum, pada bagian pertama adalah pengenalan tentang Islam, mulai dari sejarah Islam hingga pengertian dan rukun Islam serta beberapa petikan ayat Al-Quran.

Masuk ke bagian kedua, Museum menyajikan andil Islam terhadap peradaban manusia. Beberapa penemuan ilmiah dari tokoh-tokoh Islam yang mengubah dunia dipamerkan.

Beberapa temuan seperti sistem hitung Aljabar, permainan catur, alat untuk terbang dan berbagai penemuan lain membuka mata warga Australia bahwa Islam telah turut ambil bagian dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan.

Setelah itu, para pengunjung juga bisa melihat hasil-hasil karya seni Islami. Bagian ketiga di Museum ini ingin memberikan pengertian bahwa Islam tidak pernah membatasi umatnya untuk berkreasi

dan Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai keindahan.

Pada bagian keempat, dipamerkan karya-karya arsitektur Islam. Bangunan Masjid-masjid megah dari berbagai penjuru dunia di tampilkan. Pada bagian ini, juga diperdengarkan alunan suara azan, sehingga para pengunjung bisa mendengarkan syahdunya suara azan. Untuk diketahui, di Australia Masjid tidak diperbolehkan mengumandangkan suara azan melalui speaker di luar.

Kemudian salah satu bagian yang paling menarik dari Museum ini adalah sejarah Islam di Australia. Islamic Museum Australia menyajikan data valid terkait sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Australia.

6. Aga Khan Museum, Kanada

Aga Khan Museum merupakan hasil seni Islam, seni Iran (Persia) dan budaya Muslim yang terletak di 77 Wynford Drive di distrik North York di Toronto, Ontario, Kanada. Museum yang disebut-sebut sebagai Museum Islam termegah di Amerika Utara ini merupakan Museum pertama di dunia barat yang didedikasikan untuk seni dan benda-benda Islam, yang menyimpan lebih dari 1.000 benda langka termasuk



Islamic Museum of Australia, Australia

artefak dari koleksi pribadi Yang Mulia Aga Khan, Institut Studi Ismaili di London, dan Pangeran dan Putri Sadruddin Aga Khan.

Museum yang dibangun oleh seorang jutawan Muslim bernama Aga Khan ini dibuka untuk umum pada 18 September 2014. Henry Kim menjabat sebagai Direktur dan CEO pertama museum sejak 2012.

Pangeran Ameen Aga Khan diangkat sebagai Ketua Dewan yang baru efektif 18 Mei 2016. Peran itu sebelumnya dipegang oleh saudaranya, Aga Khan, yang masih memiliki hubungan dekat dengan Museum sebagai satu-satunya Anggota Organisasi.

Museum ini dirancang oleh arsitek terkenal, Fumihiko Maki yang pernah meraih penghargaan Internasional. Sebagai inisiatif dari Aga Khan Trust for Culture, sebuah agensi dari Aga Khan Development Network, Museum ini didedikasikan untuk menyajikan gambaran umum tentang kontribusi artistik, intelektual, dan ilmiah yang telah dilakukan peradaban Muslim terhadap warisan dunia.

Misi Museum adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang lebih besar atas kontribusi yang telah diberikan peradaban Muslim terhadap warisan dunia. Melalui pendidikan, penelitian,

dan kolaborasi, Museum akan mendorong dialog dan mempromosikan toleransi dan saling pengertian di antara orang-orang.

Selain Koleksi Permanen, Museum Aga Khan juga menampilkan beberapa pameran sementara setiap tahun yang menanggapi beasiswa saat ini, tema yang muncul, dan perkembangan artistik baru. Koleksi Museum dan pameran dilengkapi dengan

program pendidikan dan acara seni pertunjukan.

Museum ini dirancang dengan gaya kontemporer modern di mana tembok luar menggunakan batu granit Brasil. Museum ini memiliki ruangan pameran yang megah serta dilengkapi dengan ruang teater berkapasitas 350 tempat duduk. ♦mt/berbagaisumber



Aga Khan Museum, Kanada

ANTARA JALUR SUTRA DAN JALUR REMPAH

PALING tidak ada dua kesultanan atau dinasti Islam yang cukup besar yang pernah berkuasa di kawasan Asia Tengah, diantaranya: Turki Seljuk yang beribukota di Isfahan (kini bagian dari Iran) dan Timurid beribukota di Samarkand (kini masuk negara Uzbekistan).

Warna Islam yang sufistik, toleran terhadap budaya setempat, mengapresiasi seni, serta menghargai kemajuan sains dan teknologi, menjadi ciri utama Islam di kawasan ini sejak saat itu.

Islam Sunni dijadikan mazhab resmi kedua dinasti ini, yang kemudian diturunkan ke dalam berbagai bentuk hukum dan aturan kehidupan di kerajaan maupun di masyarakat luas. Di kawasan Asia Tengah sampai saat ini Islam Sunni dengan Mazhab Syafiiyah masih mendominasi.

Pada masa kejayaannya, khususnya pada zaman Maliksyah (1072-1092) sebagai penguasa Turki Seljuk dan Timur Leng (1370-1405) sebagai penguasa dinasti Timurid, wilayah Asia Tengah yang dilalui Jalur Sutra mengalami kemakmuran luar biasa, dan menyumbangkan berbagai bentuk peradaban, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan pertanian, juga bidang seni seperti arsitektur, kaligrafi, karpet, dan sastra.

Pada saat itu tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Universitas yang saat itu disebut madrasah, mengajarkan kedua cabang ilmu ini di tempat yang sama. Karena itu, Islam rahmatan lil alamin menemukan bentuknya yang nyata, kemudian menyebar luas dengan sangat cepat di wilayah ini.

Jika dari China di Timur sampai Eropa di Barat dihubungkan melalui jalur darat yang dikenal dengan Jalur Sutra, maka dari Nusantara di Asia Tenggara ke arah Barat Laut sampai ke Eropa, dihubungkan melalui jalur laut melewati kota-kota pelabuhan dikenal dengan sebutan: "Jalur Rempah".

Jalur Rempah menurut Ananto Kusuma Seta, sudah dimulai sekitar 2.000 sampai 5.000 tahun lalu. Komoditas cengkeh (*Eugenia aromatic*) diyakini sebagai tanaman asli yang tumbuh di Pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pala (*Miristica fragrans*) merupakan tanaman Pulau Ban-



OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.

da. Semuanya berada di Provinsi Maluku Utara.

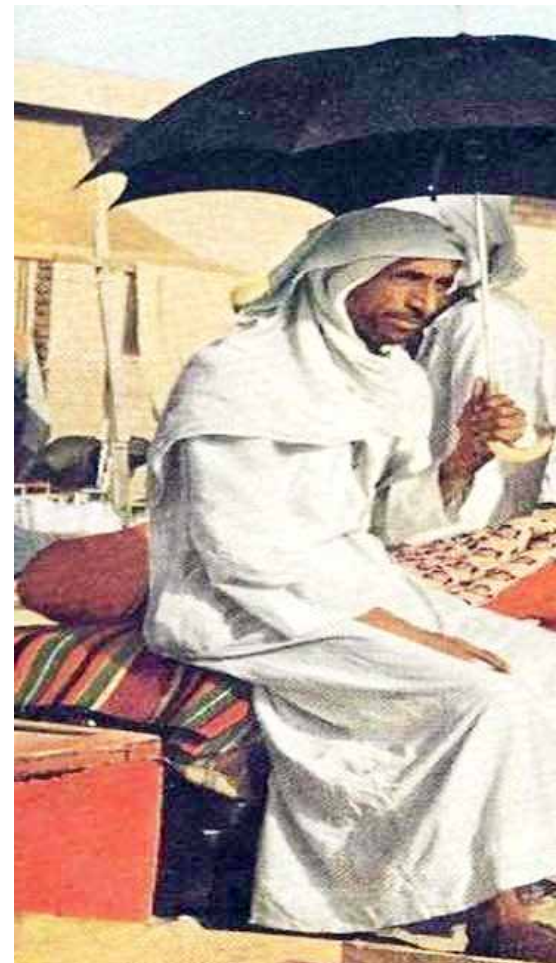
Pulau Sumatera menghasilkan rempah-rempah aromatik seperti kemenyan (*Styrax benzoin*) dan kamper (*Dryobalanops aromaticum*), kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) dan lada (*Piper nigrum*). Sementara cendana (*Santalum album*) dan kemiri (*Aleurites moluccana*) tumbuh di pulau-pulau di Indonesia Timur.

Jalur Rempah menghubungkan kota-kota di Nusantara, melewati Aceh, Malaka (kini masuk wilayah Malaysia), kemudian Gujarat (kini masuk wilayah India), melalui Selat Bab Elmandeb (Yaman), kemudian menyusuri Laut Merah sampai ke Mesir kemudian berujung di Istanbul (Turki).

Jalur Sutra bersinggungan dengan Jalur Rempah di sejumlah kota pelabuhan metropolitan seperti Istanbul, Gujarat, Malaka, dan Aceh. Disinilah komoditas seperti sutra, karpet, kertas, dan keramik yang



Pada saat itu tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Universitas yang saat itu disebut madrasah, mengajarkan kedua cabang ilmu ini di tempat yang sama. Karena itu, Islam rahmatan lil alamin menemukan bentuknya yang nyata, kemudian menyebar luas dengan sangat cepat di wilayah ini.



bergerak melewati Jalur Sutra dipertukarkan dengan gahru, cendana, dan rempah-rempah yang bergerak di Jalur Rempah.

Melalui para pedagang, di kota-kota pelabuhan ini pula Islam diperkenalkan. Bila ditelusuri genealoginya, maka Islam yang berkembang di kawasan Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan Islam yang dipraktikkan di kawasan Asia Tengah dan Yaman.

Jika Islam yang berasal dari Yaman khususnya dari Hadramaut yang menjadi kota santrinya sangat sufistik, maka Islam yang berasal dari Asia Tengah khususnya kota Samarkand, Buchara, Termez, dan Almaty memiliki ciri adanya keseimbangan antara sufisme dan rasionalisme yang berdimensi sains serta teknologi.

Sebutan Habib atau Habaib merupakan panggilan untuk para pendakwah asal Yaman, sedangkan sebutan Syekh atau Maulana lazim digunakan untuk menyebut para pedagang merangkap guru agama asal Asia Tengah.

Ketika masuk ke Pulau Jawa, para syaikh atau maulana ini mendapatkan panggilan setempat: "Sunan" atau "Wali". Sebutan "Wali Songo" yang berdakwah di Indonesia terutama di Pulau Jawa, sejatinya merupakan sembilan ulama yang memiliki pertalian keluarga yang berasal dari wilayah

MC Melalui para pedagang, di kota-kota pelabuhan ini pula Islam diperkenalkan. Bila ditelusuri genealoginya, maka Islam yang berkembang di kawasan Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan Islam yang dipraktikkan di kawasan Asia Tengah dan Yaman.

Asia Tengah.

Saat saya mengunjungi makam Imam Buchari yang terletak di pinggiran Kota Samarkand (Uzbekistan), saya sempat mengunjungi museum kecil yang berada di kompleks ini. Saya melihat dokumen atau prasasti nama-nama dan silsilah Wali Songo yang berasal dari wilayah ini, kemudian berdakwah di Nusantara.

Kalau dilihat wajah dan postur tubuhnya sebagai keturunan campuran Turki-Mingol, maka kita akan melihat ciri kulit terang, hidung mancung, dan mata sipit. Hanya saja bagi kebanyakan orang Indonesia, setiap orang yang bermata sipit disebutnya China. Sampai sekarang orang Indonesia pada umumnya tidak bisa membedakan antara orang China, Mongol, Jepang, dan Korea, semuanya dianggap China.

Indikasi lain, sejak saat itu dan sampai kini, mayoritas umat Islam di kawasan Asia Tengah beraliran Suni dan bermazhab Syafiah sebagaimana mayoritas umat Islam di Nusantara yang melingkupi Indonesia, Malaysia, Singapor, Brunei, Thailand Selatan, Philippina Selatan, dan Kamboja. Jika China berhasil mengkapitalisasi warisan sejarahnya yang dikenal dengan Jalur Sutra, mampukah Indonesia mengkapitalisasi Jalur Rempah? ♦rmol



RUMAH BAU MELATI

Waktu Magrib yang menegangkan. Orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker untuk bersembunyi.

Tidak ada azan magrib hari itu sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji.

"Pencuri sialan! Dia harus ditangkap dan diadili!" kata rombongan massa itu saling sahut-menyahut, menumpahkan sumpah serapah, sesekali salah satu di antara mereka meneriakkan takbir.

Mereka makin dekat. Semerbak melati dibawa angin dari arah rerimbunan pepohonan di halaman rumah angker.

Rumah bau melati. Konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikikan.

Namun, kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai. Bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji, mana mungkin wanita itu berani menampakan diri?

Bau melati makin kental. Kian menusuk hidung. Wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah.

"Allahu akbar!" Pak Haji mengucapkan takbir. Pandangannya menatap tajam ke awang-awang. Sementara warga yang lainnya senyap. Beberapa gemeteran, ada juga yang mulutnya sampai menganga.

Perempuan itu muncul, melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun.

"Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan adzan? Bangsaku sudah bersiap menutup telinga, beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau," sergah wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang.

"Kami mau menangkap pencuri kotak amal!" jawab Pak Haji sedikit gemetar.

"Tidak bisa! Dia mencari perlindungan di rumah kami! Wajib bagi kami untuk melindunginya!"

"Setan terkutuk! Sudah terkutuk, sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk!"

"Kamu lebih terkutuk! Kalian semua terkutuk!" lecutan kata itu diiringi tawa cekikikan. Bau melati bertebaran.

"Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allaah! Lekas-lekaslah terbakar dan enyah kamu ke neraka!"

Pak Haji membaca ayat kursi. Warga berdzikir bersama-sama. Dengung suara dzikir terdengar bagai segerombolan lebah.

Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih.

"Bagaimana bisa ayat suci itu menghiasi lisanmu, bahkan tiap hari kamu membaca berjus-jus quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati?" ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon beringin.

"Apa maksudmu, setan busuk?"

"Aku tahu siapa si pencuri kotak amal. Dia cuman anak-anak. Dia yatim. Kini bertambah jadi piatu. Simboknya baru saja mening-

gal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya masih basah lalu kini kalian mau menghabisinya? Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian?"

Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel. "Tapi, bukan berarti dia boleh mencuri!"

"Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan. Hidupnya kini sebatang kara! Lalu ke mana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja?"

"Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadah jadi tenang." Pak Haji masih membela diri meski nada bicaranya makin melunak.

"Masjid kalian makin megah, makin nyaman, tapi, Allaah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedang kalian tak mau menggubrisnya."

"Kurang ajar! Beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan!" Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas, tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan.

"Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani?" Wanita itu kembali cekikikan.

Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kaffah. Dahulu, di pondok pesantren, ia kerap mendengar hadits qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya?

Tertunduk Pak Haji dalam-dalam. Betapa menyesalnya ia kini.

Bau melati semakin tidak wajar. Makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji

pingsan paling akhir.

"Pak, bangun! Sudah Maghrib. Ayo ke masjid." Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas Ashar.

Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal. Masih pada tempatnya. Pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelebat di benaknya.

Usai Maghrib, Pak Haji dan beberapa jamaah membongkar kotak amal. Dari hasil yang didapat, sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat.

Esok hari, pak haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal, ditambah uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada di dalam mimpi.

Tersuruk-suruk langkah Pak Haji membopong sekarung beras dan menenteng bingkisan. Beberapa warga menawarinya bantuan untuk membawakan karung beras, tapi Pak Haji menolak.

"Ini adalah kelalaianku! Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya!"

Sesampai di depan gubuk tua dan reyot di pinggir sungai, buru-buru Pak Haji dan warga dengan bangga membuka pintu gubuk yang hampir roboh itu. Namun apa yang mereka saksikan, Yatim piatu itu telah terbujur kaku di atas sajadah lusuh sambil memegang perutnya. Di hadapannya ada Al Qur'an kecil yang masih terbuka pada surat Al Mukmin ayat 47. Innaa lillaahi wa innailaihi rooji'uuun. ♦ red/wag





IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp. 50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp. 75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp. 25.000.000

Media Yang Tepat Untuk
Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 ALAMAN
UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN 1/2 CENTERSPREAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 X 124 MMK)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 X 124 MMK
(HORIZONTAL), 90 X 250 MMK (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL (FC) 1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN CENTERSPREAD (FC) DILUAR EDISI KHUSUS,
1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN DISPLAY (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN HALAMAN 13, 15, 17 (FC)
1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE:

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai Dengan Topik Bahasan.
- Pilihan Halaman Iklan Yang Mudah Disimak Pembaca
- Harga Iklan Yang Bertabur Diskon Untuk Para Pelanggan



IKLAN CENTER SPREAD FC Rp. 80.000.000

● Contact Person : ZULFAHMI JAMBA

▶ 021 - 79196781

▶ 081380196507

▶ Email : moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE

● EDISI 39/ MARET 2021

● MOESLIMCHOICE.COM ● MOESLIMCHOICE.TV



**HARNOJOYO
KENALKAN
PALEMBANG EMAS
DARUSSALAM**